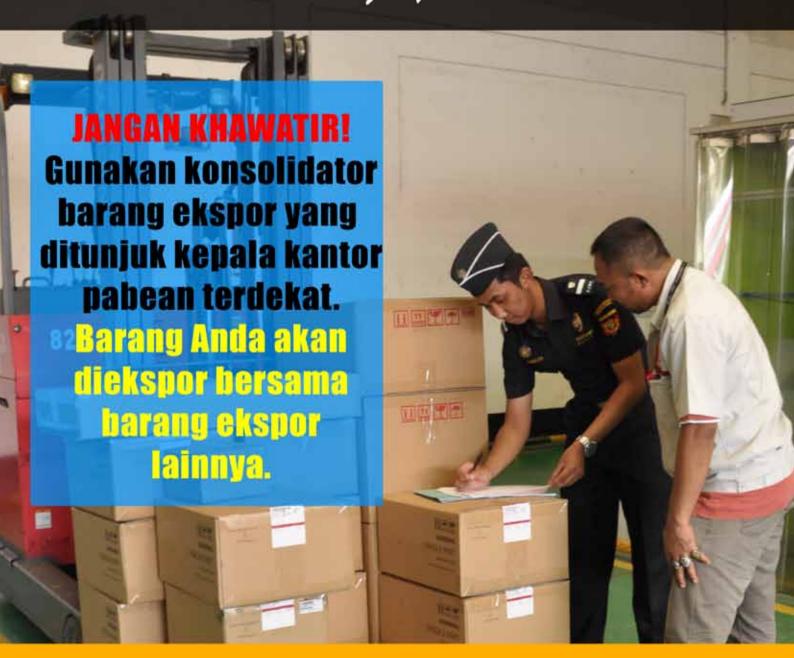




Mau ekspor, tapi ..

"barangnya cuma dikit..





Kami Memfasilitasi UKM dengan kemudahan pelayanan ekspor

DARI REDAKSI

alam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan, khususnya di bidang proses perizinan BKPM dan Bea Cukai bekerja sama dalam membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di dalamnya terdapat perwakilan dari 22 Kementerian dan Lembaga yang dapat memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Upaya dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, dan transparan tersebut akan dibahas dalam laporan utama Warta Bea Cukai bulan ini.

Pada rubrik Feature, kali ini tim redaksi mengangkat cerita dari perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Pembaca akan diajak menelusuri kota kecil bernama Mota'ain yang merupakan desa yang menghubungkan dua negara. Pembaca juga akan diajak mengetahui bagaimana suasana perbatasan antara kedua negara dan para pelintas batasnya.

Di rubrik reportase, tim redaksi melaporkan hasil penindakan Bea Cukai di Pasuruan yang berhasil menggerebek pabrik yang memiliki mesin produksi rokok ilegal. Ada juga liputan dari penutupan diklat Customs Enforcement Team di Ciampea, Bogor, dan ada liputan terkait turnamen voli yang diselenggarakan di Yogyakarta.

Selain itu, para pembaca juga akan diajak menelisik jejak sejarah dan keindahan alam Sumbawa, Nusa Tenggara Barat di Istana Dalam Loka. Istana yang dibangun oleh Kesultanan Sumbawa yang berkuasa hingga tahun 1931 ini merupakan Istana yang memiliki penuh kisah sejarah yang sangat menarik untuk dibaca.

Last but not least, jangan lupa kirimkan kontribusi anda untuk majalah WBC dapat berupa foto, karya sastra baik puisi, komik, cerita pendek, ataupun cerita bersambung. Kirimkan karyamu ke wartabeacukai@gmail.com

Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi Deni Surjantoro

RALAT!

Volume 48 Nomor 8 Agustus 2016 Hal. 37 Travel Notes berjudul "Kampung Cirendeu" ditulis oleh Ilmar Pungu Simanjuntak Direktorat IKC

Majalah Warta Bea dan Cukai diterbitkan oleh Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Redaksi menerima kiriman foto, artikel dan surat untuk keperluan konten majalah ini. Setiap pengiriman dialamatkan melalui surat elektronik ke majalah.wbc@customs.go.id dan wartabeacukai@gmail.com dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Agar menuliskan nama kolom dalam subyek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Jend. Ahmad Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp: (021) 478 60504, (021) 478 65608, (021) 489 0308 ext. 820-821-822 e-Mail: wartabeacukai@gmail.com dan majalah.wbc@customs.go.id

Follow: 🕒 @Warta_BeaCukai 🚹 WartaBeaCukai



Terbit Sejak 1968

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Heru Pambudi, S.E., LLM

PENASEHAT

SEKRETARIS DITJEN BEA DAN CUKAI Drs. Kushari Suprianto, M.M., M.E

DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN

DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN

DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

DIREKTUR KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN Ir. Rahmat Subagio, M.A

DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL Hendra Prasmono, S.H., M.IH

DIREKTUR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI Muhammad Sigit, Ak, MBA

DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERENCANAAN

TENAGA PENGKAJI BIDANG PELAYANAN DAN PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN DAN CUKAI Dwi Teguh Wibowo, S.E.

TENAGA PENGKAJI BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS KINERJA ORGANISASI KEPABEANAN DAN CUKAI

M. Agus Rofiudin, S. Kom., M.M.

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA

DIREKTUR KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA

PEMIMPIN REDAKSI

KASUBDIT KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI

WAKIL PEMIMPIN REDAKSIMuchamad Ardani, Imam Sarjono, Sudiro, Devid Yohannis Muhammad

Dara Rahmania, Jiwo Narendro P, Zulfaturrahmi, Rezky Ramadhani, Septian Dawang Kristanto, Rian Effendi, Nur Iman, Rio

M. Faishal Hafizh, Jodie Umbara, M. Khamil Hamid, Nurcholis Efendi, Deo Agung Sembada, Rahmad Pratomo Digdo, Dovan Wida Perwira, Irfan Nur Ilman

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Supomo, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Syahroni,

Kartika, Nur Hafni Rahmawati, Mustamiludin, Dadan Heriyana, Rudi Andrian

Daftar Isi Oktober 2016



Laporan Utama

- BEA CUKAI DAN BKPM BEKERJA SAMA MENDUKUNG INVESTASI
- 15 Lestari Indah. Deputi Kepala BKPM, Bidang Pelayanan Penanaman Modal PERTUMBUHAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA TERUS MENGALAMI PENINGKATAN

Opini

19 KEWENANGAN BEA CUKAI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (2 HABIS)

Oleh: Agustinus Catur Setiawan (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pangkalpinang)

23 KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG SEBAGAI BATU LONCATAN PENGEMBANGAN EKONOMI PAPUA BARAT

> Oleh: Firman Sane Hanafiah (Ka KPPBC TMP C Sorong)

Profil Kantor

27 Bea Cukai Pangkal Pinang Hadir untuk Melayani Industri di Pulau Bangka

31 Bea Cukai Menjawab



Galeri Foto

32 Kabupaten Karimun

Reportase

- 34 DJBC DAN IAPI JALIN KERJASAMA PELATIHAN
- Customs Enforcement Training
- Turnamen Internal Bola Voli DJBC CUP ke 6
- 37 MILIKI MESIN PRODUKSI ROKOK ILEGAL, SEBUAH PABRIK DI PASURUAN DIGEREBEK BEA CUKAI
- **38** KERJA SAMA KEMENTERIAN KEUANGAN c.q. BEA CUKAI, KEPOLISIAN RI, DAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENGGAGALAN PENYELUNDUPAN PRODUK PERIKANAN DAN BAHAN PEMBUAT **BOM**





Sisi Pegawai

- Semakin Jeli Membidik Prestasi HERY SUSTANTO
- 44 Ruang Kesehatan
- 45 Peraturan

Travel Notes

46 Mari Menelisik Jejak Sejarah dan Keindahan Alam Sumbawa!



ENGLISH PAGE

THE MAIN REPORT

- **70** Cooperation Between Customs and Investment Coordinating Board (BKPM) In Supporting Investment
- 75 Interview:

Lestari Indah, Deputy of Chairman at Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), Investment Service Department

INVESTMENT IN INDONESIA IS CONTINUOUSLY INCREASING

- 49 Kicauan
- **Infografis**
- 52 Event

Sejarah

54 PELABUHAN PANARUKAN



Berbagi Pengetahuan

Hobi dan Komunitas

CUSTOMS LITERACY FORUM (CLiF)

Feature

- **61** DEMI MERAH PUTIH Pengabdian Petugas Bea Cukai Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste
- 66 Ragam
- Kebijakan 68

OFFICE PROFILE

78 Customs and Excise Service Office Type C of Pangkal Pinang Serving the Industries in Bangka Island

POLICY

80 The Whirligig of Customs Valuation A Study of the Regulation on Customs Valuation Database

HISTORY

82 Port Of Panarukan

Bea Cukai dan BKPM Bekerja Sama Dalam Mendukung Investasi



Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan khususnya di bidang proses perizinan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditugaskan pemerintah untuk membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di dalamnya terdapat perkwailan dari 22 Kementerian dan Lembaga yang dapat memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

ujuan utama dari pembentukan PTSP adalah mempermudah proses perizinan dalam mendirikan suatu usaha. Pembentukan PTPS ini dilatarbelakangi pada Oktober 2014, sehari setelah Presiden Jokowi dilantik, di mana ia berkunjung ke BKPM dan melakukan dialog dengan pelaku usaha. Saat itu, pelaku usaha mengeluhkan lamanya mengurus proses perizinan di Indonesia. Dari pertemuan tersebut, Presiden menugaskan BKPM untuk menyiapkan PTSP dalam waktu 3 bulan. Berkat kerja cepat dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak, pada tanggal 26 Januari 2015, PTSP Pusat diresmikan di BKPM yang didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014.

Menurut Lestari Indah Deputi Kepala BKPM, Bidang Pelayanan Penanaman Modal, maksud dan tujuan dibentuknya PTSP adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,



Lestari Indah Deputi Kepala BKPM, Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai



Pintu masuk PTSP Pusat

transparan, pasti, dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Dari perwakilan 22 Kementerian dan Lembaga yang ikut andil memberikan pelayanan pada PTSP salah satunya adalah Kementerian Keuangan yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai. Kedua Direktorat pada Kementerian Keuangan ini berupaya dengan penuh tanggung jawab memberikan dukungan pelayanan terbaik demi kelancaran pengurusan perizinan yang dibutuhkan para investor atau stakeholder.

Konsentrasi dari Kementerian Keuangan yang terkait dengan penanaman modal adalah fasilitasfasilitas yang berhubungan dengan penanaman modal. Dalam bidang perpajakan misalnya ada tax holiday atau tax allowance untuk penanaman modal yang masuk dari luar negeri ke Indonesia ataupun penanaman modal dalam negeri.

Diharapkan dengan adanya PTSP para investor dapat semakin mudah mengurus segala perizinan yang dibutuhkan dalam menanamkan modalnya, sekaligus menarik minat para investor lainnya supaya mau berinvestasi di Indonesia. Karena, semakin banyak investor menanamkan modalnya di Indonesia dengan sendirinya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Lalu apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta pelayanan yang diberikan Bea Cukai? Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai **Robi Toni** menjelaskan, latar belakang kerja sama antara BKPM dan Bea Cukai atau dengan Kementerian dan Lembaga lainnya, pada dasarnya adalah sama, yaitu bagaimana menarik dan meningkatkan investasi di Indonesia, melalui



Loket Pelayanan Bea Cukai di PTSP Pusat.

kemudahan akan informasi dan pelayanan perizinan investasi bagi investor. Dalam hal ini, tugas Bea Cukai adalah mendukung agar para investor dapat berinvestasi dan menjalankan usahanya dengan baik, dapat comply dengan ketentuan perundang-undangan vang berlaku, khususnya dalam bidang kepabeanan, dan dengan tidak terkendala hal-hal yang tidak perlu.

Sesuai dengan amanat pasal 2 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan PTSP bidang keuangan di BKPM bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas Bea Cukai pada PTSP Pusat BKPM utamanya ialah layanan penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas perizinan pemindahtanganan mesin dan/atau barang dan

bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal, untuk kemudian meneruskan berkas tersebut kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai. Bea Cukai juga memberikan layanan tambahan berupa layanan konsultasi kepabeanan.

Untuk itu, sejak awal tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Bea Cukai menempatkan petugasnya pada PTSP Pusat. Petugas Bea Cukai tidak hanya untuk melayani proses perizinan yang terkait dengan kepabeanan, tetapi yang penting juga adalah sebagai layanan informasi agar investor dan calon investor dapat bertanya tentang ketentuan kepabeanan di Indonesia dan fasilitas-fasilitas kepabeanan apa yang mereka dapat manfaatkan

dalam mendukung usaha yang sedang atau akan dikembangkan.

Lebih jauh Robi Toni menjelaskan, bentuk konkret kerja sama Bea Cukai dengan BKPM antara lain untuk mendukung program pemerintah merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35.000 Megawatt (MW) dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019). Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum yang sebelumnya ditangani oleh Bea Cukai, sejak diterbitkannya PMK Nomor 66/PMK.010/2015 tanggal 27 Maret 2015, dilimpahkan ke BKPM. Diharapkan dengan ditanganinya fasilitas ini secara langsung oleh BKPM maka dapat lebih terpromosikan dengan baik bersama dengan program-program



Display informasi antrian pelayanan.

promosi investasi BKPM lainnya.

Dalam kaitannya dengan fasilitas pembebasan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, dalam perjalanannya, Bea Cukai dan BKPM mengadakan evaluasi dan sepakat untuk membuat mekanisme yang lebih mendukung investor yang sedang merealisasikan proyek investasinya. Hal tersebut adalah dengan fasilitas 'percepatan jalur hijau'. Aturan umum adalah importir baru akan menerima penetapan jalur merah untuk importasi-importasi awalnya, kemudian apabila track-recordnya baik, maka untuk importasiimportasi selanjutnya akan mendapat peningkatan yaitu penetapan jalur kuning atau hijau. Namun, dengan fasilitas ini, apabila memenuhi syaratsyarat tertentu, importir baru yang merupakan investor baru dapat memperoleh percepatan atau sehingga untuk importasiimportasi awalnya pun sudah

dapat langsung memperoleh jalur hijau. "Hal ini mendukung mereka agar dapat merealisasikan proyek investasinya dengan lebih cepat," ujarnya.

Terkait fasilitas percepatan importasi jalur hijau tersebut menurut Robi Toni terlihat peningkatan jumlah investasi yang cukup baik. Tercatat sejak diluncurkan Januari 2016 yang lalu, sedikitnya terdapat 66 perusahaan yang sudah memanfaatkan fasilitas ini dengan rencana investasi sebesar Rp179 triliun. Sementara ini pun telah ada 4 perusahaan yang direkomendasikan BKPM dan sedang dalam proses penelitian di Bea Cukai.

Sedangkan mengenai customs clearance time, ia menjelaskan, untuk importasi jalur merah yang harus melalui proses pemeriksaan fisik dan dokumen, di mana waktu rata-rata yang diperlukan untuk clearance-nya dapat mencapai 5 - 6 hari, namun bagi investor yang mendapat fasilitas ini, tentu saja customs clearance-nya menjadi lebih cepat, karena terhadap

barang impornya tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan pengeluaran barang dapat dilakukan tanpa menunggu pemeriksaan dokumen. Waktu clearance-nya menjadi jauh lebih cepat bahkan kurang dari 0,5 hari.

Menurut Fajar petugas Bea Cukai yang memberikan pelayanan di PTSP BKPM Pusat. sesuai data pada periode April sampai dengan 31 Agustur 2016, paling tidak Bea Cukai telah melayani sebanyak 525 layanan yang terdiri dari 503 layanan konsultasi dan 22 layanan perizinan pemindahtanganan kepada para investor atau pengunjung yang datang ke front office Bea Cukai di PTSP Pusat.

Supaya investor dapat memperoleh fasilitas percepatan jalur hijau dari Bea Cukai, BKPM terlebih dahulu menyeleksi investor-investor vang memenuhi syarat dan baru memberikan rekomendasi kepada Bea Cukai. Lestari Indah mengatakan BKPM baru dapat memberikan rekomendasi setelah menilai investor dari kelengkapan perizinannya, laporan kewajibankewajibannya dipenuhi, serta track record perusahaan itu sendiri sejak dia diberikan izin. Berdasarkan penilaian itu, disampaikan kepada Bea Cukai, bahwa perusahaan ini baik dan benar, sesuai dengan izin yang diterbitkan supaya bisa mendapatkan rekomendasi.

"Selama ini kerja sama kita dengan Bea Cukai sudah sangat erat, karena kita kan mengeluarkan fasilitas pembebasan bea masuk, impor mesin, dan bahan baku. Jadi selama ini kita sudah dekat dengan Bea Cukai, ditambah lagi dengan inovasi-inovasi ini, karena konsepnya bapak Presiden adalah penyederhanaan dan percepatan," katanya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat ada satu tahap lagi kerja sama antara Bea Cukai dengan BKPM yang belum

■ LAPORAN UTAMA

terealisasi vaitu untuk PDKB (Perusahaan Dalam Kawasan Berikat), dan sedang dalam tahap finalisasi. "Jadi kalau perusahaan itu untuk menjadi PDKB dengan syarat harus mempunyai izin usaha. Kebetulan kalau di kami, izin usaha itu baru di-apply kalau dia sudah siap. Dalam hal ini ada perbedaan mengenai definisi untuk izin usaha antara BKPM dengan Bea Cukai. Akan tetapi hal ini sudah kita sampaikan dan sudah final bahwa kita akan mengakomodir izin usaha sesuai dengan yang disyaratkan oleh Bea Cukai untuk PDKB. Ini merupakan kerja sama lainnya untuk mempercepat status perusahaan itu menjadi Kawasan Berikat. Saya belum bertemu final dengan Dirjen Bea Cukai, sehingga baru di level Direktur. Tetapi kita sudah siap ketemu dengan Dirjen untuk finalisasi," paparnya.

Ke depannya, Lestari Indah mengharapkan terjalin kerja sama yang makin baik antara BKPM dengan Bea Cukai. "Terima kasih juga Bea Cukai sudah masuk ke dalam bagian program kita dengan Nomor Induk Kepabeanan (NIK)nya. Walaupun kita tau bahwa NIK itu sudah on line, tetapi tetap masuk di sini, hadir di TPSP untuk bisa mensukseskan program BKPM," ujarnya.

Upaya BKPM Mendorong Investasi

Sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yan kondusif. Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga promosi investasi ini tidak hanva untuk meningkatkan jumlah investasi

yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu yang dapat memperbaiki kesenjangan sosial dan mengurangi pengangguran. Lembaga ini tidak semata bertindak sebagai advokat yang

proaktif di bidang investasi, namun juga sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor.

Pertumbuhan investasi Indonesia, baik yang tergolong penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), makin



Produksi kayu lapis.



Kunjungan pabrik.

hari terlihat makin meningkat. Dari hasil Laporan Realisasi Penanaman Modal Triwulan I dan II tahun 2016, nilainya terus meningkat, sehingga BKPM optimis jika target realisasi penanaman modal tahun ini yang mencapai Rp594,8 triliun bisa tercapai. Dari realisasi tersebut, BKPM terus bekeria keras untuk mendapatkan investasi bermutu dan distribusi investasi tidak hanya terpusat pada wilayah perkotaan dan industri besar, namun juga merata hingga ke seluruh nusantara.

Salah satu upaya BKPM yang ditujukan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan pada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah dengan memberikan penyederhanaan perizinan saat investor hendak melakukan investasi. Penvederhanaan tersebut berupa layanan investasi yang bisa selesai hanya dalam waktu 3 jam atau yang dikenal dengan Izin Investasi 3 Jam (I23J). "Program ini sudah menjadi program Presiden, kemana-mana beliau pergi program ini selalu dibawa, dipromosikan, dan yang menggunakan pelayanan ini juga sudah sangat banyak hingga ratusan perusahaan," kata Lestari Indah.

Lebih jauh ia menjelaskan, program BKPM adalah program investasi. Sekarang program bapak Jokowi adalah percepatan dan penyederhanaan, prinsipnya dua itu dalam hal perizinan. Untuk yang percepatan kita diawali dengan PTSP menghadirkan 22 Kementerian/Lembaga itu sudah dari awal Januari 2015, kemudian kita tidak hanya berhenti di situ, kita harus bikin inovasi baru, terobosan dengan kita buat izin investasi 3 jam (I23J).

Pada izin investasi 3 jam investor mendapat 8 produk perizinan. Jadi mulai dari pembuatan izin investasi, pembuatan akta pendirian

perusahaan dan pengesahan akta perusahaan oleh Kemenkumham, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing), API-P (Angka Pengenal Importir Produsen), NIK (Nomor Induk Kepabeanan) yang terkait dengan Bea Cukai dan informasi ketersediaan lahan jika diperlukan.

"Ini semua kita terbitkan hanya dalam waktu tiga jam. Kenapa ini bisa selesai, karena bentuk dari PTSP, sudah ada di kantor ini semua. BKPM ada, Pajak ada, orang Kementerian Perdagangan, Kemenkumham, Kementerian Ketenagakerjaan, Bea Cukai juga ada disini. Nah dengan koordinasi kita, terobosan layanan ini dalam waktu tiga jam bisa memberikan layanan 8 produk," paparnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa layanan tiga jam ini launching pada Januari 2016 oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla. Jadi, awal Januari 2015 PTSP yang menghadirkan 22 Kementerian dan Lembaga, dan awal Januari 2016 kita launching layanan izin investasi 3 jam. Setelah izin investasi bisa selesai dalam waktu tiga jam, lalu bagaimana dengan realisasinya? Nah, realisasinya masuk kepada yang disebut sebagai Izin Investasi Langsung Konstruksi (I2LK).

Kegunaan dari Izin Investasi Langsung Konstruksi secara ekstrim boleh dikatakan bahwa setelah investor memperoleh izin yang dibutuhkan dalam waktu tiga jam, kemudian dia datang ke kawasan industri utuk membeli lahan dan besoknya sudah bisa mulai membangun pabrik. Biasanya investor harus terlebih dahulu mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), membuat AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) dan lainnya baru bisa membangun pabrik.

Tetapi dengan izin investasi langsung konstruksi, paralel dengan pembangunan, baru kemudian mengurus surat lainnya.

Kemudian setelah pabrik selesai dibangun, investor dengan sendirinya mulai mau impor barang seperti memasukkan mesin. Biasanya, kalau kebijakan dari Bea Cukai, perusahaan baru itu pasti kena jalur merah. Perusahaan baru yang belum pernah impor, begitu dia impor, pasti masuk jalur merah. Dengan adanya kerja sama BKPM dengan Bea Cukai, bisa diberikan rekomendasi kepada Bea Cukai bahwa perusahaan itu benar memenuhi kewajibannya, sudah memiliki izin yang lengkap, sehingga Bea Cukai tidak mengenakan jalur merah tetapi masuk jalur hijau.

Menurutnya peningkatan iklim investasi di Indonesia selain adanya kemudahan inovasi dalam pelayanan yang diberikan untuk menarik para investor, paling tidak ada tujuh keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain, khususnya negara tetangga yang bisa ditawarkan bagi para investor.

Pertama, Indonesia terletak di pusat konsentrasi pasar global. Indonesia terletak di Asia di mana secara demografi, setengah dari populasi dunia berada di Asia. Asia Tenggara sendiri yang merupakan bagian dari Asia memiliki populasi sekitar 618 juta jiwa dan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN adalah Indonesia yang memiliki sebesar 255 juta jiwa. Demografi Indonesia juga memiliki parameter-parameter yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia antara lain kelas ekonomi menengah Indonesia adalah sebanyak 64 juta jiwa dan tenaga kerja yang tersedia berjumlah 124 juta jiwa.

Kedua, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seperti yang telah lama kita

ALUR LAYANAN IZIN INVESTASI - 3 JAM



Investor datang ke BKPM

mengambil Nomor antrian





data dan dokumen yang dibutuhkan



Investor melakukan konsultasi dengan Direktur Pelayanan

BKPM terkait rencana investasinya sekaligus menyerahkan





Investor menunggu sementara Pendamping Investor melakukan Pengurusan Perizinan Investasi



- Layariar Cepair 3 dani 1. Investasi Minimal Rp 100 Milyar daniatau menyerap tenaga kerja minimal 1.000 orang 2. Investor dang langsung ke BKPM atau diwakili oleh salah satu investor dengan membawa surat

Persiapkan Dokumen Anda!

- Persapkan Documen value L. Identitas Investor sebagai calon Pemegang saham perusahaan KTP/Paspor dan/atau Akta Perusahaan Pemegang Saham (perusahaan Indonesia) atau Article of Association (Perusahaan Asing 2. Flowchart kegiatan usaha (alur proses produksi dari bahan baku sampai barang jadi)

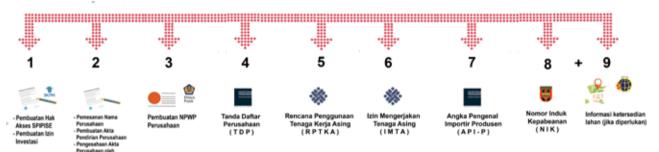


8+1 PRODUK SIAP DIBAWA

- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Nomor Induk Kepabeanan (N I K) Surat Keterangan Peta Informasi Keterangan

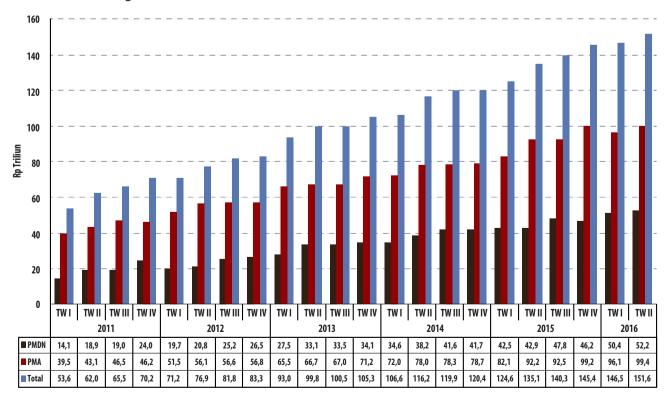


Pendamping Investor melakukan pengurusan perizinan yang akan diterima investor dari Layanan Izin Investasi 3 Jam dengan "Produk 8 + 1"



Perkembangan Realisasi Investasi: Tahun 2011-Juni 2016

Perkembangan Realisasi Investasi: Tahun 2011-Juni 2016: Per Triwulan



dengar bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan atau fosil. Beberapa potensi sumber daya alam Indonesia yang merupakan salah satu potensi terbesar di dunia antara lain minyak sawit mentah di mana Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia berdasarkan jumlah produksi yaitu sebanyak 27 juta metrik ton. Panas bumi Indonesia juga menduduki peringkat pertama dunia di mana cadangannya adalah 40% dari seluruh cadangan dunia dan masih banyak kekayaan sumber daya alam lainnya.

Ketiga, Indonesia merupakan sebuah basis produksi untuk mencapai pasar global. Indonesia saat ini menjadi basis produksi untuk beberapa perusahaanperusahaan besar di dunia. Untuk lebih menarik perusahaanperusahaan agar membangun basis produksinya, maka diperlukan stimulus-stimulus yang salah satunya berupa insentif yang ditandai dengan adanya kerjasama Government to Government (G to G) antara Indonesia dengan beberapa negara, sebagai contoh Japan-Indonesia EPA, Australia-Indonesia CEPA, dan masih banyak lagi.

Keempat, Indonesia merupakan tujuan investasi global. Berdasarkan data yang dimiliki BKPM, total investasi yang masuk ke Indonesia baik dari luar (Foreign Direct Investment) dan domestik (Domestic Direct Investment) pada kuartal pertama tahun 2016 ini mengalami peningkatan dibandingkan kuartal-kuartal tahun sebelumnya yaitu sebanyak Rp145,4 triliun dan secara year on year realisasi investasi tumbuh sebesar 17,6%. Hal tersebut juga diperkuat dengan survei yang dilakukan oleh The Economist di mana Indonesia berada di peringkat ketiga negara tujuan

investasi utama di Asia dibawah India dan China.

Kelima, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Di era digital seperti saat ini, ekonomi digital memiliki peranan yang sangat penting dan pengaruh yang besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia dengan populasi penduduk yang banyak memiliki pengguna internet aktif sebanyak 88,1 juta pengguna atau tumbuh 15% dari tahun sebelumnya dengan 79,1 juta pengguna. Transaksi penjualan secara daring atau online di Indonesia pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 40% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat.

Keenam, Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) vang stabil dan kuat. Indonesia memiliki PDB sebesar 896 miliar dollar dengan PDB per kapita sebesar 3.416 dollar di mana berdasarkan beberapa sumber seperti IMF, ADB, dan World Bank, pertumbuhan PDB Indonesia masih memiliki tingkat yang sangat berprospek dibandingkan beberapa negara-negara Asia lainnya yaitu rata-rata sebesar 5,1%.

Ketujuh, Indonesia memiliki persepsi global yang terus meningkat. Beberapa parameter kinerja ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional membuktikan bahwa Indonesia memiliki persepsi yang baik di dunia internasional sebagai negara tujuan investasi. Beberapa contoh parameter kinerja tersebut adalah Price Waterhouse Cooper (PWC) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara tujuan investasi terbaik kedua di kawasan APEC setelah Cina. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) juga menjadikan Indonesia sebagai negara paling menjanjikan kedua untuk investasi di luar negeri, dan masih banyak

parameter lainnya.

Arah strategi promosi investasi yang dilakukan BKPM ke depan diantaranya fokus dalam jangka pendek untuk meningkatkan efisiensi investasi di Indonesia. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya alam sebagai katalisator yang dapat menciptakan momentum vang diperlukan untuk melaksanakan program-program menuju pembangunan ekonomi yang lebih besar.

Penyaluran investasi ke arah kebutuhan infrastruktur keras maupun lunak. Yang dimaksud dengan infrastruktur keras meliputi jalan raya, bandara, pelabuhan dan kapasitas pembangkit listrik, sedangkan infrastruktur lunak mencakup antara lain pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Membangun landasan untuk industrialisasi. Hal ini menuntut adanya investasi di bidang pendidikan secara terus menerus untuk menciptakan angkatan kerja yang berpendidikan dan berkemampuan tinggi. Tuntutan selanjutnya adalah penghapusan ketidakpastian dalam kebijakan, termasuk pelaksanaan prakarsa PTSP dan SPIPISE atau NSWI (National Single Window for Investment) secara maksimum yang dirancang untuk menanggulangi masalah ini. Ketentuan hukum tentang insentif fiskal dan non-fiskal juga perlu diperhatikan untuk menunjang upaya industrialisasi skala besar.

Mendukung pembentukan ekonomi berbasis pengetahuan dengan mengembangkan lebih lanjut angkatan kerja berpendidikan yang dapat bersaing secara global. Pada tahap ini, BKPM akan berupaya untuk terus menguatkan perannya sebagai advokat kebijakan investasi dan penghubung antara investor dengan pemerintah, baik untuk modal asing maupun domestik.

(Piter)



PERTUMBUHAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA TERUS MENGALAMI PENINGKATAN

LESTARI INDAH, DEPUTI KEPALA BKPM, BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Dari tahun ke tahun, realisasi penanaman modal di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tentu hal ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik dari segi penerimaan negara dari sektor pajak maupun membuka lapangan pekerjaan. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor untuk berinvestasi.

ntuk mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menarik para investor dan bagaimana perkembangan investasi serta manfaatnya bagi perekonomian nasional, Majalah WBC melakukan wawancara dengan Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bidang Pelayanan Penanaman Modal Ir. Lestari Indah, MM di kantornya. Berikut petikan wawancaranya.

Bisakah Anda jelaskan tugas dan fungsi BKPM secara umum, khususnya Bidang Pelayanan Penanaman Modal?

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal, pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal, penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan penanaman modal, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu

pintu, koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dan daerah dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu, pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal serta pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Bagaimana perkembangan atau kondisi penanaman modal di Indonesa saat ini?

Kondisi atau perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 secara umum terus mengalami peningkatan dalam hal realisasi. Realisasi investasi pada tahun 2011 sebesar 251,3 triliun rupiah, tahun 2012 sebesar 313,2 triliun rupiah, tahun 2013 sebesar 398,6 triliun rupiah, tahun 2014 sebesar 463,1 triliun rupiah serta tahun 2015 sebesar 545,4 triliun rupiah.

Berapa besaran target BKPM untuk tahun ini, apakah bisa tercapai?

Target investasi tahun 2016 sebesar 594,8 triliun rupiah. Kami merasa optimis target tersebut akan tercapai karena realisasi investasi pada triwulan pertama sudah 146,5 triliun rupiah, meningkat 17,1% dari periode yang sama pada tahun 2015. Pada triwulan pertama ini juga terdapat 1.747 proyek baru yang mulai melakukan realisasi. Sedangkan realisasi investasi pada Triwulan II tahun 2016 sudah 151,6 triliun rupiah, meningkat 12,3% dari Triwulan II pada tahun 2015 yang sebesar 135,1 triliun rupiah. Sehingga total realisasi investasi sampai dengan bulan Juni 2016 sudah mencapai sebesar 298,1 triliun rupiah atau sekitar 50.1% dari target.

Apakah ada kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut?

Ada beberapa isu aktual yang sedang dalam proses pembuatan solusi pemecahannya, antara lain sedang dilakukan proses perancangan untuk penyederhanaan prosedur untuk beberapa izin seperti kemudahan memulai berusaha, pendaftaran properti, penyambungan listrik, pendirian bangunan, dan lain sebagainya. Terkait dengan perburuhan terutama dalam hal peningkatan keahlian sehingga kedepannya dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Bila dibandingkan dengan negara lain khususnya negara tetangga, apa saja keunggulan yang ditawarkan Indonesia bagi para investor?

Ada beberapa keunggulan negara kita yang bisa ditawarkan bagi para investor jika dibandingkan dengan negara tentangga, diantaranya Indonesia terletak di pusat konsentrasi pasar global, memiliki sumber daya alam yang melimpah, merupakan sebuah basis produksi untuk mencapai pasar global, merupakan tujuan investasi global, memiliki pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil dan kuat, serta memiliki persepsi global yang terus meningkat.

Apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi

sebagai investor?

Secara umum kegiatan penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007 dengan memperhatikan Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 tentang DNI. Sedangkan persyaratan khusus tergantung dari masing-masing sektor tujuan investasi.

Pada umumnya di bidang atau sektor apa saja para investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya. khususnya PMA?

Berdasarkan data tahun 2015, sektor-sektor yang memiliki realisasi investasi terbesar adalah infrastruktur, memiliki realisasi sebesar 151,4 triliun rupiah, industri padat karya, memiliki realisasi sebesar 55,5 triliun rupiah, dan sektor pariwisata dan kawasan khusus, memiliki realisasi sebesar 49 triliun rupiah.

Selain itu ada sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan realisasi investasi yang terbesar dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu maritim tumbuh sebesar 115%, industri mineral hilir tumbuh sebesar 83%, serta pariwisata dan kawasan khusus tumbuh sebesar 49%.

Apa garis besar keuntungan bagi perekonomian nasional apabila banyak investor menanamkan modalnya di Indonesia?

Pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya dapat dilihat dari semakin meningkatnya PDB negara tersebut. Di mana dalam PDB terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu konsumsi, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan investasi. Oleh sebab itu, semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia maka diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu pula

investasi dapat ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, mengubah ekonomi Indonesia dari berbasis konsumsi menjadi berbasis produksi, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, dan mendorong pemerataan ekonomi.

Apa saja upaya atau program yang dilakukan BKPM untuk menarik investor?

Program-program yang dilakukan oleh BKPM adalah dengan selalu menciptakan inovasi-inovasi di bidang perizinan investasi yang nantinya akan membuat investor lebih mudah untuk mendirikan suatu bisnis di Indonesia. Dimulai dari adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) yang didalamnya terdapat perwakilan 22 Kementerian dan lembaga sehingga investor tidak perlu mendatangi satu persatu dalam mengurus perizinan, ada pula pelimpahan 167 izin-izin dari Kementerian dan Lembaga kepada BKPM. Selain itu ada beberapa inovasi lain yang dilakukan oleh BKPM vaitu:

- 1. Izin Investasi 3 Jam (I23J),
- 2. Izin Investasi langsung Konstruksi (I2LK), dan
- 3. Penetapan Jalur Hijau dimana BKPM bekerjasama dengan Ditjen Bea Cukai.

Bisa diceritakan bagaimana latar belakang pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sejak kapan mulai berialan?

Latar belakang pembentukan PTSP agar mempermudah proses perizinan dalam mendirikan suatu usaha. Pembentukan PTSP ini termasuk dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, kepastian, dan terjangkau.



Pada Oktober 2014, sehari setelah Presiden Jokowi dilantik, beliau berkunjung ke BKPM melakukan dialog dengan pelaku usaha, dimana pelaku usaha mengeluhkan lamanya mengurus proses perizinan di Indonesia. Dari pertemuan tersebut, Presiden menugaskan BKPM untuk menyiapkan PTSP dalam waktu 3 bulan. Pada tanggal 26 Januari 2015, PTSP Pusat ini diresmikan di BKPM yang didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014.

Bidang pelayanan apa saja yang diberikan kepada investor?

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2015, serta berdasarkan pendelegasian wewenang dari 22 Kementerian/Lembaga, pelayanan yang diberikan oleh BKPM total mencapai 167 perizinan, antara

a. Pelayanan perizinan:

- Izin Prinsip;
- Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
- iii. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- iv. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha:
- Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha:
- vi. Izin Kantor Perwakilan;
- vii. Izin operasional berbagai sektor usaha.

b. Pelayanan nonperizinan:

- viii. Penggunaan Tenaga Kerja
- Angka Pengenal Importir;
- Rekomendasi teknis berbagai sektor usaha;
- Fasilitas pembebasan bea masuk impor mesin dan bahan baku;
- xii. Rekomendasi Tax Allowance:
- xiii. Rekomendasi Tax Holiday;

Rekomendasi Jalur Hijau.

Ada berapa Kementerian/ Lembaga yang aktif memberikan pelayanan pada PTSP?

- 1. Kementerian Keuangan: a. Direktorat Jenderal Pajak b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 2. Kementerian Perindustrian
- 3. Kementerian Perdagangan
- 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - a. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - b. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
 - c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
 - d. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
- 5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 6. Kementerian Perhubungan
- 7. Kementerian Komunikasi dan Informatika



- 8. Kementerian Pertanian
- 9. Kementerian Kesehatan
- 10. Kementerian Pariwisata
- 11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 12. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a. Direktorat Jenderal Imigrasi
- 13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 14. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 15. Kementerian Ketenagakerjaan
- 16. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

- Pertanahan Nasional
- 17. Kementerian Pertahanan
- 18. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 19. Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Badan Standardisasi Nasional
- 21. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- 22. Lembaga Sandi Negara

Bisa dijelaskan bagaimana kerjasama antara BKPM dengan Bea Cukai?

Saat ini kerja sama yang

kami lakukan berupa penetapan jalur hijau untuk proses *customs* clearance dalam rangka untuk mempercepat realisasi investasi sehingga investor diberikan kemudahan dalam realisasi impornya. Termasuk pertukaran data elektronik secara otomatis terkait pemberian fasilitas pembebasan bea masuk yang meliputi data persetujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan data realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapatkan pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

Sudah berapa banyak perusahaan atau nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas layanan kerja sama BKPM dengan Bea Cukai?

Total 66 perusahaan dengan nilai investasi 179 triliun rupiah. Paling banyak berlokasi di Jawa Barat yaitu 19 perusahaan. Bidang usaha paling banyak yaitu industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik sebanyak 15 perusahaan.

Apa evaluasi dan upaya yang dilakukan di PTSP untuk lebih baik?

Menambah loket konsultasi BKPM agar mempersingkat waktu tunggu investor dalam melakukan konsultasi ke BKPM. Melakukan monitoring terhadap loket-loket konsultasi agar selalu ada LO yang melayani investor pada jam yang telah ditentukan. Menyiapkan sarana/ prasarana untuk LO Kementerian/ Lembaga. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penyederhanaan SOP perizinan/nonperizinan di Kementerian/Lembaga.

(Piter)

KEWENANGAN BEA CUKAI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (2-Habis)

Oleh: Agustinus Catur Setiawan, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pangkalpinang



urat Sanggup adalah suatu surat berharga, bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar kepada pihak pemegang surat sanggup. Bisa juga dikatakan surat yang memuat kata sanggup ataupun istilah lainnya yang ditanda tangani pada tanggal dan tempat tertentu dimana seorang penanda tangan sanggup tanpa syarat membayar sejumlah uang kepada seseorang pemegang / pengganti pada tanggal dan tempat tertentu. Surat Sanggup dapat diartikan Promesse Aan Order, Surat Aksep, dan Accept ketiganya merupakan bagian dari Comercial Paper. Surat Sanggup diatur dalam Pasal 174 -**177 KUHD**

Syarat-syarat Formal Surat Sanggup:

- 1. Harus memuat istilah Surat sanggup atau bisa juga istilah lain yaitu "klausula order / promess atas pengganti" dapat pula dari bahasa asing: Promisorry Note (Bahasa Inggris) Order Biefje (Bahasa Belanda) Billet Ul Order (Bahasa Perancis)
- 2. Memuat kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- 3. Penunjukan hari bayar
- 4. Menyebutkan tempat dimana

- akan dilakukan tempat pembayaran. Surat sanggup juga harus mencantumkan tanda tangan penerbit
- 5. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain ditunjuk olehnya, pembayaran itu harus dilakukan
- 6. Tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani
- 7. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup Bilvet Giro adalah surat perintah dari nasabah suatu Bank kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilyet giro. Pengertian ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no 28/32/ KEP/ DIR tanggal 4 Juli 1995.

Syarat formal Bilyet Giro adalah:

- Nama Bilvet Giro dan nomor
- Nama tertarik, yaitu nama bank yang menerima pemindahbukuan
- Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik
- Nama dan nomor rekening pemegang, yaitu nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik (nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya) kepada tertarik

Gambar surat sanggup bayar

Promissory Note

Singapore, 31.01.2000

Amount US\$ 250,000

On 25 April 2000

we promise to pay against this Promissory Note

the sum of US Dollars Two hundred and fifty thousand

to the order of UK Export Company Ltd

for value Received

Payable at:

For and on behalf of:

UK Export Banking Company plc Sterling Street

London, UK

Import Buyer Company Singapore

Managing Director

- Nama bank penerima
- Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka dan huruf selengkaplengkapnya
- Tempat dan tanggal penarikan
- Tanda tangan dan nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan dalam rekening

Bilyet Giro mempunyai umur, maksudnya adalah dalam Bilyet Giro terdapat tenggang waktu penawaran yaitu jangka waktu yang disediakan oleh penarik kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro kepada tertarik. Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 hari sejak tanggal penarikan. Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarik. Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.

Pada saat penulis berdiskusi dengan pegawai dari AUSTRAC (semacam PPATK-nya Australia) yang ditugaskan di Indonesia mengenai Bearer Negotiable Instrument mereka menyatakan bahwa di Australia, jenis-jenisnya bukan hanya seperti yang dinyatakan dalam pasal 34 dan 35 UU nomor 8 tahun 2010 itu saja. Mereka mengilustrasikan, apabila petugas Bea Cukai Australia memeriksa penumpang dan kemudian di dalam dompetnya menemukan secarik kertas yang ada tulisan tangan "Paman Gober, minggu depan akan aku baru bisa melunasi utangku yang \$AUS 5 itu ya", maka secarik kertas tersebut termasuk kategori Bearer Negotiable Instrument. Karena meskipun hanya secarik kertas dengan tulisan tangan, tetapi dalam secarik kertas tersebut terkandung nilai uang. Selain itu penumpang yang membawa Bearer Negotiable Instrument dalam nilai berapapun tidak wajib melaporkan kepada petugas Australian **Customs and Border Protection** atau petugas kepolisian, hanya ketika diminta melaporkan saja maka penumpang tersebut harus melaporkan.

a. Kendala dalam penegakan aturan pasal 34, 35 dan 36 UU nomor 8 tahun 2010

Pada saat ini, tata laksana pengeluaran dan pemasukan uang tunai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 01/BC/2005. Beberapa aturan yang menjadi dasar hukum dari Perdirjen ini adalah:

- UU nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
- UU nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU no 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Bank Indonesia nomor 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Ke luar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia.

Dari tiga aturan diatas, hanya Peraturan Bank Indonesia yang masih berlaku. Untuk UU nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah diamandemen menjadi UU nomor 17 tahun 2006. UU nomor 25 tahun 2003 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU nomor 8 tahun 2010. Meskipun demikian, sampai saat ini Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 01/BC/2005 masih berlaku dan menjadi dasar pengawasan pembawaan uang tunai ke luar atau masuk Daerah Pabean

Hal-hal yang diatur dalam Perdirjen 01/BC/2005 mengenai:

- Kewajiban setiap orang untuk melaporkan kepada Pejabat Bea Cukai pada saat membawa uang tunai sejumlah Rp 100.000.000 atau lebih atau mata uang asing yang senilai dengan itu ke luar atau masuk daerah Pabean
- Sanksi administrasi:
 - a. apabila membawa mata uang rupiah ke luar daerah Pabean adalah sejumlah Rp 100.000.000 atau lebih tanpa dilengkapi izin Bank

Contoh gambar bilyet giro

pundi 🕛		Peserta Kliring Worket Luar Wila	
Diminta kepada Saudara rekening kami sejumlah		15 januari 2015 (sepuluh juta	memindahkan dana atas beban
	W W W	Infotentangbank blogspot.com	T. S. 20 _ T. 07 . 07 . 07 . 07 . 07 . 07 . 07 . 0
untuk untung rekening i pada Bank ABC	nomor 1234567891	atas nama komar beb	eb
		22 -11 10-	Mide
2 suniversitation band 8° 0 3	17134#558#031	a: 1500000033# 00	Taxca tarrijan latar cop perusah kan (corpan melovadi para tator col

- Indonesia, dikenai sanksi administrasi berupa sebesar 10% dari jumlah uang yang dibawa
- b. apabila membawa mata uang rupiah ke luar daerah Pabean sejumlah Rp 100.000.000 atau lebih dilengkapi izin Bank Indonesia, tetapi jumlah uang yang dibawa lebih besar daripada jumlah uang yang tertera dalam izin tersebut, dikenai sanksi administrasi berupa sebesar 10% dari selisih uang yang dibawa dengan jumlah uang yang tertera dalam izin Bank Indonesia
- c. apabila membawa mata uang rupiah masuk Daerah Pabean sejumlah Rp 100.000.000 atau lebih. dan tidak memeriksakan keaslian uang rupiah tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai, dikenai sanksi administrasi berupa sebesar 10% dari jumlah uang yang dibawa
- sanksi pidana denda bagi setiap orang yang tidak melaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai pembawaan uang tunai senilai Rp 100.000.000 atau mata uang asing yang senilai dengan itu ke luar atau masuk daerah Pabean

Dalam uraian sebelumnya telah disampaikan bahwa sesuai dengan pasal 35 UU nomor 8 tahun 2010, orang yang tidak memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pembawaan uang tunai paling sedikit senilai Rp 100.000.000 atau mata uang asing yang senilai dengan itu, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sanksi adminstratif juga dikenakan kepada setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai

dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Untuk pembawaan uang tunai, pengenaan sanksi administrasi ini mudah dilakukan vaitu tinggal mengenakan 10 % dari jumlah uang yang dibawa oleh penumpang. Demikian juga untuk instrumen pembayaran lainnya, maka pengenaan sanksinya adalah dengan meng-uang-kan instrument tersebut dan kemudian mengenakan sanksi 10% dari jumlahnya.

Sekilas penegakan aturan ini terlihat sederhana. Akan tetapi ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan yang berpotensi membuat bingung petugas DJBC. Misalnya kita ilustrasikan sebuah situasi dimana seorang penumpang yang baru datang dari luar negeri yang tidak melaporkan cek yang dibawanya dalam Custom Declaration. Pada saat diperiksa oleh petugas DJBC, kedapatan penumpang tersebut membawa cek senilai Rp. 1.000.000.000,00. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kedapatan penumpang tersebut membawa uang tunai Rp 1.000.000,00. Berdasarkan pasal 35 UU no 8 tahun 2010, maka penumpang tersebut dikenakan sanksi administrasi

10 % dari Rp. 1.000.000.000,00 vaitu Rp. 100.000.000,00. Bagaimana penumpang ini akan membayar sanksi administrasinya karena uang tunai yang dia bawa hanya Rp 1.000.000,00? Sekiranya ilustrasi tersebut terjadi di Jakarta, pembayaran sanksi administrasi sebesar Rp. 100.000.000,00 ini mudah saja dilakukan. Penumpang tinggal mencari bank dan mencairkan cek tersebut dan kemudian membayar sanksi administrasinya. Dari ilustrasi tersebut, memang terlihat sederhana saja. Akan tetapi hal tersebut menjadi tidak sederhana sekiranya terjadi di daerah yang mungkin jauh dari kota, dimana tidak ada bank untuk menguangkan cek tersebut. Bagaimana penumpang tersebut harus membayar sanksi administrasinya? Atau misalnya cek tersebut adalah jenis Cek Atas Nama atau travel cek, yang hanya bisa dicairkan oleh orang yang namanya tertera di cek tersebut, sementara cek tersebut dibawa oleh orang lain? Untuk Surat Sanggup, bagaimana sekiranya penumpang tersebut turun di kota yang berbeda dengan kota yang dinyatakan sebagai tempat dimana akan dilakukan pembayaran? Bagaimana jika penumpang tersebut turun di hari yang berbeda dengan hari bayarnya? Untuk Untuk Bilyet Giro, dengan ilustrasi yang penulis gambarkan di atas, bagaimana aturan tersebut dilaksanakan sekiranya penumpang tersebut datangnya masih seminggu dari tanggal efektif? Pada waktu penulis ikut dalam salah satu rapat pembahasan RUU ini (pada waktu itu belum menjadi Undang-Undang), pada saat membahas pasal ini dengan ilustrasi yang disampaikan oleh penulis diatas, ada beberapa usulan yang disampaikan oleh perwakilan dari DJBC:

1. Cek tersebut disita dan

- kemudian diserahkan ke PPATK. Usulan ini langsung ditanggapi oleh PPATK bahwa PPATK tidak mempunyai kewenangan menahan cek dan melakukan tindakan terhadap cek tersebut
- 2. Penumpang dipersilakan meninggalkan Kantor Bea Cukai untuk mencari Bank dan meng-uang-kan cek tersebut dan kemudian membayar sanksi administrasi. Untuk memastikan agar penumpang kembali lagi untuk menyelesaikan sanksi administrasinya, maka petugas DJBC akan menahan paspor penumpang tersebut sebagai jaminan. Usulan ini mendapat tanggapan bahwa DJBC tidak punya kewenangan untuk menahan paspor penumpang.
- 3. Cek tersebut disita kemudian cek dan penumpang yang membawa cek tersebut diserahkan kepada polisi. Usulan ini mendapat tanggapan dari PPATK bahwa dalam RUU ini, pelanggaran terhadap ketentuan pembawaan uang tunai dan Bearer Negotiable

Instrument bukanlah suatu tindak pidana, jadi terhadap penumpang dan cek yang dibawanya tidak diserahkaan ke Polri.

Penutup

Kita boleh berbangga bahwa DJBC adalah salah satu institusi yang diberi kewenangan oleh UU nomor 8 tahun 2010 untuk menyidik tindak pidana pencucian uang. Hal-hal yang baru yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 2010 menjadi tantangan baru bagi DJBC untuk mempelajari dan mendalaminya sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam menegakkan peraturan. Kita berharap bahwa Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 UU nomor 8 tahun 2010 segera terbit sehingga asas kepastian hukum terpenuhi dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. (*)



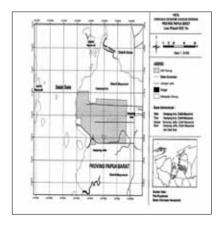
KAWASAN EKONOMI KHUSUS **SORONG SEBAGAI BATU LONCATAN** PENGEMBANGAN EKONOMI PAPUA BARAT

Oleh: Firman Sane Hanafiah, Kepala KPPBC TMP C Sorong

Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)?

Negeri kita baru saja merayakan hari ulang tahun ke 71 kemerdekaan Republik Indonesia. Hari kemerdekaan tersebut terasa istimewa khususnya bagi Propinsi Papua Barat, khususnya Sorong. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa pada bulan Agustus tersebut terbit sebuah peraturan pemerintah nomor 31 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong memiliki luas 523,7 ha (lima ratus dua puluh tiga koma tujuh hektar) yang terletak dalam wilayah Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. KEK Sorong tersebut merupakan Kawasan Ekonomi Khusus pertama yang berada di wilayah Papua.



Gambar Peta KEK Sorong

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Di dalam KEK bisa terdiri dari beberapa zona dan khusus KEK Sorong terdiri atas 3 (tiga) Zona, yaitu zona logistik, zona industri dan zona pengolahan ekspor. Zona logistik diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri. Zona industri diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk pengunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/ atau untuk dalam negeri. Zona pengolahan ekspor diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 Tahun 2011, KEK yang sudah ditetapkan, harus sudah siap beroperasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan. Dengan demikian paling lambat pada tahun 2019, KEK Sorong harus sudah

dapat beroperasi. 3 (tiga) tahun merupakan waktu yang sebentar untuk membangun sebuah wilayah KEK yang siap untuk beroperasi. Pembangunan KEK memerlukan pembebasan tanah, pelaksanaan pembangunan fisik termasuk fasilitas umum dan infrastruktur penunjang agar KEK bisa



beroperasi. Gambar Pembangunan KEK

Secara umum, terdapat dua hal utama yang harus disiapkan kabupaten Sorong untuk menyiapkan KEK, yaitu penyiapan sarana fisik dan penyiapan secara organisasi. Secara fisik, harus disiapkan penyediaan infrastruktur wilayah dan pembangunan KEK. Secara organisasi perlu disiapkan penunjukkan badan usaha pembangun dan pengelola, pembentukan kelembagaan, pelimpahan kewenangan, insentif dan kemudahan daerah dan pemantauan dan evaluasi.

Setidaknya terdapat 5 (lima)

tahapan dalam penyelenggaraan KEK, vaitu: tahap pengusulan, penetapan, pembangunan, pengelolaan dan evaluasi pengelolaan. Saat ini KEK Sorong sudah mencapai tahap penetapan dimana wilayah distrik mayamuk di kabupaten Sorong ditetapkan sebagai KEK dengan PP nomor 31 tahun 2016.



Gambar Tahap Penyelenggaraan KEK

Berbagai fasilitas dan kemudahan diberikan bagi badan usaha serta pelaku usaha di KEK. Fasilitas yang diberikan pemerintah terdiri atas fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal yang meliputi: perpajakan, kepabeanan, dan cukai; lalu lintas barang; ketenagakerjaan; keimigrasian; pertanahan; dan perizinan dan nonperizinan. Fasilitas kepabeanan dan cukai yang diberikan untuk pemasukan barang kepada pelaku usaha di KEK diantaranya diberikan penangguhan bea masuk; pembebasan cukai dan/ atau; tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Selain itu, dalam rangka pembangunan dan pengembangan KEK dan industri, badan usaha dan pelaku usaha diberikan pembebasan bea masuk atas pemasukan mesin, peralatan dan bahan untuk periode waktu tertentu. Fasilitas non fiskal terdiri atas: dukungan pemerintah daerah berupa pengurangan pajak dan retribusi daerah dan komitmen untuk pengoperasian administrator KEK; kemudahan ketenagakerjaan; kemudahan dan keringanan

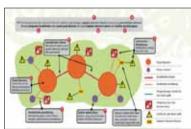
imigrasi bagi orang asing pelaku bisnis; kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah dan pembebasan lahan dan; kemudahan perizinan.



Gambar Fasilitas Fiskal

Masterplan P3EI

Sesuai dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011- 2015, dibentuk berbagai koridor ekonomi untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan koridor ekonomi Indonesia adalah pengembangan kegiatan ekonomi utama di pusatpusat pertumbuhan ekonomi disertai penguatan konektivitas antar pusat-pusat ekonomi dan lokasi kegiatan ekonomi utama serta fasilitas pendukungnya. Fasilitas pendukung sangat dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan koridor ekonomi maupun KEK seperti pelabuhan laut, bandar udara, listrik, air dan serat optik.



Gambar Ilustrasi Koridor Ekonomi

Dalam rangka Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi dibutuhkan penciptaan kawasankawasan ekonomi baru, diluar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang telah ada. Pemerintah dapat memberikan perlakuan khusus untuk mendukung pembangunan pusat-pusat tersebut, khususnya yang berlokasi di luar Jawa, terutama kepada dunia usaha yang bersedia membiayai pembangunan sarana pendukung dan infrastruktur. Tujuan pemberian perlakuan khusus tersebut adalah agar dunia usaha memiliki perspektif jangka panjang dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Perlakuan khusus tersebut berupa fasilitas fiskal dan non fiskal.

Propinsi Papua Barat, khususnya Sorong berada di koridor ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Di dalam koridor ekonomi 6 (enam) tersebut, Sofifi, Ambon, Sorong, Manokwari, Wamena, Jaypura dan Meraoke merupakan pusat-pusat ekonomi. Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional merupakan tema utama dari pembangunan koridor ekonomi tersebut.



Gambar Koridor Ekonomi

Tantangan dan Peluang Pengembangan KEK di Sorong.

Penetapan Sorong oleh pemerintah sebagai KEK merupakan sebuah peluang yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah Papua Barat untuk menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi Papua Barat. Dengan munculnya KEK, maka akan meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan menumbuhkan sektor ekonomi masyarakat

lainnya.

Propinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Sorong memiliki berbagai keunggulan. Apabila kita melihat kepada letak geografis propinsi Papua dan Papua Barat, berbatasan dengan Australia, Papua Nugini, Filipina dan berbagai negara pasifik lainnya. Dari kedekatan geografis, Papua bisa menjadi pintu keluar masuk logistik barang-barang dari wilayah Australia, Amerika Serikat, Jepang, Filipina dan berbagai negara pasifik lainnya. Bahkan wilayah papua merupakan daerah terdekat dari pasifik dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Akan menjadi keuntungan yang sangat strategis bila di Kabupaten Sorong dibangun dan dikembangkan KEK.



Gambar Letak Geografis Papua

Propinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Sorong memiliki keunggulan dari hasil alam berupa perikanan, perkebunan kelapa sawit, dan perminyakan. Tercatat dari data bahwa terdapat perminyakan di daerah Salawati dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong. Wilayah laut yang luas juga menjadi sumber penangkapan ikan yang cukup besar, dan bila dikembangkan lebih lanjut bisa didirikan industri perikanan.



Gambar Areal Perkebunan Kelapa Sawit

Hasil survey yang dilakukan oleh organisasi PUSAKA, awas MIFEE, Sawit Watch, Jerat Papua, JASOIL, perkumpulan Belantara Papua, perkumpulan Bin Madag Hom, SKP Keuskupan Meraoke dan dipublikasikan oleh PUSAKA, terdapat kurang lebih 133.647 ha (seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh hektar) yang sudah beroperasi dan masih ada lagi 244.235 ha (dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima hektar) yang masih dalam proses. Sesuai data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, saat ini dari 4 pabrik CPO sudah menghasilkan 360 ton FFB/Jam (tiga ratus enam puluh ton tandan buah segar per jam). Hasil survey tersebut menunjukkan besarnya potensi yang cukup besar kedepannya untuk berkembangnya industri CPO di Sorong.



Gambar Sebaran Industri CPO Indonesia

Berdasarkan analisa pembangunan daerah Papua Barat yang diterbitkan pada Desember tahun 2014, diketahui bahwa subsektor pertanian untuk komoditas perkebunan, kehutanan (LQ=5,85) dan perikanan (LQ=2,61), sektor pertambangan

Minyak dan Gas Bumi (LQ=2,34) serta sub sektor industri migas (LQ=23,64) merupakan sektorsektor I (dapat diperdagangkan antardaerah), dengan nilai satu (LQ>1). Hal ini menunjukkan Papua Barat memiliki proportional share lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut.

Cadangan minyak bumi Indonesia tersebar dibeberapa wilayah dan terbesar berada di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan beberapa pulau lainnya. Berdasarkan hasil survey Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di pulau Papau, khususnya di daerah Papua Barat, masih tersedia cadangan minyak bumi sebesar 99 juta barrel.



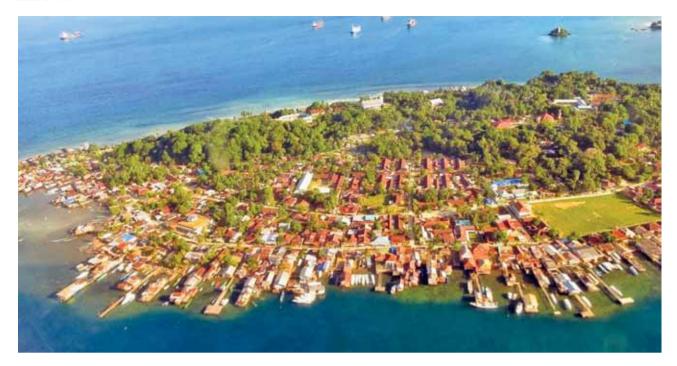
Gambar Sebaran Cadangan Minyak Bumi

Cadangan gas bumi untuk wilayah Papua, khususnya Papua Barat, terkonsentrasi diwilayah Babo - Bintuni dengan cadangan sebanyak 23 TSCF (dua puluh tiga tera cubic feet)



Gambar Sebaran Cadangan Gas Bumi

Kapasitas listrik terpasang untuk wilayah Sorong sebagaimana dikutip dari laman web kabupaten Sorong, saat ini hanva tersedia sebesar 40 MW (empat puluh mega



watt) dengan kebutuhan sebesar 38 MW (tiga puluh delapan mega watt).

Berbagai potensi wilayah tersebut di atas, tentu membutuhkan dukungan logistik yang terintegrasi dan terkoneksi dengan kawasan ekonomi lainnya. Dukungan logistik tersebut tentunya berasal dari barangbarang dalam negeri maupun luar negeri. Selama ini logistik kebutuhan Papua disuplai dari wilayah Sulawesi ataupun Jawa yang berdampak kepada biaya logistik yang meningkat. Logistik dari wilayah Sulawesi maupun Jawa beberapa diantaranya sebenarnya berasal dari barang impor yang sudah diselesaikan formalitasnya.

Kebutuhan tersebut sebenarnya dapat diefisienkan dengan menempatkan pusat logistik di wilayah Papua, sehingga segala kebutuhan bisa disuplai dari pusat logistik tanpa harus mendatangkan logistik dari Sulawesi maupun Jawa.

Penutup

Potensi ekonomi yang besar di Sorong perlu dimaksimalkan. Melihat potensi yang ada, maka industri yang bisa berkembang di KEK Sorong dapat berupa industri hilir minyak bumi dan gas bumi, industri CPO, industri primer kehutanan, industri perikanan dan pusat logistik.

Kawasan Ekonomi Khusus Sorong sudah di depan mata dan dapat menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi di Propinsi Papua Barat secara umum dan khusnya Sorong. Saat ini tahap pendirian KEK Sorong sudah mencapai tahap ke-2 yaitu penetapan dari lima tahapan. Tahapan ke-3 merupakan tahap pembangunan yang merupakan tahap yang sangat penting berlangsung atau tidaknya KEK Sorong.

Waktu 3 (tiga) tahun merupakan waktu yang sangat singkat untuk mewujudkan KEK Sorong. Memerlukan perencanaan yang matang untuk merealisasikan KEK tersebut. Yang utama adalah penyiapan secara fisik berupa fasilitas umum dan infrastruktur berupa listrik, air, jalan dll. Penyiapan fisik berupa fasilitas umum dan infrastruktur dapat dilakukan pada tahun pertama dan kedua. Pembangunan KEK dapat dilakukan mulai tahun ke-2 ketika fasilitas umum dan infrastruktur sudah mulai tersedia. Secara

organisasi, penunjukkan badan usaha pembangun dan pengelola perlu segera dilakukan, mengingat badan ini menjadi motor penggerak dari KEK. Namun demikian, semua kesiapan tersebut di atas tidak akan bermanfaat ketika pengusaha tidak ada yang datang untuk berusaha di KEK, oleh karenanya peran pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan mempromosikan KEK Sorong menjadi kunci keberhasilan.

Budaya masyarakat Papua dan Papua Barat bisa menjadi tantangan tersendiri untuk masuknya investasi. Tentunya perlu dukungan pemerintah daerah agar budaya tidak menjadi hambatan dalam tumbuhnya investasi. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk kesuksesan KEK Sorong, karena pada akhirnya yang akan menerima manfaat dari hadirnya KEK Sorong adalah masyarakat Sorong. Oleh karenanya mari kita bersama dukung dan kita sambut hadirnya KEK Sorong.

Peluang sudah didepan mata, tinggal bagaimana kita menyikapi peluang yang ada tersebut. Mari kita bersama membangun wilayah timur Indonesia dengan mengembangkan KEK Sorong. (*)

Bea Cukai Pangkal Pinang

Hadir untuk Melayani Industri di Pulau Bangka



Bea Cukai Pangkal Pinang. Berusaha untuk selalu memposisikan diri sebagai mitra kerja bagi masyarakat usaha di Pulau Bangka.

emiliki daerah yang masyhur dengan hasil bumi yang tidak ditemukan di daerah lain, menjadikan Pulau Bangka, yang masuk dalam provinsi Bangka Belitung (Babel) sangat terkenal di Indonesia. Ditambah dengan panorama alam yang sangat mempesona, Pulau Bangka ternyata sangat kaya akan kandungan timah dan hasil bumi lainnva.

Sebagai provinsi yang memiliki

kandungan timah terbesar di Indonesia, bisa dikatakan hampir seluruh keperluan timah dunia di pasok dari Pulau Bangka, tentunya dengan kualitas yang sangat baik, sehingga komoditas ini menjadi salah satu andalan Indonesia untuk pemasukan negara. Selain timah, Pulau Bangka juga memiliki komoditas unggulan lainnya, yaitu ikan, lada, dan Crude Palm Oil (CPO) yang keseluruhanya menjadi andalan untuk diekspor ke luar negeri, karena kualitasnya mampu bersaing di pasar internasional.

Agar kegiatan industri tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar, tentunya perlu dukungan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang tepat dan cepat. Salah satu instansi pemerintah yang selalu siap memberikan pelayanan dan pengawasan untuk sektor industri di Pulau Bangka adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tepatnya dijalani oleh Kantor Bea Cukai Pangkal Pinang.

Di Pulau Bangka sendiri sebelumnya terdapat empat kantor pelayanan Bea Cukai untuk

melayani sekaligus mengawasi kegiatan industri tersebut, keempat kantor itu adalah, Kantor Inspeksi Tipe C Pangkalbalam, Kantor Inspeksi Tipe D Muntok, Kantor Inspeksi Tipe D Toboali, dan Kantor Inspeksi Tipe D Belinvu.

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Pangkal Pinang, Nasrul Fatah, luas Pulau Bangka yang mencapai 11.524 km ini tentunya memerlukan pengawasan dan pelayanan yang efektif mengingat jarak antara objek pengawasan yang satu dengan yang lainnya cukup jauh, sehingga wilayah ini dulu diawasi oleh empat kantor agar dapat lebih fokus pada objek pengawasan dan pelayanan.

"Sejak tahun 1972 keempat kantor ini dilebur menjadi satu, penggabungan ini ditujukan agar pelayanan dan pengawasan menjadi efisien dan terfokus di Pangkal Pinang, sedangkan untuk tiga kantor lainnya menjadi pos

Untuk lebih mengembangkan industri timah, kami ingin ada PLB di Pulau Bangka.

Nasrul Fatah

Kepala Kantor Bea Cukai Pangkal Pinang

bantu ketika kegiatan ada di wilayah tersebut. Jadi sebenarnya dengan mulai berkurangnya kegiatan di beberapa wilayah maka pelayanan dan pengawasan disatukan, sedangkan pelayanan dan pengawasan tetap dilakukan baik saat ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan," ungkap Nasrul.

Lebih lanjut dijelaskan pria yang untuk kedua kalinya penempatan di Pangkal Pinang ini, kegiatan ekspor impor mendominasi pelayanan di Bea Cukai Pangkal Pinang. Sebagai penghasil lada, karet, CPO, ikan laut, dan timah, Pulau Bangka menjadi andalan pemerintah untuk penerimaan negara baik dari sektor tambang maupun dari sektor pertanian.

Memang dari kegiatan yang dilakukan tiap harinya, kegiatan kepabeanan yang dilakukan pengguna jasa di Pangkal Pinang masih bersifat rutinitas. Artinya, pengguna jasa dan komoditasnya tidak banyak berubah, oleh karena itu wajar jika tingkat kepatuhan pengguna jasa di Pangkal Pinang sangat baik dan patuh akan aturan yang ada.

"Untuk wilayah pengawasan di Bea Cukai Pangkal Pinang adalah seluruh daerah/ kabupaten yang ada di Pulau Bangka. Pada pengawasan impor kami melakukan pengawasan terhadap penimbunan barang yang ada di luar kawasan pabean, sedangkan untuk kegiatan ekspor kami



Industri Timah. Menjadi salah satu andalan untuk pemasukan negara.

melakukan pengawasan terhadap pemuatan barang di luar kawasan pabean, seperti pengawasan ekspor ikan. Pada pengawasan cukai kami melakukan pengawasan akan peredaran barang kena cukai, operasi pasar pita cukai, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari penjual Barang Kena Cukai (BKC)," ujar Nasrul.

Sebagai kantor yang mengawasi sekaligus melayani satu pulau penuh, tentunya banyak rintangan dan tantangan yang dialami oleh Bea Cukai Pangkal Pinang, salah satunya adalah jarak antara pengawasan yang satu dengan yang lainnya ternyata sangat jauh. Sebagai contoh, untuk melakukan pengawasan dan pelayanan di Muntok harus ditempuh dengan jarak 126 km atau 3 jam perjalanan. Sama halnya jika akan melakukan pengawasan di daerah Belinyu yang berjarak sekitar 90 km yang harus ditempuh dengan jarak 2 jam perjalanan.

Kondisi ini harus dilakukan tiap saat jika ada kegiatan pelayanan atau pengawasan yang harus dijalani, seperti pelayanan dan pengawasan ekspor timah di Muntok atau impor aspal di pelabuhan Belinyu, keseluruhannya harus ditangai dengan cepat, tepat, dan sigap.

"Luasnya wilayah pengawasan tentu saja harus didukung sumber daya manusia (SDM) dan sarana yang ideal. Hingga kini, permasalahan SDM masih menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal. Karena saat ini, pegawai Bea Cukai Pangkal Pinang hanya berjumlah 40 orang. Adapun untuk menunjang pengawasan, khusus patroli laut hanya didukung satu unit kapal patroli," ungkapnya.

Namun demikian, kendala itu tidak menjadikan pengawasan dan pelayanan tidak berjalan optimal, dengan memanfaatkan sarana dan

prasarana yang ada, kegiatan yang dilakukan Bea Cukai Pangkal Pinang dapat dijalani dengan baik tanpa menjadi penghambat bagi pelayanan dan pengawasan di Pulau Bangka.

Oleh karena itu, tidak heran kalau para pengguna jasa di Pulau Bangka ini sangat tertib dan patuh pada peraturan. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari kedekatan yang dilakukan Bea Cukai Pangkal Pinang, baik dengan stakeholder maupun dengan instansi terkait lainnya. Tentunya hal itu terjadi dengan Bea Cukai Pangkal Pinang memposisikan diri sebagai mitra dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan mengedepankan motto objektif sehingga segala kegiatan yang dilakukan selalu sesuai dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Kami selalu menjaga hubungan baik dengan stakeholder, salah satunya melalui kegiatan customs goes to customer. Dengan instansi lain hubungan baik juga terpelihara, di antaranya melalui peran aktif kami di setiap kegiatan yang memerlukan koordinasi bersama, seperti komunitas intelijen daerah (Kominda), tim pengawasan orang asing (Timpora), Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, maupun pemerintah daerah setempat," tuturnva.

Masih menurut Nasrul, untuk masyarakat Bangka pada khususnya, Bea Cukai Pangkal Pinang berupaya melindungi masyarakat dari barang atau produk ilegal/ selundupan yang masuk atau keluar di wilayah Bangka dan sekitarnya. Untuk itulah mereka mencoba menerapkan motto yang dibuatnya sebagai acuan dalam menjankan tugas. Adapun motto Bea Cukai Pangkal Pinang adalah "AOKLAH" atau dalam bahasa Bangka berarti "iya". AOKLAH sendiri dijabarkan menjadi Amanah, Objektif,

Kompeten, Lugas, Akuntabel, dan Handal.

Mengapa Bea Cukai Pangkal Pinang bertekad untuk melindungi masyarakatnya dari produk ilegal, hal ini tidak lain karena sudah menjadi tugas utama Bea Cukai, juga melihat kondisi masyarakat di Pulau Bangka yang relatif aman. jarang terjadi gejolak, merupakan peluang bagi investor baik dari luar negeri maupun domestik untuk melirik bangka dan menjadikannya sebagai basis industri.

Bahkan dari sisi transportasi, posisi Pulau Bangka sangat strategis yaitu dekat dengan Pulau Jawa sebagai pusat bisnis saat ini. Satu hal yang lebih menonjol lagi, di Bangka terdapat potensi pariwisata pantai yang sangat mendukung untuk lebih dikembangkan lagi sehingga tidak kalah bersaing dengan wilayah Indonesia lainnya.

Berbicara industri di Bangka ini tentunya tidak terlepas dari kegiatan penambangan timah yang banyak di dapati di pulau ini, bahkan kegiatan penambangan yang dilakukan secara tradisional maupun modern masih sering dilakukan, mengingat penghasilan utama pulau ini adalah tambang timah, yang memiliki kualitas terbaik di dunia.

Namun demikian, pertambangan timah yang dilakukan secara besar-besaran ini terkadang tidak mengindahkan kondisi disekitarnya, makanya tidak heran kalau wisata pantai Bangka yang sangat indah di beberapa tempat terlihat tidak bagus atau rusak akibat penambangan timah yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Terkait dengan penambangan timah, menurut Marketing PT Timah, untuk penambangan, PT Timah selalu mengedepankan analisis dampak lingkungan (amdal), karena penambangan timah sendiri dilakukan di dua lokasi, yaitu laut dan darat. Untuk



Pengawasan. Selain pelayanan yang maksimal, pengawasan terhadap barang impor pun dilakukan dengan optimal.

di laut hanya PT Timah yang memiliki kapal keruk, sedangkan untuk kapal hisap beberapa perusahaan swata juga ada yang memilikinya. Sedangkan untuk di darat penambangan dilakukan dengan cara penyemprotan air ke tanah, dan kembali lagi PT Timah sangat memperhatikan baik dampak maupun kelangsungan alam disekitar penambangan.

Masih menurut Marketing PT Timah, perusahannya sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh Bea Cukai Pangkal Pinang, dengan prosedur yang sangat profesional dan pelayanan yang prima menjadikan kegiatan ekspor timah menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Kondisi yang sama juga disampaikan pengguna jasa lain, yaitu importir aspal. Menurutnya pelayanan dan pengawasan saat ini jauh lebih baik, sehingga kegiatan yang dilakukan pun menjadi semakin lancar.

Ada satu keinginan yang

semoga bisa diwujudkan, yaitu terbentuknya sebuah Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan ini. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Pangkal Pinang, "Satu hal yang menjadi keinginan kami di Pangkal Pinang adalah terbentuknya PLB untuk komoditas timah. Ini sangat penting agar ekspor timah yang dilakukan oleh PT Timah tidak disimpan dulu di Singapura, cukup disimpan disini, sehingga efisiensi dapat dilakukan dan yang utama lagi di dunia akan mengenal kalau Timah itu berasal dari Bangka Indonesia, bukan Singapura," harapnya.

Inovasi lain yang kini juga tengah dijalankan oleh Bea Cukai Pangkal Pinang adalah melakukan implementasi aplikasi Bea Cukai dan Pos atau SIBOS. Langkan ini dilakukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan layanan kepada pengguna jasa, khususnya penerima barang kiriman melalui PT Pos. "Kedepan ini kami

juga akan berupaya memenuhi tuntutan perkembangan dunia perdagangan melalui penerapan layanan berbasis teknologi informasi," tandasnya.

Menjadi yang terbaik untuk pelayanan dan pengawasan tentunya menjadi harapan bagi seluruh kantor pelayanan dan pengawasan Bea Cukai, demikian halnya dengan Bea Cukai Pangkal Pinang, dengan keterbatasan sarana, prasarana, dan SDM, tetap mampu menunjukan performa pelayanan yang maksimal dan pengawasan yang optimal. Tidak hanya itu, berupaya menciptakan inovasi untuk menunjang segala kegiatan kepabeanan dan cukai juga menjadi prioritas pemikiran seluruh pegawainya agar masyarakat pengguna jasa semakin terlayani dan merasakan kalau Bea Cukai Pangkal Pinang adalah mitra kerja mereka di Pulau Bangka.

(Supriyadi)



PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG HIBAH KEPERLUAN AMAL SOSIAL

Pertanyaan:

Kami dari perwakilan Yayasan Healthy Eyes Indonesia, sebuah lembaga amal dunia yang telah melakukan lebih dari 1500 operasi glukoma gratis di Indonesia berencana ingin membawa peralatan untuk keperluan operasi tersebut berupa Non Contact Tonometer sebanyak 3 unit dari kantor pusat Yayasan Healthy Eyes Global di New York, Amerika Serikat. Peralatan tersebut sedianya akan digunakan untuk membantu program pelayanan operasi gratis dan membantu kegiatan pekerja sosial yang tersebar di seluruh Indonesia. Apakah terhadap pemasukan peralatan tersebut ke Indonesia dapat diberikan bantuan pembebasan Bea Masuk?

dr. Hendra Wijaya, Jakarta Selatan.

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara dr. Hendra Wijaya, Kami dari Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pertanyaan yang Saudara ajukan sebagai berikut:

Impor barang untuk keperluan amal/sosial dapat dibebaskan dari bea masuk (BM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.04/2012 sebagai berikut:

Atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.

Alat Non Contact Tanometer sebanyak 3 unit tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang dapat diberikan pembebasan BM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 PMK tersebut Pasal 3

Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Peralatan operasi atau perkakas pengobatan yang digunakan untuk badan-badan sosial Terkait dengan mekanisme pembebasan BM atas barang tersebut harus dipenuhi beberapa syarat dan ketentuan antara lain:
 - a. Bukti dokumen/surat izin operasional Yayasan Organisasi / Perkumpulan Sosial dari instansi teknis terkait sebagai bukti legalitas badan hukum yang bersifat non profit
 - b. Permohonan pengajuan pembebasan BM /Cukai yang dilampiri dengan: rincian julah dan jenis barang, surat keterangan donasi/hibah dari pengirim serta rekomendasi dari instansi teknis terkait
 - c. Rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang menetapkan peraturan larangan dan pembatasan impor. Dalam hal peralatan non contact tanometer tersebut, izin diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan.

Salam.

Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi

GALERI FOTO







Kabupaten Karimun

abupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km², dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km². Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa. Kabupaten Karimun Berbatasan dengan Kepulauan Meranti di sebelah Barat, Pelalawan dan Indragiri Hilir di Selatan, Selat Malaka di sebelah utara, dan Kota Batam di sebelah Timur.

FOTOGRAFER:

DIGGAR IMAM SASMITA, PANGKALAN SARANA OPERASI TANJUNG BALAI KARIMUN





DJBC dan IAPI Jalin Kerja Sama Pelatihan

asih banyaknya perusahaan yang belum memahami segala peraturan kepabeanan dan cukai saat ini, berdampak pada banyaknya perusahaan yang dikenakan denda saat diaudit karena adanya beberapa temuan.

Bahkan dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai misalnya aturan pengenaan denda pada perbedaan nilai pabean, perusahaan yang kedapatan temuan akan dikenakan denda hingga 1000 persen, sehingga tidak menutup kemungkinan akan membuat kolaps perusahaan tersebut. Menyikapi kondisi tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) beserta Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) memberikan pelatihan kepada para akuntan publik yang bertujuan agar para akuntan publik dapat lebih memahami peraturan yang ada di DJBC, dapat memberikan masukkan kepada perusahaan yang diauditnya agar taat kepada ketentuan kepabeanan dan cukai supaya tidak terdapat temuan yang berakibat dikenakannya denda.

Menurut Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai, Muhammad Sigit saat membuka acara Pelatihan Professional Berkelanjutan Untuk Para Akuntan Publik di Hotel Alila, Pecenongan, Jakarta Pusat, kegiatan ini sangat strategis dan sangat penting untuk menambah pengetahun para akuntan akan peraturan kepabeanan dan cukai khususnya di bidang audit, sehingga mereka dapat menilai apakah perusahaan yang diauditnya patuh atau tidak. Pelatihan ini juga merupakan salah satu media sosialisasi DJBC



Direktur Audit Muhammad Sigit memberikan sambutan.

kepada pihak eksternal. "Saat ini audit kita menunjukan kalau banyak perusahaan yang masih kurang baik, temuantemuannya masih banyak dan berulang-ulang yang kesemuanya lebih dikarenakan kurangnya internal kontrol. Oleh karena itu ketika akuntan publik melakukan pengujian internal kontrol suatu entitas tidak hanya berfokus pada laporan keuangan saja, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan Kepabeanan dan Cukai." ujarnya. Sementara itu menurut Ketua IAPI, Tarko Sunaryo, kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2016 ini penting mengingat audit yang dilakukan oleh DJBC berbeda dengan yang selama ini dilakukan oleh akuntan publik. Akuntan publik lebih fokus terhadap laporan keuangan sehingga hasilnya dibuat dalam bentuk opini apakah laporan keuangannya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau belum.

"Dalam prakteknya akuntan publik bekerja di ring 2 sedangkan ring 1 adalah manajemen perusahaan, dan Negara ada di ring 3, dengan adanya pengetahuan yang lebih baik

dari akuntan publik khususnya di bidang kepabeanan dan cukai, diharapkan perusahaan akan lebih patuh dan pemerintah mendapatkan keuntungan dari proses pengawasan yang semakin efisien," katanya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Handoko Tomo selaku Ketua Komite Asistensi dan Implementasi Standar Profesi (KAISP) IAPI, dengan perbedaan

cara mengaudit akan menciptakan hasil yang berbeda, oleh karena itu dengan adanya pelatihan ini maka akuntan publik akan semakin tahu mana saja hal-hal yang diperlukan oleh DJBC dan mana saja yang dapat menjadi masukkan bagi perusahaan agar tidak dikenakan temuan oleh DJBC. Pelatihan yang dihadiri 105

akuntan publik dan diadakan untuk pertama kalinya ini, mendapat sambutan yang antusias dari seluruh akuntan publik yang ada khususnya di Jakarta dan, umumnya mereka berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan sehingga masing-masing pihak dapat memberikan masukkan khususnya pada poin-poin penting yang memerlukan pemahaman lebih mendalam. (*)



Suasana CET Training.

Customs Enforcement Team Training

iklat Penindakan Kepabeanan dan Cukai atau biasa disebut Diklat Customs Enforcement Team (CET) di Ciampea, Jawa Barat yang ditutup pada 25 September 2016 merupakan rangkaian pelatihan yang menantang dan menguji ketahanan fisik, mental, emosi, serta mengasah ketrampilan dan kesigapan petugas Bea Cukai sebagai salah satu aparat penegak hukum. Dipercaya sebagai pelatih untuk diklat ini adalah Kopassus TNI.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kanwil DJBC Jakarta, Oentarto Wibowo, dalam amanat upacara bahwa tugas dan tantangan Bea Cukai kedepan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan pegawai yang memiliki kapasitas dan dedikasi tinggi terutama pegawai di bidang penindakan dan penyidikan.

"Tantangan dalam pengawasan yang dipikul Bea Cukai semakin meningkat, tidak hanya dari segi jumlah tetapi modus, jalur, dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut akan semakin kompleks karena kita memiliki wilayah pengawasan darat, laut, dan udara yang sangat mungkin digunakan sebagai jalur pelanggaranpelanggaran tersebut."

Seiring dengan bergabungnya Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun ini, Kementerian Keuangan menilai peran Bea Cukai akan semakin besar guna mengawasi perdagangan ilegal baik di perkotaan maupun daerah perbatasan kepulauan. Oleh karena itu pengawasan harus diperkuat dari segala segi.

"Kendati demikian di satu sisi target penerimaan yang menjadi tanggung jawab DJBC juga semakin meningkat. Sehingga, harus disadari tugas dari pegawai bea dan cukai sangat beragam namun tetap harus berjalan beriringan, selaras dan seimbang."

Diklat CET ini dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama Diklat Taktis Spesialis Subtantif (DTSS) Penindakan Kepabeanan dan Cukai yang merupakan diklat regular untuk pegawai yang benarbenar terjun di lapangan sebagai penegak hukum kepabeanan dan cukai. Peserta diberikan pembekalan, tes baik teori dan praktek selama lebih kurang 1 bulan. Tahun ini diikuti oleh 30 peserta dari seluruh Indonesia.

Kemudian ada juga Lokakarya Penindakan Kepabeanan yang

diikuti oleh kepala seksi dan kepala kantor unit Eselon IV ikut selama lebih kurang 1 minggu. Maksud diadakan adalah diberikan pembekalan untuk memimpin unit enforcement di tempat masing-masing. Peserta dari Lokakarya Penindakan Kepabeanan ada 25 orang.

Berikutnya ada juga peserta kehormatan, yaitu para pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Walaupun hanya mengikuti kegiatan selama 1 hari saat penutupan tetapi kehadiran 13 orang peserta kehormatan diharapkan dapat memotivasi peserta bahwa mereka peduli dengan anak buahnya.

Peserta Terbaik

Selain penyematan Brevet Penindakan juga diberikan penghargaan kepada pesertapeserta terbaik diklat regular yang dinilai oleh pelatih selama masa training. Kategorinya sendiri adalah Tes Kebugaran terbaik yang diterima oleh M. Ferdinand Khadafi. Lalu yang menjadi pemenang TR4 adalah Febri Budi Hartanto, dan penembak terbaik diterima oleh Yohanes Paulus S., dan Sugeng Margono.

(Desi Prawita)

Turnamen Internal Bola Voli DJBC CUP ke 6







/Semangat dalam olah raga juga harus diterapkan pada kinerja sehari-hari."

Begitu pesan yang disampaikan Ketua Badan Pembina Olahraga dan Seni (BAPORS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Marisi Zainudin Sitohang, pada pembukaan Turnamen Bola Voli DJBC CUP ke 6 yang diselenggarakan tanggal 1-3 September 2016 lalu di Yogyakarta.

Turnamen yang diadakan oleh Customs Volley Club (CVC) tahun ini mengusung tema Sportivitas dan Kerja Nyata untuk DJBC Makin Baik. Turnamen yang diadakan setiap tahunnya ini sudah berlangsung 6 kali dan semakin tahun pesertanya semakin bertambah. Tahun ini turnamen diikuti oleh 29 tim peserta dari 16 Kanwil Bea dan Cukai seluruh Indonesia.

"Diharapkan kedepannya makin banyak tim yang berpartisipasi dan tetap harus selalu junjung sportivitas"

Sebagaimana diterangkan oleh Kepala Kanwil BC Jawa Tengah dan DIY, Untung Basuki, yang juga sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen tahun ini mengatakan untuk tahun ini ada beberapa peserta yang baru mengkuti pertama kali seperti tim dari Kanwil BC Kalimantan Bagian Barat ada juga beberapa Kanwil yang mengirim putra dan putri masing-masing dua tim.

Bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup diminati di kalangan pegawai Bea Cukai. Terlihat bagaimana keseruan baik pemain maupun supporter saat berjalannya pertandingan. Teriakan-teriakan dan yel-yel dilakukan untuk menambah semangat permainan.

Pertandingan yang berlangsung tiga hari akhirnya dimenangkan oleh perwakilan dari Jakarta untuk putra dan untuk putrinya dimenangkan oleh tim dari Kanwil BC Kepulauan Riau. (*)

Miliki Mesin Produksi Rokok Ilegal, Sebuah Pabrik di Pasuruan Digrebek Bea Cukai



i tengah upaya Bea Cukai mengumpulkan penerimaan negara dengan tetap memastikan bahwa setiap proses bisnis dijalani sesuai ketentuan hukum yang berlaku, masih kerap dijumpai oknum yang berusaha menghindari pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai. Hasil survei cukai rokok ilegal yang dilaksanakan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (PSEKP UGM) periode 2012 menyebutkan bahwa dari segi jenis, pelanggaran cukai rokok terbesar ditemukan pada jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan 2 (selain produksi pabrik).

Berangkat dari kesadaran tersebut, Bea Cukai Pasuruan berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalitas pegawai, juga meningkatkan pengawasan di bidang cukai. Terbukti dengan keberhasilan Bea Cukai Pasuruan dalam menggerebek pabrik rokok ilegal.

Pada Maret 2016, berdasarkan informasi dari masyarakat, petugas memeriksa dan menindak bangunan yang diduga difungsikan sebagai pabrik rokok tanpa izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pabrik yang disamarkan pada bangunan gudang ini dimiliki oleh oknum berinisial S. Modus operandinya adalah dengan menjalankan kegiatan pabrik

barang kena cukai (BKC) tanpa izin sejak awal tahun 2016. Kegiatan produksi dilakukan pada malam hari secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

Saat dilakukan penindakan. petugas mendapati beberapa orang sedang melakukan produksi BKC jenis SKM menggunakan mesin pembuat rokok berkapasitas produksi 1.000 s.d. 1.500 batang rokok per menitnya. Mesin tersebut bermerek Korber Decoufle Max III M.R. No. 7080 tahun 1986. Dengan dijadikannya mesin ini sebagai barang bukti, diharapkan Bea Cukai dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat bekerja sama untuk turut aktif mengawasi mesin-mesin yang tidak teregistrasi. Selain mesin, dalam penindakan tersebut juga diperoleh barang bukti berupa 197.600 batang rokok SKM berbagai merek dan 19 karung tembakau iris dengan berat total 337 kg.

Tak berselang lama dari penindakan pertama, pada Juli 2016 Bea Cukai Pasuruan kembali berhasil melakukan penindakan terhadap pengusaha rokok nakal. Modus operandi yang dilakukan oknum berinisial MFR adalah dengan menempelkan pita cukai bekas pada kemasan rokok. Tersangka menyembunyikan rokok tersebut dengan cara ditutupi karpet hitam pada mobil pribadinya

dan tidak dapat menunjukan dokumen yang menyatakan bahwa rokok yang diangkutnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Petugas pun akhirnya membawa MFR beserta barang bukti 13.600 bungkus rokok ke Kantor Bea Cukai Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas pelanggaran tersebut, negara mengalami potensi kerugian mencapai Rp142.902.000. Pelanggaran ini juga berdampak pada kerugian di bidang sosial dan ekonomi, dimana akan timbul persaingan usaha yang tidak sehat dengan pengusaha yang taat pada ketentuan perundang-undangan cukai. Pelaku pelanggaran yaitu MFR akan dijerat pasal 54 dan/ atau pasal 56 Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Cukai dengan hukuman maksimal 5 tahun. Sementara S akan dijerat pasal 50 undang-undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda minimal 2 hingga 10 kali lipat nilai cukai.

Sebagai tindak lanjut penanganan kasus, Bea Cukai Pasuruan telah menyerahkan berkas penyidikan Kejaksanaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dua kasus di atas menambah panjang daftar kasus penindakan hasil tembakau yang berhasil diungkap oleh Bea Cukai. Sepanjang periode tahun 2013 hingga 2015, Bea Cukai berhasil menindak 2.768 kasus, dengan jumlah barang bukti 303.716.059 batang rokok, dan nilai barang hasil penindakan sebesar Rp261.267.000.000. Sementara selama periode Januari s.d. Agustus 2016, Bea Cukai telah berhasil menindak 1.282 kasus, dengan iumlah barang bukti 154.422.056 batang, dan nilai barang sebesar Rp114.783.000.000. (*)

Kerja Sama Kemenkeu c.q, Bea Cukai, Kepolisian, dan KKP dalam Penggagalan Penyelundupan Produk Perikanan dan Bahan Pembuat Bom

alam rangka melindungi sumber daya alam di sektor perikanan dari rusaknya ekosistem laut khususnya terumbu karang yang semakin meningkat, melindungi nelayan dan industri perikanan dalam negeri dari membanjirnya produk perikanan ilegal, mencegah punahnya sumber daya ikan akibat ekspor bibit perikanan secara ilegal, dan mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dari penyalahgunaan bahan peledak secara ilegal, Kementerian Keuangan c.q. Bea Cukai, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dalam menggagalkan kasus-kasus penyelundupan sebagai berikut:

- 1. Kementerian Keuangan c.q Bea Cukai bekerja sama dengan Kepolisian RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil melakukan penggagalan 3 kasus penyelundupan atas 166.475 kg Amonium Nitrat dengan kisaran nilai barang Rp 24,97 miliar, dengan kronologi:
 - Penegahan KM Harapan Kita yang mengangkut 51.250 kg Amonium Nitrat dari Pasir Gudang, Malaysia dengan tujuan Sulawesi pada tanggal 16 April 2016 di perairan 30 mil timur laut Pulau Berakit Indonesia. Telah diamankan 6 orang tersangka yang bertindak sebagai nakhoda dan anak buah kapal (ABK) berinisial H, ZA, K, HU, M, dan R.
 - Penegahan KM Ridho Ilahi yang mengangkut 57.725 kg Amonium Nitrat dari Sadeli, Malaysia tujuan Kupang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 Juli 2016 di perairan 30 mil timur laut Pulau Berakit Indonesia.

- Telah diamankan satu orang tersangka yang bertindak sebagai nakhoda berinisial S.
- Penegahan KM. Hikmah Jaya yang mengangkut 57.500 kg Amonium Nitrat dari Pasir Gudang, Malaysia tujuan Pulau Raja, Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2016 di perairan Pengibu. Telah diamankan 5 orang tersangka yang bertindak sebagai nakhoda dan ABK berinisial AA, H, AR, MY, dan A. Terhadap para tersangka telah diamankan di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau

Kasus tersebut di atas ditindaklanjuti dengan melakukan pengembangan penyidikan ke pemilik muatan dan kapal, dan menetapkan YS, seorang perantara pembelian Amonium Nitrat ke penyalur di Malaysia, sebagai tersangka dan saat ini ditahan di Mabes POLRI. Para tersangka dijerat dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, Undang-**Undang Darurat Nomor 12** Tahun 1951, Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004.

Kementerian Keuangan c.q. Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan c.g. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), dan Kepolisian RI berhasil menggagalkan penyelundupan 10 kontainer Frozen Pacific Mackarel dari Jepang dan 1 kontainer Frozen Squid dari Cina, dengan kronologi sebagai

- Bea Cukai Tanjung Priok memperoleh informasi dari BKIPM Kelas I Jakarta II, bahwa akan ada importasi oleh PT. DRP dan PT. NAS yang tidak dilengkapi dengan perizinan larangan pembatasan (lartas) yang digunakan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- Dari informasi tersebut, Bea Cukai melakukan penegahan terhadap barang-barang tersebut pada tanggal 27 Juli 2016 dan sebagai tindak lanjut kasus, berkas perkara telah dilimpahkan penanganannya ke BKIPM dan barang bukti telah diamankan bekerja sama dengan Kepolisian RI serta akan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
- Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kasus ini senilai Rp3.057.501.440.
- Selanjutnya sebagian BMN tersebut akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat dalam bentuk hibah dari Kementerian Keuangan kepada masyarakat melalui Kementerian Sosial.
- 3. Kementerian Keuangan c.q. Bea Cukai, Kepolisian RI, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ekspor 71.250 ekor Baby Lobster di Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 08 September 2016 dengan kronologi:
 - Bea Cukai Soekarno Hatta memperoleh informasi dari Polres Bandara Soekarno Hatta yang kemudian dilakukan analisis



- penumpang dan pengecekan fisik bagasi salah satu penumpang.
- Sebagai tindak lanjut kasus, berkas perkara dan satu orang tersangka berinisial H sedang ditangani oleh Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta.
- Potensi kerugian negara vang berhasil diselamatkan dari kasus ini senilai Rp2.850.000.000.
- Selanjutnya barang bukti sebanyak 71.250 Baby Lobster dilepasliarkan ke habitat aslinya berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Atas kedua kasus penyelundupan produk perikanan ilegal tersebut, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nomor 16 Tahun 1992, Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004.

Penindakan terhadap Amonium Nitrat merupakan kegiatan yang berkelanjutan dari penindakanpenindakan sebelumnya, di mana Kementerian Keuangan c.q. Bea Cukai dan Kepolisian RI telah bekerjasama melakukan penindakan dari tahun 2009 s.d. 2016 sebanyak 498.475 kg dengan estimasi nilai barang Rp 74,77 miliar, di Perairan Pulau Mapor, Perairan Laut Cina, Perairan Tokong Malang Biru Kepulauan Riau, Perairan Pulau Marapas, Perairan Pulau Pejantan Kab. Bintan, dan Perairan Pulau Berakit.

Modus pelanggaran dilakukan dengan menggunakan rute

pelayaran yang tidak normal dengan melakukan pembongkaran di pulau-pulau kecil di Indonesia dan melakukan overship dengan kapal tujuan Flores dan Sulawesi (Indonesia Bagian Timur) untuk menghindari aparat hukum.

Pemasukan Amonium Nitrat secara ilegal memiliki dua potensi risiko, dimana potensi pertama adalah penggunaan Amonium Nitrat untuk keperluan penangkapan ikan yang dapat berpotensi merusak terumbu karang. Kondisi terumbu karang di Indonesia secara umum adalah 5% berstatus sangat baik, 27,01 % dalam kondisi baik, 37,97% dalam kondisi buruk, dan 30,02% dalam kondisi sangat buruk. Dari tiga wilayah Indonesia, kondisi terumbu karang paling buruk dan semakin menurun adalah di wilayah Indonesia Timur. Dalam 1 kg Amonium Nitrat bisa menghasilkan 20 botol bom ikan (ukuran botol Sprite). Apabila disimulasikan, jumlah penindakan sebanyak 498.475 kg dapat menghasilkan 9.969.500 botol bom ikan. Jika 1 botol bom ikan diestimasikan sekitar 5,3 m², maka luas perairan yang dapat diselamatkan dari hasil penindakan ini mencapai 5283,84 hektar. Potensi risiko kedua adalah penyalahgunaan Amonium Nitrat sebagai bahan peledak untuk tindak pidana terorisme. Sehingga penindakan terhadap Amonium Nitrat secara masif diharapkan dapat melindungi sumber daya alam dari rusaknya ekosistem laut khususnya terumbu karang dan mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dari penyalahgunaan bahan-bahan peledak secara ilegal.

Penindakan terhadap produk perikanan telah dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian Keuangan c.q. Bea Cukai dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimulai dari tahun 2014 s.d. saat ini. Data penindakan produk perikanan menunjukan peningkatan yang cukup signifikan, dimana jumlah penindakan di tahun 2012 sebanyak 15 kasus, tahun 2013 sebanyak 17 kasus, tahun 2014 sebanyak 18 kasus. tahun 2015 sebanyak 52 kasus dan tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus sebanyak 47 kasus. Khusus untuk penindakan terhadap Baby Lobster periode 2015 - 2016 nilainya diperkirakan mencapai Rp17.214.500.000,-.

Pemanfaatan BMN hasil penindakan di bidang kepabeanan selama ini beberapa telah dihibahkan untuk kepentingan sosial seperti hasil penindakan beras sebanyak 6.725 kg dan gula sebanyak 6.700 kg di Kepulauan Riau dihibahkan ke yayasan yatim piatu dan sosial, hasil penindakan daging di Tanjung Priok sebanyak 21.847,22 kg dihibahkan ke fakir miskin melalui Kementerian Sosial, hasil penindakan bawang sebanyak 50.000 kg di Aceh dihibahkan ke fakir miskin melalui TNI-AL. Ke depan diharapkan skema hibah BMN hasil penindakan dapat dilakukan secara sistematik, merata, dan berkeadilan serta terkendali yang secara struktural berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial.

Sinergitas antar instansi yang sudah dilaksanakan menunjukkan hasil yang konkrit dan positif. Dalam rangka lebih meningkatkan koordinasi antar instansi, ke depan direncanakan akan disusun nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pertukaran informasi dan penegakkan hukum bersama. Selain itu, akan disusun nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Sosial terkait pemanfaatan BMN hasil penindakan untuk kepentingan sosial. (*)



SEMAKIN JELI MEMBIDIK PRESTASI

HERY SUSTANTO





erkenalan Herv Sustanto dengan dunia menembak tidak terlepas dari peran seorang teman yang telah lebih dulu menyukai olahraga menembak. Temannya ini menawarinya untuk ikut berlatih, tepatnya pada tahun 2003, di lapangan tembak Wings Paskhas TNI-AU, Halim Perdanakusuma. Masih lekat dalam ingatannya, ia dilatih oleh Letkol. Tek. Sunu Eko Prasetyo yang saat itu masih berpangkat Kapten. Saat ini pelatihnya justru melatih dan membina Customs Shooting Club (CSC), komunitas menembak di lingkungan Bea Cukai.

"Pertama kali latihan di lapangan tembak Wings Paskhas TNI-AU, saya ditawari bergabung dengan club menembak TNI-AU (Djingga Adward Shooting Club). Lalu tahun 2004 lapangan tembak Bea Cukai diresmikan Direktur Jenderal Edy Abdurrachman, sampai terbentuklah klub menembak Bea Cukai yaitu CSC, dan saya pun ikut bergabung," ujar Hery yang saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau, menceritakan awal dirinya menekuni hobi menembak.

Kurang lebih selama 13 tahun menggeluti dunia menembak, Hery telah mengoleksi berbagai penghargaan dari beragam turnamen yang diikutinya, baik secara tim maupun perseorangan. Saking banyaknya perlombaan, ia tak lagi dapat menyebutkan jumlah perlombaan yang ia ikuti sejak tahun 2003 secara pasti. Beberapa prestasi yang pernah didapatkannya antara lain:

- 1. Juara II Lomba Menembak HUT Paspampres 2005, Paspampres, Jakarta.
- 2. Juara I Lomba Menembak HUT PUSPOM-AD 2007, PUSPOM-AD, Jakarta.
- 3. Juara II Lomba Menembak

- HUT TNI-AU 2009, Lanud Iswahyudi, Madiun.
- 4. Juara III Lomba Menembak HUT TNI-AU 2010, Lanud Iswahyudi, Madiun.
- 5. Juara I Lomba Menembak Merah-Putih Cup II 2011, Paspampres, Jakarta.
- 6. Juara I Lomba Menembak HUT Kopassus 2012, Cijantung, Jakarta.
- 7. Juara III Lomba Menembak HUT Kodam Java 2013, Senayan, Jakarta.
- 8. Juara III Lomba Menembak Eagle Precision 2015, Kodiklat TNI, Serpong.
- 9. Juara I Menembak Rapid Fire dan Juara II Reaksi Piala Dirjen Bea Cukai Cup 2016

Tentunya, bisa mengikuti turnamen menembak telah memberikan kesan tersendiri bagi Hery. "Yang paling berkesan waktu pertama sekali menjuarai turnamen menembak di Paspampres tahun 2005, waktu itu saya diutus pembina menembak CSC, Oentarto Wibowo untuk ikut bersama 3 orang teman mewakili CSC," ujarnya bangga.

"Pada perlombaan tersebut, seluruh peserta berasal dari kalangan TNI/Polri dan sipil. Kelas perlombaan yang saya ikuti waktu itu adalah Presisi Semi Rapid jarak 25m dan 20m. Terdapat 10 butir amunisi dalam 2 magazen dengan waktu 3 menit," lanjut Hery yang dari awal latihan, sangat ingin ikut lomba untuk mencari pengalaman.

Namun, ketika mengikuti lomba untuk pertama kalinya tersebut ia sempat mengalami insiden kecil yang sempat mengganggu konsentrasinya. Saat latihan sebelum pelaksanaan menembak, senjata yang ia gunakan rusak. Akhirnya senjatanya pun harus diganti dengan senjata lain yang sama sekali belum pernah ia gunakan. Selesai perlombaan, penghitungan

nilai penembakan langsung dilaksanakan. Hery waktu itu mendapat nilai 89 dari 10 butir amunisi. Singkat cerita sebelum pulang di sore harinya, ia melihat-lihat nilai perolehan para penembak dan namanya berada di urutan kedua, akhirnya ia putuskan untuk menunggu sampai selesai pertandingan yang hasil nilainya tidak bergeser dari urutan nomor 2 hingga akhirnya ia ditetapkan menjadi juara 2.

"Saat pengumuman dipanggil satu per satu juaranya, juara 1 dari Kostrad, juara 2 saya, dan juara 3 dari TNI-AU, semua yang juara diberi tepuk tangan, kecuali saya yang mewakili customs. Akhirnya pada saat pembagian hadiah saya sempat ditanya oleh yang memberikan piala, "Mas, sampeyan dari customs, memangnya *customs* itu apa sih mas? Setelah saya jelaskan bahwa customs itu adalah Bea Cukai. sontak hadirin baru mengerti dan memberikan tepuk tangan ke saya," kenang Hery, yang di dalam susunan kepengurusan BAPORS Bea Cukai terlibat di bidang menembak, dan di CSC dengan menjadi anggota.

Sebagai anggota CSC, obsesinya ialah ingin membawa klub tersebut ke level tertinggi klub menembak di Indonesia, yaitu tergabung dalam Perbakin (Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia). Ia juga berkeinginan membawa nama CSC berlomba di level internasional. Untuk hal itu, CSC telah menyediakan seorang pelatih dalam rangka meningkatkan mutu dan keterampilan menembak. Para anggota CSC pun hingga saat ini kian rajin berlatih dan mengasah kemampuan dengan pelatih dan para senior, baik di CSC maupun Perbakin.

Disamping hal itu, upaya yang dilakukan Hery secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan dan prestasinya menembak ialah



paling utama dengan menjaga kesehatan dan kebugaran. Ia juga semaksimal mungkin melakukan refreshing dengan latihan. "Alhamdulillah, selama di Kanwil Bea Cukai Khusus Kepri kondisi fisik saya dapat terjaga dengan kegiatan pembinaan jasmani. Setiap hari Selasa dan Jumat kami lari pagi, lalu ditambah dengan latihan fisik di gym," lengkapnya.

Tak berhenti di sana, ia pun menyebutkan bahwa telah dijalin kerja sama dengan lembaga lain untuk mendukung kegiatan menembak. Hery dan beberapa temannya intens berkomunikasi dengan teman-teman di Perbakin, karena sejak tahun 2013 ia tergabung dan menjadi anggota Tembak Reaksi Indonesia di

Perbakin. "Waktu itu saya ujian dengan Pak Agus Yulianto di lapangan Tembak Senayan. Ujiannya 2 hari meliputi tes psikologi, pengetahuan umum, dan praktik," imbuhnya.

Mengenai Keberadaan CSC di lingkungan Bea Cukai, tentunya akan bermanfaat terutama bagi pegawai yang bertugas di bidangbidang tertentu, misalnya untuk mendukung pelaksanaan tugas aparat di lapangan yang berkaitan dengan masalah pengawasan. Oleh karena itu, perlu kiranya menjaring bibit-bibit baru yang bukan hanya menyukai olahraga menembak, tetapi juga berpotensi untuk menjadi atlet-atlet yang berprestasi. Salah satu upaya CSC untuk menjaring atlet-atlet baru ini adalah dengan mengadakan

lomba menembak internal Bea Cukai, meskipun hingga saat ini dikarenakan kesibukan para pimpinan, sudah hampir 3 tahun CSC belum mengadakan lomba menembak lagi.

"Insya Allah dalam rangka memperingati Hari Oeang RI 2016 dan Hari Pabean 2017 kita akan aktifkan kembali lomba menembak. Sebenarnya saat ini teman-teman di daerah sudah banyak dan intens mengikuti latihan dan kejuaraan menembak di wilayah kerja masingmasing. Walaupun saat ini lomba menembak lebih sering dilaksanakan di wilayah Pulau Jawa," tutur Hery, yang berharap untuk kedepannya lebih banyak lagi pegawai Bea Cukai yang menggemari olahraga menembak. Ia mengakui juga ingin mengajak seluruh jajaran Bea Cukai, dari pelaksana hingga para pimpinan tertinggi, untuk lebih berperan aktif untuk mengenal senjata api, khususnya senjata api yang digunakan oleh Bea Cukai.

Menurut Hery, Bea Cukai adalah salah satu unit kerja yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan kewenangan untuk menggunakan senjata api. Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) saat ini masih dalam proses membuat rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan senjata api dinas Bea Cukai. Diharapkan seluruh pegawai dalam bertugas, ketika diberikan kewenangan untuk memegang senjata api, mempunyai pegangan aturan bagaimana seharusnya menggunakan senjata api dinas Bea Cukai sehingga tidak melakukan kekeliruan.

Falsafah dan Manfaat yang Dirasakan

Menurutnya, di samping untuk kebugaran tubuh, manfaat lain yang bisa dipetik dengan menekuni olahraga menembak diakuinya banyak sekali. Antara lain melatih konsentrasi, ketepatan, dan kecepatan karena menembak membutuhkan konsentrasi dalam mencari sasaran tembakan untuk mencapai hasil maksimal. Ketepatan sasaran dalam menembak harus dimengerti benar. Kecepatan dibutuhkan dalam mengatur waktu yang telah ditentukan dalam setiap melakukan penembakan. Tak lupa, menembak juga melatih mental dan keberanian.

Seorang penembak yang berhubungan dengan senjata api, maka falsafah utama yang harus dipegangnya adalah harus selalu memperlakukan seniata dalam keadaan terisi. kemudian memastikan senjata

aman dalam pegangan, ia pun harus mengerti bahwa sasaran yang akan ditembak adalah sasaran yang tepat. Seorang penembak harus memiliki kontrol diri yang kuat, mengontrol diri dari setiap keadaan yang dapat mengganggu, tekanan, dan guncangan emosional, sehingga dapat menguasai diri dari rasa takut dan ragu-ragu. Seorang penembak harus memiliki motivasi yang besar yang ditanamkan di dalam diri untuk berprestasi dan mengharumkan institusi, bangsa, dan negara. Seorang penembak harus mempunyai percaya diri yang tinggi, percaya atas kemampuan diri sendiri, bertanding dengan penuh percaya diri sehingga tidak pernah punya perasaan kalah sebelum bertanding.

"Karena itu untuk menjadi seorang atlet yang berprestasi, maka yang mesti dilakukan adalah disiplin terhadap diri sendiri, dengan latihan yang maksimal dan terus belajar mengasah keterampilan dengan pelatih, serta selalu berusaha mencapai target yang ditetapkan pelatih dalam setiap latihan," ungkap pria yang bermotokan hidup you could be anything would you dream of, still focus and never give up.

"Kita semua bisa menjadi apapun seperti apa yang kita impikan, untuk mencapainya kita harus fokus dan jangan pernah menyerah. Seperti yang saya terapkan pada waktu itu saya bermimpi ingin punya body sixpack lalu action dengan menggunakan senjata di lapangan tembak, dengan berlatih gym selama 3 tahun saya berhasil mewujudkannya," demikian penjabaran mengenai moto hidupnya.

Setelah meraih Juara III Lomba Menembak Eagle Precision 2015, Kodiklat TNI, Serpong yang lalu, Hery berkesampatan meraih juara lagi sebagai pemenang

pada Dirjen Bea Cukai Cup yang berlangsung dua hari pada 17-18 September 2016. Hery meraih juara I untuk kategori menembak Rapid Fire (63 detik) dan juara II kategori Reaksi. Atas raihan prestasi tersebut ia sangat bersyukur dan berharap supaya iuara kali ini lebih menambah semangatnya untuk mencintai olahraga menembak.

"Alhamdulillah, raihan juara ini menambah semangat saya agar terus lebih baik lagi serta dapat membawa nama Bea Cukai di kejuaraan-kejuaraan lomba menembak nasional (di Perbakin). Besar harapan saya, kemenangan ini dapat memacu semangat teman-teman Bea Cukai di seluruh Indonesia untuk dapat lebih senang dengan olahraga menembak yang berguna juga dalam menjalankan pelaksanaan tugas," ujar Hery yang melangkah semakin mantap menapaki kariernya sebagai PNS Bea Cukai dan sebagai atlet menembak. Dia tak ragu memilih cabang menembak sebagai olahraga pilihannya dan menjadikannya sebagai sarana untuk mengukir prestasi menembaknya.

Hery merupakan lulusan Prodip I Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai Angkatan II lulus tahun 1996. Penempatan awal sementara di Kanwil I Bea Cukai DI Aceh, Sumut, dan Sumbar, Kemudian mutasi ke Direktorat Cukai dan ke Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta I. Tahun 1999, Hery dimutasi ke Puslatasi dan tahun 2003 ia dimutasi ke Sekretariat Bea Cukai. Tahun 2011 dimutasi ke Bea Cukai Jakarta sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai, selanjutnya tahun 2013 mutasi ke Bea Cukai Bogor sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai dan pada tahun ini sebagai Kasi Informasi Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau.

(Ariessuryantini)

Lubang Pada Gigi Depan

Drg. IG.A. Heni H

etiap orang pasti ingin mempunyai senyum yang indah dengan deretan gigi yang putih bersih. Hal ini merupakan aset yang cukup berharga. Namun apa jadinya bila gigi depan anda rusak, berlubang, patah, atau jarang?

Lubang kehitaman yang menganga atau hanya berbayang kehitaman di bagian gigi depan tentu saja kurang sedap dipandang mata, begitu juga gigi depan yang patah atau jarang. Gigi tersebut tidak serta merta harus segera dicabut. Bila masih memungkinkan, sebaiknya dilakukan penambalan gigi.

Proses penambalan gigi adalah proses menutupi lubang pada gigi kita dengan bahan tertentu agar tidak ada makanan yang masuk ke dalam gigi tersebut yang nantinya dapat menyebabkan gigi kita sakit. Penambalan gigi depan sama prosesnya dengan proses penambalan gigi belakang, namun dalam proses penambalan gigi depan, aspek estika harus lebih diperhatikan.

Alternatif perawatan untuk memperbaiki gigi depan bervariasi, bergantung pada kondisi jaringan mahkota gigi yang masih bersisa. Prinsipnya, perawatan harus dilakukan seminimal mungkin (minimally invasive), artinya, harus seminimal mungkin mengambil jaringan gigi yang masih sehat.

Kerusakan gigi yang termasuk ringan atau sedang dengan pulpa gigi yang masih vital, masih dapat diperbaiki dengan bahan tambal sewarna gigi yaitu resin komposit. Perkembangan bahan tambal gigi sangat baik, hingga



menghasilkan tambalan yang sulit dibedakan dengan gigi asli. Resin komposit memiliki pilihan warna yang berbeda-beda hingga dapat disesuaikan dengan gigi pasien agar tampak menyerupai gigi asli. Perawatan ini membutuhkan penyinaran untuk mengeraskan bahan tersebut. Tidak perlu berputus asa bila mendapati gigi depan anda terlanjur rusak. Segeralah mencari pertolongan profesional atau dokter gigi.

Pada kasus celah antar gigi depan, pasien perlu mendapatkan perawatan orthodontik terlebih dahulu untuk mendekatkan semua celah gigi menjadi bentuk lengkung gigi yang normal serta rapi. Dalam beberapa kasus, ada perawatan orthodontik ditambah dengan bedah ringan pada otot frenulum yang membuat gigi depan menjadi renggang.

Apabila jaringan mahkota

gigi rusak berat dan mahkota gigi yang rusak tersebut hanya tersisa sedikit, maka dapat dibuatkan mahkota gigi yang berbentuk crown. Artinya, gigi asli dibentuk sedemikian rupa kemudian dibungkus dengan suatu bahan porselen yang warna dan bentuknya menyerupai gigi asli pasien.

Untuk kasus gigi rusak yang hanya menyisakan akar gigi dan sedikit sekali mahkota gigi, gigi tersebut masih dapat dipertahankan dengan terlebih dahulu dilakukan perawatan saluran akar lalu dalam saluran akar tersebut ditambahkan sebuah pasak dari logam, kemudian dipasang mahkota giginya. Gigi rusak yang hanya menyisakan bagian akar dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka sebaiknya dicabut dan dibuatkan gigi palsu pengganti. (*)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

atar belakang pembentukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini adalah untuk mengakomodir praktik perdagangan yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional, dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pemberitahuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor, dan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi importir atas kesalahan pemberitahuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi akibat ketidakjujuran yang ditemukan dalam penelitian ulang atau dalam pelaksanaan audit kepabeanan yang mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda.

Tujuan penyusunan PMK tentang Voluntary Declaration adalah untuk menghimpun potensi penerimaan Negara dari BM dan PDRI secara Optimal dengan mekanisme Deklarasi inisiatif dan Pembayaran Inisiatif, memberikan solusi bagi penyelesaian kewajiban pabean untuk biaya atau harga yang belum dapat dihitung pada saat pemasukan barang, dan mengakuratkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda.

Hal-hal yang diatur dalam



PMK tersebut, yaitu:

1. Deklarasi inisiatif dan Pembayaran Inisiatif digunakan untuk harga yang seharusnya dibayar dan/atau nilai-nilai yang belum dapat diketahui pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor yaitu harga yang seharusnya dibayar dengan menggunakan mekanisme harga dibursa berjangka (harga *futures*),

royalty dan proceeds;

- 2. Pengenaan Deklarasi inisiatif dan Pembayaran Inisiatif;
- 3. Kewajiban penggunaan Deklarasi inisiatif dan Pembayaran Inisiatif; dan
- 4. Penyelesaian pembuktian melalui audit kepabeanan.

Untuk detail lengkap peraturan dapat diunduh melalui Direktorat Peraturan pada website resmi Bea Cukai. (*)



yang dibangun oleh Raja Sumbawa yang berkuasa hingga 1931. Bahkan replika istana ini bisa dilihat di Taman Mini Indonesia Indah, mewakili anjungan Provinsi NTB. Istana yang konstruksi bangunan dan seluruh dindingnya terbuat dari kayu jati ini, terletak di pusat Kota Sumbawa Besar dan pernah difungsikan sebagai museum.

erdiri kokoh di tengah Kota Sumbawa Besar, NTB, Istana Dalam loka merupakan saksi sejarah yang memperlihatkan kejayaan Kesultanan Sumbawa pada zamannya. Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III yang menjadi Sultan ke-16 dari Dinasti Dewa Dalam Bawa memprakarsai

pembangunan istana ini pada tahun 1885.

Rumah Istana Sumbawa atau Dalam Loka dibangun untuk menggantikan bangunanbangunan istana yang telah dibangun di tanah tersebut sebelumnya namun telah lapuk dimakan usia bahkan hangus terbakar karena gudang bubuk mesiu kerajaan yang meledak.



Istana-istana itu di antaranya Istana Bala Balong, Istana Bala Sawo, dan Istana Gunung Setia. Dalam Loka sendiri berasal dari dua kata yakni dalam yang berarti istana atau rumah-rumah di dalam istana dan loka yang berarti dunia atau tempat. Jadi, Dalam Loka bermakna istana tempat tinggal raja.

Dibangun dengan sistem baji, bangunan ini memiliki tingkat kelenturan yang tinggi apabila terjadi gempa bumi. Pemilihan arah selatan sebagai arah hadap bangunan pun memiliki makna tersendiri. Berdasarkan hukum arah mata angin, selatan dipercaya dapat memberikan suasana sejuk, tenteram, damai, dan nyaman. Tidak hanya itu, selatan pun bermakna menatap masa lalu yang bila diartikan pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dan kearifan dalam menyikapi masa lalu yang pelajarannya bisa dibawa ke masa kini dan diterapkan ke masa depan.

Awalnya, Istana Dalam Loka berfungsi sebagai kediaman raja. Fungsi itu berubah sejak dibangunnya istana baru pada tahun 1932, Kini, Dalam Loka berfungsi menjadi cagar budaya

yang mengingatkan jika dahulu pernah berdiri Kesultanan Sumbawa yang pernah berjaya pada zamannya

Berbentuk rumah panggung, Istana Dalam Loka terlihat sangat megah. Istana yang dibangun dengan bahan kayu ini memiliki filosofi "adat berenti ko syara, syara barenti ko kitabullah", vang berarti semua aturan adat istiadat maupun nilai-nilai dalam sendi kehidupan tau Samawa (masyarakat Sumbawa) harus bersemangatkan pada syariat Islam. Karena itu lambang keislaman juga dapat dilihat pada kayu penyangga yang berjumlah 99 yang bila diartikan mempunyai kesamaan dengan jumlah namanama Allah (Asmaul Husna). Istana Dalam Loka atau Istana Tua ini terdiri dari dua bangunan kembar yang ditopang 99 tiang tadi.

Masih di kompleks istana, di sebelah barat dahulu ada lapangan besar (Lenang Lunyuk) yang didalamnya berdiri Masjid Makam dan kini berganti nama menjadi Masjid Nurul Huda. Ketiga tempat ini, Istana Dalam Loka, Lenang Lunyuk, dan Masjid Makam, di masa lalu ketika

Kabupaten Sumbawa masih berbentuk kerajaan, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, karena antara satu dengan lainnya memiliki fungsi yang saling terkait.

Pertama kali memasuki istana, kami langsung disuguhkan hiburan mengagumkan oleh seorang pemain alat musik sederhana dari pelepah daun yang ditiup dan mengeluarkan suara-suara yang lumayan merdu mendayu-dayu, ia menyanyikan lagu tradisional masyarakat Sumbawa. Usai menyaksikan konser kecil tadi, kami menaiki undakan-undakan tangga yang menjadi satu-satunya jalan masuk ke dalam istana. Tangga ini ternyata memiliki makna yang menyimbolkan bahwa siapapun harus menghormati raja. Hal ini tercermin dari keharusan membungkuk bagi pengunjung yang melewati tangga ini. Bangunannya yang tinggi dan kokoh bisa menggambarkan karisma seorang raja beserta perangkat istana yang ada di dalamnya.

Dalam Loka memiliki luas 696,98 m² dengan dua bangunan kembar yang ditopang oleh 98 tiang kayu jati dan 1 buah tiang pendek (tiang guru) yang terbuat dari pohon cabe. Di dalam komplek Dalam Loka terdapat dua bangunan kembar yang diberi nama Bala Rea atau graha besar. Bangunan ini tersusun dari beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing:

Di bagian depan bangunan bernama Lunyuk Agung berfungsi sebagai tempat musyawarah, resepsi, atau acara pertemuan lainnya. Di sebelah Lunyuk Agung terdapat ruangan bernama Lunyuk Mas, fungsinya sebagai ruangan khusus untuk permaisuri, istri-istri menteri, dan staf penting kerjaan ketika dilangsungkan upacara adat.

Ada juga yang disebut Ruang Dalam di sebelah barat, ruangan





ini hanya disekat oleh kelambu, fungsinya adalah sebagai tempat salat. Di sebelah utara merupakan kamar tidur permaisuri dan dayang-dayang.

Di ruang dalam sebelah timur Istana Dalam Loka yang telah mengalami beberapa kali pemugaran, terdapat empat kamar tidur untuk putra-putri raja yang sudah berumah tangga dan kamar pengasuh rumah tangga istana. Di bagian belakang Bala Rea terdapat ruang sidang yang jika malam hari dijadikan tempat tidur para dayang. Kamar mandi terletak di luar ruangan induk yang memanjang dari kamar peraduan raja hingga kamar permaisuri.

Namun pada saat kami mengunjunginya sudah tidak ada lagi perabotan-perabotan atau tempat tidur. Barang yang tertinggal hanyalah foto-foto kuno dan bersejarah dan keterangan silsilah Raja Sumbawa serta pigura-pigura yang penuh dengan ukiran khas Sumbawa.

Sejak dibangun istana baru pada tahun 1932 yang kemudian dijadikan rumah dinas Wisma Praja Bupati Sumbawa, keadaan Dalam Loka sudah tidak terawat lagi. Pada tahun 1979-1985 dalam loka dipugar kembali oleh Departemen Kebudayaan. Kemudian di tahun 1993 Dalam Loka dijadikan sebagai Museum Dalam Loka. Dan pada tahun 2001 mengalami pemugaran kembali yang didanai oleh proyek pelestarian sejarah dan purbakala Nusa Tenggara Barat hasil kerja sama pemerintah Indonesia dan Jepang. Tahun 2011 dilakukan revitalisasi kompleks Dalam Loka. Hanya saja proses revitalisasi ini masih harus berkesinambungan karena masih banyak yang harus diperbaiki.

Pantai Baru Nan Menawan

Puas mengelilingi Istana Dalam Loka, tujuan selanjutnya adalah menikmati keindahan alam Pantai Baru di wilayah Banjar, Taliwang. Lautnya yang biru terang semakin berkilauan terkena sinar matahari yang cukup terik siang itu. Meski tidak ditata dengan baik sebagai tempat tujuan wisata, namun tidak menghilangkan keindahan alam sekitar Pantai Banjar.

Pantai Baru kini dikenal sebagai tujuan wisatawan untuk menikmati kuliner khas laut dan tempat refreshing. Tak lupa kami pun mencicipi hidangan yang disediakan di sebuah rumah makan yang ada di Pantai Baru karena kebetulan juga waktu makan siang sudah tiba dan perut kosong sudah minta diisi. Benar juga, ikan-ikan yang masih baru diambil oleh nelayan membuat rasa daging ikannya segar, semakin menggugah rasa untuk menikmati aneka hidangan laut yang tersedia seperti ikan bakar dan goreng, udang, dan kepiting. Tak lupa seruputan air kelapa

yang tumbuh di sekitar pantai menutup makan siang kami.

Selesai makan siang, agak berpindah tempat sedikit, kurang lebih 2 kilo meter, kami mengunjungi sebuah pantai yang masih masuk wilayah Pantai Baru. Perahu-perahu nelayan berjejer menunggu waktu sore untuk pergi melaut. Di dekat pantai ada juga dermaga yang konon dulunya adalah sebuah pelabuhan yang dibangun sejak masa pendudukan Belanda, sebagai tempat pertahanan Belanda jika mendapat serangan, yang kemudian ditinggali oleh masyarakat keturunan Banjar. Kampung ini disebut sebagai Kampung Banjar.

Saat mengunjungi tempat ini yang bisa kita lihat adalah sisasisa bangunan pelabuhan berupa dua buah tiang dermaga mengarah ke lautan lepas yang sudah diperbaiki lengkap dengan pilarpilar yang jika sore hari berubah fungsi menjadi tempat mudamudi duduk-duduk di tepi pantai, di kursi yang akan disiapkan menjelang sore. Aneka makanan bakar disajikan di tempat ini pada sore hingga malam hari menemani para pengunjung. Pantai Banjar sangat bersih, tidak terlihat sampah berserakan di sekitarnya, air lautnya pun sangat tenang, bisa dibayangkan duduk-duduk malam hari di tempat ini pastinya cukup nyaman.

(Ariessuryantini)











KEUNGGULAN INVE

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



Indonesia terletak di pusat konsentrasi global



Indonesia memiliki SDA yang melimpah

Panas Bumi 40% cadangan dunia 27 Juta Metrik Ton Minyak Sawit Mentah





Indonesia merupakan sebuah basis produksi untuk mencapai pasar global G to G

insentif Government to Government

Indonesia merupakan tujuan investasi global

YoY meningkat Rp145,4 Triliun atau tumbuh 17,6 % Foreign Direct Investment

Domestic Direct Investment

EMBAGA 26 Januari 2016

STASI DI INDONESIA



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi digital yang pesat

Pengguna Internet aktif 88,1 juta pengguna

Transaksi penjualan online meningkat 40%



Indonesia memiliki **Produk Domestik Bruto** (PDB) yang stabil dan kuat

PDB sebesar 896 miliar dollar

PDB per kapita sebesar 3416 millar



Indonesia memiliki persepsi global yang terus meningkat

Indonesia negara tujuan terbaik kedua di kawasan APEC

PTSP BKPM

/anan

padu

pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti,dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat

BEA CUKAI KUALANAMU BERDAYAKAN PEMUDA SUMATERA UTARA MELALUI CUSTOMS YOUTH TALK AND STUDY TOUR

MEDAN – Bea Cukai Kualanamu menggelar kegiatan Customs Youth Talk & Study Tour, dengan mengundang 25 orang pemuda terbaik Sumatera Utara dari berbagai latar belakang untuk ikut berperan aktif khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati



International Youth Day dengan tema "Empowering Youth for The Challenges of the Asean Economic Community". Melalui kegiatan ini, para pemuda diberikan pengetahuan tentang kepabeanan dan cukai khususnya dalam bidang ekspor, sehingga diharapkan nantinya mereka akan menjadi motor penggerak ekspor baik dalam skala kecil maupun besar. Selain pemaparan materi, para peserta juga dibawa untuk lebih mengenal pelayanan ekspor, impor, maupun pelayanan terhadap barang penumpang di bandara Bea Cukai Kualanamu, di kantor, gudang kargo, dan Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional Kualanamu. Tak hanya itu, para peserta juga diperkenalkan dengan unit Anjing Pelacak (K9).

STOP ROKOK ILEGAL, BEA CUKAI TEMBILAHAN LAKSANAKAN OPERASI PASAR CUKAI

TEMBILAHAN - Selain melakukan operasi penindakan terhadap pergerakan Barang Kena Cukai ilegal, Bea Cukai Tembilahan juga turun ke daerah pemasaran dan pengecer untuk melaksanakan operasi pasar cukai, Minggu (04/09). Operasi dilaksanakan di Kabupaten Kuantan

Sengingi (Kuansing). Pada operasi ini, petugas mendatangi pasar, toko, dan warung penjual rokok untuk memeriksa sediaan rokok yang dijual, melakukan sosialisasi rokok legal dan ilegal kepada penjual, dan melakukan penindakan terhadap sediaan rokok ilegal yang ditemui. Sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi juga diberikan leaflet tentang cukai kepada pedagang dan masyarakat yang ditemui serta penempelan *sticker* himbauan untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Operasi ini menghasilkan 20 titik pemeriksaan dan dilakukan penindakan terhadap 2.120 batang sigaret kretek mesin serta 100 bungkus tembakau iris. Rokok tersebut ditegah karena tidak dilekati pita cukai, dilekati pita yang bukan peruntukannya, atau dilekati pita yang diduga palsu.





BEA CUKAI KALIMANTAN TIMUR TANGKAL PENYELUNDUPAN KAYU ILEGAL

SAMARINDA – Patroli laut Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan

Bagian Timur saat berpatroli di perairan Selat Makassar, Rabu (14/09) melaksanakan penindakan terhadap KLM. Baru Mangenre yang melakukan pelanggaran dengan memuat 80 m³ kayu ulin dan kayu meranti tanpa dilengkapi dokumen muatan yang sah dan surat ijin berlayar dari instansi terkait. Pelanggaran ini diduga tidak sesuai denganUndang-Undang Kehutanan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seoorang nahkoda berinisial SR dan 8 orang anak buah kapal berinisial FR, HB, DY, AG, JM, AW, PN, dan ND, maka terhadap KLM. BARU MANGENRE dilakukan penegahan dan kapal pun ditarik menuju Kantor Bea Cukai Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diperiksa, petugas Bea Cukai lalu melimpahkan berkas perkara kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.



BEA CUKAI PERKUAT KOORDINASI ANTAR INSTITUSI KEPABEANAN REGIONAL ASEAN

DENPASAR- Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah dalam acara regional ASEAN yaitu Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG) ke-20 yang digelar di Bali pada tanggal 20-22 September 2016. Pertemuan yang dibuka langsung oleh Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Robert Leonard Marbun, membahas pengembangan rencana strategis dalam bidang kepabeanan dari masing-masing negara di regional ASEAN, baik dalam bidang audit maupun customs enforcement dan tindak lanjut dari kesepakatan pada pertemuan CECWG ke-19 yang diadakan di Manila, Filipina pada tanggal 15-17 Maret 2016. Robert mengatakan, pertemuan ini akan menjadi evaluasi terhadap pengembangan rencana strategis kepabeanan dan Key Performance Indicator rencana kerja di sektor kepabeanan di masing-masing institusi kepabeanan yang ada di regional ASEAN dan dapat menjadi momentum baik yang dapat dimanfaatkan untuk menunjukan bahwa Bea Cukai sudah sejajar dengan instutusi kepabeanan dunia dan tidak kalah dengan negara lain.

LAUNCHING KANAL BC TV DAN RADIO, BEA CUKAI LEJITKAN EKSISTENSI

23/9

JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi meresmikan berdirinya Kanal BC yang merupakan saluran publikasi resmi Bea Cukai, pada Jumat (23/09) di Kantor

Pusat Bea Cukai. Kanal BC, yang terdiri dari radio dan TV streaming, dapat diakses oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai serta masyarakat umum melalui jaringan internet. Hal ini serta-merta semakin melejitkan eksistensi Bea Cukai di tengah masyarakat. Menurut Heru, pendirian Kanal BC ialah dalam rangka mempublikasikan kegiatan dan kinerja, serta meningkatkan citra positif Bea dan Cukai kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai serta masyarakat umum. Radio dan TV streaming dapat disimak melalui kanalbc.beacukai.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Android Kanal Bea Cukai https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.beacukai. kanalbe. Siaran Kanal BC Radio sendiri mengudara setiap harinya dengan mengusung tiga program utama, yaitu Inspirasi Pagi, Informasi BC Terkini, serta program Berbagi Motivasi yang berisikan kumpulan kisah motivasi.



BEA CUKAI KEPULAUAN RIAU HIBAHKAN BAWAH MERAH KE WARGA KABUPATEN LINGGA



TANJUNG BALAI KARIMUN - Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau menghibahkan 1.302 karung bawang merah ke masyarakat Kabupaten Lingga, Rabu (28/09). Bawang merah ini merupakan barang tegahan Bea dan Cukai dengan

total perkiraan nilai barang mencapai seratus juta rupiah. Penegahan berasal dari penyelundupan kapal yang berlayar dari Batu Pahat, Malaysia menuju Selat Panjang dan Bantan Tengah, Bengkalis. Bawang merupakan bahan konsumsi yang memiliki batasan waktu untuk disimpan di ruang terbuka. Proses pelelangan tentu memerlukan waktu dan membuat bawang rentan busuk, sebaliknya hibah merupakan satu-satunya cara agar bawang dapat didistribusikan dan dikonsumsi warga dengan tepat namun tetap harus mendapatkan izin dari instansi terkait. Perekonomian Kabupaten Lingga menurun dalam dua tahun terakhir yang berakibat daya beli masyarakat yang rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hibah ini merupakan salah satu bentuk bantuan dan kepedulian Bea Cukai dalam membantu perekonomian masyarakat Lingga.





Dermaga Pelabuhan Baru Panarukan

PELABUHAN PANARUKAN

ekarang ini, Pelabuhan Panarukan mungkin sudah mulai asing dan jarang terdengar, jika dibandingkan dengan pelabuhan di kota lain seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak di Surabaya. Bukan hanya Pelabuhan Panarukan yang sudah asing, daerah Panarukan pun mungkin tak terlalu dikenal masyarakat, yang lebih akrab di telinga adalah Kabupaten Situbondo. Sebenarnya, Panarukan termasuk salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Jika melalui perjalanan jalur pantai utara (pantura) dari Surabaya, terlebih dahulu melewati bangunan megah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, salah satu perusahaan

pembangkit listrik dengan tenaga uap yang berada persis di tepi pantai utara, kemudian baru memasuki Kabupaten Situbondo, daerah Besuki, dan pantai pasir putih yang terhampar di sepanjang pantai.

Pada abad 18 sampai abad 19, masa penjajahan Hindia Belanda, kota Panarukan yang terletak di ujung timur Pulau Jawa itu termasuk salah satu wilayah yang mahsyur dan banyak dikunjungi para saudagar, karena Panarukan merupakan pelabuhan strategis yang terletak di sebelah pantai utara Jawa Timur. Panarukan mempunyai kedudukan lebih penting lagi karena berada pada tepi jalan perdagangan yang lebih ramai.

Pelabuhan Kilensari yang ada di kota Panarukan sempat menjadi tonggak ekonomi Hindia Belanda yang membuat daerah ini terkenal di jalur bisnis Asia dan Eropa. Panarukan juga tercatat menjadi satu Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa hingga penghujung abad ke 20. Dulu Kabupaten Panarukan ibu kotanya di Situbondo, yang letaknya 8 kilo meter ke arah timur. Namun dua ratus tahun berselang, semua berubah. Panarukan turun kasta. Kini Panarukan hanya menjadi sebuah kota Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang terdiri atas delapan desa, yaitu Kilensari, Wringin Anom, Paowan, Sumber Kolak, Peleyan, Duwet, Alas Malang, dan Gelung.

Pamor kejayaan Panarukan pada saat itu juga tidak terlepas dari proyek Gubernur Jenderal





Tugu 1000 km Anyer Panarukan.

Hindia Belanda Herman Willem Daendels pada pertengahan tahun 1809. Di kawasan yang terletak 200 kilometer dari Surabaya ini, Daendels, Gubernur Jenderal ke-36 Hindia Belanda, mengakhiri proyek terbesarnya pada zaman itu yang dikenal dengan sebutan Jalan Anyer-Panarukan atau lebih dikenal lagi dengan Jalan Daendels atau Jalan Pos, membentang 1.000 kilo meter dari Anyer sampai Panarukan.

Sebagai ikon kota Panarukan, kini telah dibangun Tugu 1.000 km Ayer-Panarukan. Tugu ini membuktikan bahwa pembangunan jalan sepanjang 1.000 km mulai dari ujung barat Pulau Jawa di Banten dan berakhir sampai ke ujung timur Pulau Jawa di Panarukan. Walaupun pada masa pembangunan jalan ini dulu dikenal dengan kerja paksa dengan memakan banyak korban yang bertujuan untuk memperlancar usaha militer Belanda, namun



Strasiun Kreta Api yang sudah tidak berfungsi.



Pelabuhan Nelayan.

pada perkembangan selanjutnya, jalan yang memanjang dari arah barat ke timur di pesisir utara Pulau Jawa itu sangat bermanfaat bagi kelancaran lalu lintas, ekonomi, dan transportasi. Sekarang boleh disaksikan sendiri bahwa jalan lintas pantura ini tidak pernah sepi siang maupun malam.

Tak hanya persoalan infrastruktur yang membuat Panarukan begitu masyhur. Ekonomi Panarukan kemudian pesat kemajuannya pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1886, di kecamatan bekas kabupaten ini, Panarukan disulap sebagai "gudang emas" yang mengirim banyak upeti untuk Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, Pelabuhan Panarukan merupakan buah prakarsa dari seorang pengusaha asal Belanda, George Bernie, pemilik NV. LMOD (Landbouw Matschappij Oud Djember). Bernie merupakan penguasa perkebunan terbesar di daerah Jember. Panarukan berkembang pesat karena merupakan penghasil ekspor hasil perkebunan seperti tembakau, kopi, teh, dan tebu.

Infrastruktur Panarukan semakin lengkap dengan pembangunan sebuah stasiun kereta api. Stasiun kereta api di Panarukan dibangun oleh Belanda sekitar tahun 1890-an. Stasiun Panarukan membuka rute Jember-Bondowoso-Panarukan sepanjang kurang lebih 75 km. Bangunan stasiun yang telah ditutup pada penghujung 2004 itu masih ada hingga saat ini, namun kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Padahal dulu, dari stasiun Panarukan ada jalur trem yang khusus melintas menusuk ke arah laut lepas di pinggir pelabuhan. Jalur trem khusus dibuat untuk memindahkan beberapa angkutan perkebunan, dinaikkan langsung ke kapal atau dimasukkan ke gudang penumpukan.



Pelabuhan Kalbut.

Stasiun Panarukan berarsitektur khas Belanda, bangunannya yang memanjang masih kokoh berdiri meski dengan sebagian ruangannya yang telah hilang. Terdapat ruang kepala perjalanan kereta api, gudang umum, dan sebagian tempat menunggu penumpang. Bila diraba dari arsitektur elemen pendukungnya, terlihat jelas bahwa stasiun ini memiliki dua jalur rel, sebuah penanda yang membuktikan stasiun ini begitu padat dan ramai pada masanya. Jalur kereta api ini merupakan alat transportasi penting bagi pelabuhan Panarukan untuk mengangkut tembakau dari Jember dan Bondowoso. Pada masa pendudukan Kolonial Belanda, di wilayah Panarukan terdapat paling tidak 12 buah pabrik gula, dan pada saat ini hanya tinggal beberapa pabrik saja.

Potret sejarah yang terekam di pelabuhan Panarukan, yakni keberadaan bangunanbangunan tua yang berdiri di sekitar pelabuhan, yang dulunya merupakan gudang tempat penumpukan komoditas perkebunan yang selalu penuh. Gudang-gudang tua itu kondisinya saat ini sudah rusak, bahkan ada yang sudah hampir roboh. Pelabuhan Panarukan dulu memang dikenal sebagai pelabuhan internasional milik Hindia Belanda di Jawa Timur.

Aktivitas ekspor impor saat itu, bergeliat penuh gairah di pelabuhan ini. Namun kondisinya sekarang memprihatinkan, karena fungsi pelabuhan dialihkan ke Probolinggo dan Banyuwangi sehingga pelabuhan Panarukan hanya dipenuhi kapal-kapal nelayan serta kapal penumpang tradisional.

Saat ini ada satu hal menarik yang berkembang di sekitar pelabuhan Panarukan. Tiga tahun lalu Dinas Perhubungan Laut telah membangun Dermaga Baru yang menjorok ke permukaan laut sepanjang kurang lebih 3 km dengan kokoh. Namun sangat disayangkan, walaupun dermaga pelabuhan baru Panarukan telah siap dibangun dan siap untuk difungsikan, sampai pada saat ini Pemerintah Daerah setempat belum mampu menarik para investor untuk menggunakan atau memanfaatkan dermaga tersebut.

Menurut informasi yang berkembang, Pemerintah Daerah sedang giat-giatnya melakukan berbagai upaya untuk menghidupkan kembali fungsi pelabuhan Panarukan, terutama supaya para investor atau pengusaha kembali berminat menggunakan fasilitas pelabuhan. Bahkan kedepannya penggunaan jalur kereta api yang selama ini sudah tidak berfungsi juga akan dihidupkan kembali.

(Piter)

CHINA ULTRAVIOLET RESTAURANT

RESTORAN BERTEKNOLOGI CANGGIH DI SANGHAI



elamat datang di pengalaman makan yang unik. Saat lampu restoran mulai menyala, ruang makan akan dihiasi dengan beragam keindahan warnawarni dan sebuah foto mendiang John Lennon akan muncul perlahan di atas meja. Sorotan pelangi dan coretan juga akan menghiasi dinding. Suara pengiring mulai menghitung layaknya dalam peluncuran roket. Gambar yang ada di meja bahkan selalu berubah menghilang hingga gelap. Dindingnya nampak seperti bergerak selagi lampu sorot muncul. Inilah hasil teknologi ultraviolet. Pengalaman makan dengan meja tunggal dan beragam tampilan 3 dimensi ini dapat dinikmati di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Sanghai. Harga makanannya pun tak tanggung-tanggung, senilai 12,4 juta rupiah per orangnya.

Di restoran ultraviolet yang memiliki beragam tampilan 3 dimensi ini ternyata memiliki antrean





Pendiri Ultraviolet

pesanan yang banyak, bahkan sampai menumpuk meskipun setiap orang dikenakan biaya yang tidak murah. Sekilas diamati, ruang makannya polos, hanya ada sebuah meja makan besar dengan kursi. Tambahan lampu sorot, wewangian, dan suara dirancang untuk menambah pengalaman makan konsumennya. Meskipun ekonomi di Tiongkok melambat, namun tidak mempengaruhi permintaan di restoran yang berteknologi realitas maya terbaik di Sanghai ini. Ketertarikan orang-orang dalam bersantap dengan kualitas kelas atas tidak pernah berkurang.

"Kami lihat dengan jelas selama 10 tahun terakhir, banyak orang tertarik pada ilmu tentang makanan. Jelas saat ini orang lebih suka bepergian, khususnya para generasi muda yang memulainya di sini. Tentunya keberadaan restoran ini juga akan menimbulkan rasa penasaran,' ujar Paul yang memiliki lebih banyak konsumen dari Tiongkok sejak restorannya menaikkan harga cukup tinggi. Ini bukanlah pengalaman murah karena pengunjung harus membayar 800 euro. Harganya yang tinggi inilah justru menjadi salah satu aspek yang memicu banyak kunjungan dari konsumen Tiongkok yang mampu secara ekonomi.

Adalah Paul Pairet, pendiri Ultraviolet, yang pindah ke Sanghai 10 tahun yang lalu, merasa yakin Shanghai adalah salah satu tempat yang paling canggih di dunia dalam bisnis restoran. Pemesanan penuh di hari pertama sejak beroperasinya China Ultraviolet Restaurant dan terus menerus meningkat sampai 3 bulan ke depan. Menurutnya, pemahaman dan penghargaan akan kualitas makanan dalam skala global telah meningkat tajam.

Sejak dibuka pada bulan Mei 2012, tak ada banyak perubahan sejak hari pertama. Di daftar menunya hanya terdapat dua menu, yakni ultraviolet A dan ultraviolet B. Sebanyak 20 menu hidangannya digambarkan Paul sebagai kiasan perintis, termasuk hidangan lainnya seperti sup mi kelapa serta hidangan klasik seperti salad tomat mozzarella, dua menunya ini diganti setiap minggunya.

Dibalik layar, dapur ultraviolet yang mencolok menyingkap proses memasak yang amat teliti. Tidak ada yang sederhana, nitrogen cair dan tabung reaksi diletakan bersandingan dengan panci dan wajan. Menariknya, Paul mencatat bahwa harga makanannya yang semakin mahal semenjak dibuka, justru menarik lebih banyak konsumen warga Tiongkok.

Secara teori, konsep restoran ini sangatlah sederhana, namun ternyata sangat rumit dalam pelaksanaannya. Konsepnya timbul dari keinginan Paul untuk mengendalikan suasana ketika hidangan disajikan dan kesesuaian situasi dari menu makanan yang sedang disantap. Ruangan ini dilengkapi dengan teknologi yang akan membantu kita menyesuaikan suasananya. "Kami sesuaikan suasananya, karena kami mengatur waktu dan idenya, agar bisa mengendalikan setidaknya sebagian suasana yang akan menemani hidangan, dan akan disesuaikan di hidangan khusus," ujar Paul yang menjelaskan juga, dengan menggabungkan sorotan lampu, suara dan aroma halus yang dipompakan ke dalam ruangan, Paul berharap bisa memberikan pengalaman yang lebih emosional kepada konsumen dibandingkan jika mereka memesan hidangan per menu.

Para pengunjung pun mengaku sangat suka dengan perpaduan makanan, suasana, dan pengalaman istimewanya. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang amat spesial. Seperti di perjalanan menuju suatu tempat, mereka tidak tahu ke mana akan pergi. Amat menakjubkan. Ini sesuatu yang ada di pikiran dan akan mengingatnya seumur hidup dan akan diceritakan kepada anakanak mereka.

Tak hanya suasana dan menu makanannya yang menarik perhatian, dinding restorannya yang seakan dapat bergerak pun memancing ketertarikan tersendiri. Padahal, dinding tersebut tidak bergerak sungguhan, hanya sebuah ilusi visual di mana sorotan cahaya yang memantul lah yang bergerak. Hal itu membuat para pengunjung berharap dan berpikir, apa yang akan terjadi selanjutnya, lalu tiap hidangan memiliki beragam rasa dan itu menurut para pengunjung sesuatu yang sangat luar biasa. Kerja keras Paul selama ini pun telah terbayar. Posisi restorannya di kancah internasional semakin naik daun. Menurut salah satu majalah terbitan Inggris, Restaurat Ultraviolet di tahun 2015, berada di posisi restoran terbaik ke-24 di seluruh dunia.

(Ariessuryantini)

CUSTOMS LITERACY FORUM (CLiF)

i akhir tahun lalu, tepatnya tanggal 2 Desember 2015, secara resmi Customs Literacy Forum (CLiF) berdiri. Forum Literasi Bea Cukai ini di-launching langsung oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi dan dihadiri oleh anggota CLiF (Clifers) dan juga disaksikan oleh purnawirawan Bea Cukai dan beberapa Eselon II DJBC.

CLiF itu sendiri adalah sarana untuk berekspresi, menggali, menumbuhkan, dan mengembangkan kemampuan dan bakat literasi para pegawai serta mendorong partisipasi publik yang fokus terhadap perkembangan literasi kepabeanan dan cukai dalam rangka mendukung visi, misi, dan fungsi utama Bea Cukai.

Dengan visi menjadi komunitas pembelajar literasi Bea Cukai yang produktif, CLiF bertujuan menjadikan literasi sebagai aktifitas yang menyenangkan, digemari, dan sarat manfaat, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan literasi pegawai, membangun tradisi ilmiah serta kajian akademis ilmu kepabeanan dan cukai, dan memperkokoh brand image Bea Cukai di mata publik.

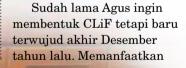
Latar belakang pembentukan CliF adalah kesadaran akan pentingnya forum yang bisa meniadi wadah untuk saling berkomunikasi, bersilaturahim, menumbuhkan semangat untuk berkarya, menyatukan potensi, bakat dan talenta menulis di kalangan pegawai sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Bea Cukai makin baik.

Dunia tulis menulis bagi pegawai Bea Cukai bukanlah hal baru. Ada perlombaan karya tulis yang diadakan setiap tahun dalam rangka peringatan Hari Pabean Internasional. Tak sedikit pula pegawai yang mempunyai blog sebagai sarana menulis atau bahkan sudah ada yang menulis dan menerbitkan buku.

"Saya melihat potensi literasi Bea Cukai luar biasa tapi selama ini mereka bergerak individu. Kalau kita bisa arahkan.

kembangkan, dan bisa memotivasi mereka, agar bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan hal bermanfaat, namun tetap tidak mengganggu pekerjaan mereka. Belum lagi yang punya blog bukan sembarang blog, tetapi blog yang bisa menginspirasi dan mempunyai banyak follower," ucap Ketua CLiF, Agus Rofiudin.

Literasi yang dihasilkan CLiF luas sekali, terdiri atas karya ilmiah dan non ilmiah. Karya literasi ke-Bea Cukai-an bukan semata-mata terkait dengan tematema kajian ilmiah, kebijakan, atau publikasi kehumasan semata. Melainkan bisa berupa karyakarya literasi inspiratif lainnya seperti cerita tentang pelaksanaan tugas yang mengangkat sisi-sisi humanis seorang Bea Cukai. CLiF ini lahir dari rahim Bea Cukai, tentunya dari Bea Cukai, oleh Bea Cukai untuk Indonesia.





M. Agus Rofiudin Ketua CLiF

■ HOBI DAN KOMUNITAS

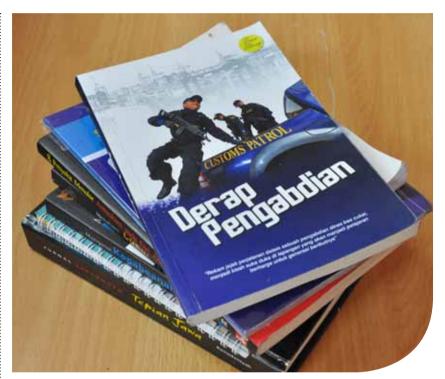
momentumnya, diluncurkan buku Derap Pengabdian yang merupakan buku inspirasi kumpulan tulisan karya-karya anggota CLiF yang merupakan hasil lomba karya tulis pada Hari Kepabeanan Internasional. Pada saat yang bersamaan juga diadakan workshop dengan mendatangkan para penulis terkenal di tanah air, Habiburrahman El Shirazy (Ayat-Ayat Cinta) dan Asma Nadia (Catatan Hati Seorang Istri).

Cara CLiF mendukung visi, misi, dan fungsi utama Bea Cukai vakni melalui karva literasi yang dihasilkan CLiFers sendiri. Melalui karya tersebut diharapkan tersampaikan pesan, peran penting, dan kontribusi Bea Cukai terhadap bangsa dan negara. Agus berpendapat bahwa Bea Cukai mempunyai aset sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa. Sebagai contoh, Buku Derap Pengabdian bisa menjadi bahan bedah buku bahkan salah satu took buku kenamaan di Indonesia sudah bersedia dan bisa sekalian diadakan workshop.

"Literasi yang dihasilkan bisa menjadi sarana kehumasan dengan menyampaikan karyakarya dan pekerjaan positif Bea Cukai, jadi oeang-orang tidak hanya mengetahui sisi negatifnya saja, terutama ke masyarakat umum" ungkapnya.

Hingga saat ini yang sudah tergabung menjadi anggota CLiF ada 59 orang, mulai dari pelaksana sampai eselon II. Beberapa di antaranya sudah sangat produktif menulis melalui blog pribadi atau media sosial. Kedepannya, CLiF berencana membuat keanggotaan kehormatan untuk para akademisi atau tokoh yang fokus menulis tentang Bea Cukai dan membuka komunitas sahabat CLiFers untuk kalangan pelajar dan mahasiswa yang tertarik menulis tentang Bea Cukai.

Organisasinya sendiri terdiri



Buku Derap Pengabdian, hasil karya para CLiFers.

dari Pembina, yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Dewan Ahli, dan Badan Pengurus Harian (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris), serta anggota sekretariat. Agar lebih memudahkan dalam melakukan kegiatan, CLiF dibagi menjadi beberapa divisi, yaitu Divisi Sastra (Novelete Division), Divisi Wacana Populer (Popular Writing Division), Divisi Kajian Stratejik (Strategic Review Division), Divisi Laman Maya (Online Division), dan Divisi Pustaka (Reading Division).

Banyak kegiatan yang dilakukan CLiFers, seperti workshop penulisan dan kopi darat CLiFers. Selain itu ada juga acara Sharing Session di Pojok CLiF yang berlokasi di Perpustakaan Bea Cukai. Beberapa CliFers juga sudah menulis di majalah Warta Bea Cukai, menyusun buku tentang sejarah Bea Cukai, buku mengenai orang-orang "gila" di Bea Cukai, serta saling memberikan saran, masukan, dan kritik tulisan karya para CLiFers yang di-share melaui grup chat whatsapp.

CLiF juga melakukan sinergi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan turut mendukung #beacukaimakinbaik. Contoh sinergi yang dilakukan adalah sinergi dengan INCU (International Network of Customs Universities) yaitu CliFers bisa mengkases dan mempublikasikan jurnal tentang kepabeanan agar bisa saling bertukar informasi dan ilmu dengan komunitas pabean internasional.

Kedepannya, CLiF ingin mengadakan kegiatan gathering komunitas, CLiF on Campus, dan CLiF Competition. "Kami punya cita-cita setiap tahun minimal satu buku tentang Bea Cukai bisa terbit, kemudian mimpi kami CLiF punya tim yang bisa melakukan kajian serta penelitian terkait kepabeanan dan cukai," terangnya.

Menjadi harapan tersendiri bagi Agus agar CLiF dengan terus berkarya dan niatkan karya/ pekerjaan sebagai amal jariyah yang tidak hanya dikenang tapi bermanfaat dunia akhirat.

(Desi A Prawita)







DEMI MERAH PUTIH

Pengabdian Petugas Bea Cukai Di Perbatasan **INDONESIA-TIMOR LESTE**

Pukul 05.00 pagi, akhir Agustus 2016, telepon seluler Fajar Dwi bergetar saat satu pesan singkat masuk. Kurang istirahat akibat tugas-tugas kantor, wajah pegawai muda Bea Cukai Atambua itu sedikit pucat membaca pesan. "Mas, tolong antar tamu dari Humas Kantor Pusat dan Warta Bea Cukai (WBC) ke perbatasan Mota'ai".

esan singkat dari Kepala Seksi Penyuluhan dan Lavanan Informasi Kantor Bea Cukai Atambua Edie Purwanto itu membuyarkan mimpi Fajar. Hari itu WBC bersama salah seorang pegawai Subdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, bertandang ke Atambua guna melakukan peliputan dan memotret suasana di perbatasan. Selain Fajar, kala itu kami juga ditemani Gagas Galang, kolega sesama pegawai di Bea Cukai Atambua.

Syahdan, kami berempat menyusuri jalanan mulus berbukit selama 45 menit menuju pos perbatasan Indonesia-Timor Leste. Di perjalanan banyak hewan liar yang kami temui seperti babi, kuda, kambing, dan sapi yang berjalan berderet dengan tenang di tengah aspal. Walaupun bagi kami hal itu sedikit aneh, rupanya pemandangan tersebut tak asing bagi warga lokal. "Biasa, penduduk lokal, kita harus ngalah," kelakar Fajar.

Ketika tiba di area perbatasan Mota'ain tampak di kejauhan gedung baru pos perbatasan Indonesia yang masih dalam proses pembangunan. Sejumlah gedung yang belum rampung tampak berdiri kokoh dan megah. Kombinasi arsitektur tradisional dan modern terlihat padu. Semua gedung bentuk atapnya berupa bulat khas rumah adat Belu atau sering juga disebut matabesi.

Mota'ain merupakan desa yang menghubungkan dua negara. Tepat di depan pintu gerbang perbatasan terdapat Pos Tentara Nasional Indonesia (TNI), juga terdapat kantor imigrasi khusus perbatasan, Bea Cukai, Karantina, serta Kantor Pelayanan Bank Mandiri. Beberapa warung kecil berjejer tak jauh dari deretan kantor. Tak terlihat terminal atau pasar di sana, karena memang kompleks pos perbatasan Indonesia sedang



direnovasi.

Tak jauh dari gerbang perbatasan milik Indonesia, terdapat portal besi dan jembatan bercat sesuai warna bendera kedua negara untuk melintas melewati sebuah sungai yang tampak kering. Itulah jembatan yang menjadi pintu masuk ke Negara Timor Leste. "Bem Vindo a Timor Leste", kalimat dari bahasa Portugis yang berarti "Selamat Datang di Timor Leste", menyapa kami dari atas jembatan. Lokasi ini juga dikenal dengan sebutan Batugade atau batu besar.

Gedung imigrasi perbatasan milik pemerintah Timor Leste tampak megah dari kejauhan. Kami sempat melewati dan mengambil beberapa gambar di wilayah Timor Leste. Kami juga sempat berbincang-bincang dengan petugas dan tentara perbatasan Timor Leste. Walaupun sudah belasan tahun lamanya merdeka mereka masih fasih berbahasa Indonesia meski dengan logat tetun, bahasa resmi Timor Leste, yang kental.

Menurut Fajar, perbatasan Mota'ain seperti menjadi simpul ekonomi penting bagi kedua

negara. Secara geografis, wilayah perbatasan ini merupakan jalur darat terdekat yang menghubungkan Dili dan Kupang. Jalur darat ini merupakan jalur primadona pelintas batas, karena jika ingin menggunakan moda udara tak ada penerbangan langsung yang menghubungkan Dili-Kupang, begitu juga sebaliknya.

Rata-rata sepuluh mobil melintas di sini setiap harinya. Selain kendaraan pribadi, truk barang, ada juga travel rute Kupang-Dili yang melintas. "Jika dibandingkan pos perbatasan lain, di sini yang paling ramai dan jelas beresiko tinggi. Hal ini membuat saya dan kawan-kawan harus lebih jeli lagi untuk melakukan pengawasan," ujar pemuda asal Solo ini.

Di wilayah perbatasan ini penduduk kedua negara mendapatkan kelonggaran dan kemudahan untuk keluar masuk wilayah dua negara. Hal ini mengingat Timor Leste pernah menjadi bagian dari Republik Indonesia sehingga hubungan kekerabatan masih terjalin erat. Kesamaan adat dan budaya





turut mempengaruhi kuatnya persaudaraan itu. Kemudahan aturan keluar masuk daerah perbatasan kerap digunakan warga Timor Leste untuk membeli berbagai kebutuhan barang di Kabupaten Belu NTT, mengingat harga jual barang kebutuhan pokok di Timor Leste cukup mahal.

Perbedaan harga yang cukup tinggi itu menjadikan maraknya aksi penyelundupan terutama menuju wilayah Timor Leste. Fajar menuturkan masih adanya aksi penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di Belu. BBM dengan harga subsidi dari pemerintah Indonesia bisa dinikmati secara massal oleh rakyat luar negeri. Rupanya di perbatasan ini BBM menjelma menjadi komoditas yang demikian seksi. Arus jual beli di perbatasan ini diakui masyarakat sekitar memang terasa timpang. Bagaimanapun, Timor Leste masih sangat bergantung pada Indonesia.

Hampir segala macam kebutuhan masih didatangkan langsung dari Indonesia. Sementara Indonesia hanya mengimpor sedikit kopra, kopi, dan kemiri. Di sini peran Bea

Cukai sangat diuji. Instansi yang memiliki peran strategis dalam perlindungan masyarakat terhadap berbagai aksi penyelundupan. Bukan hanya peredaran ilegal bahan pokok, tetapi juga segala bentuk narkoba dan barangbarang yang dapat mengganggu kedaulatan dan stabilitas ekonomi negara. Hal ini jelas menjadi tantangan bagi para pegawai Bea Cukai di perbatasan, seperti Fajar dan kawan-kawan.

Esok harinya, tibalah kami menuju ke satu wilayah perbatasan lain yang bernama Wini. Wini adalah sebuah desa kecil nan sepi yang terletak di Manamas Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Kabupaten TTU sendiri berbatasan langsung dengan Oecusse-Timor Leste. Distrik Oecusse atau biasa dieja Oekusi sendiri adalah wilayah Timor Leste yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Kegiatan lintas batas yang dilakukan di desa Wini biasanya adalah kegiatan jual beli kebutuhan harian di sekitar desa Wini ataupun saat hari pasar.

Kami pun sejenak menyempatkan berbincang dengan Kepala Kantor Bantu Bea Cukai

Wini, Menase Karmoy yang saat itu sedang bertugas. Pria asal Alor yang akan memasuki masa pensiun ini ditemani dua pegawai muda. Menurut Menase, Kantor Bantu Bea Cukai Wini yang masih berada dibawah kendali Bea Cukai Atambua memiliki tugas untuk memberikan fasilitas kepada lintas batas demi mempermudah kegiatan masyarakat di sekitar daerah perbatasan di desa Wini ini.

Fasilitas yang diberikan Bea Cukai untuk warga adalah berupa pemberian kartu identitas lintas batas atau KILB. KILB yang digunakan oleh pelintas batas hanya berlaku di sekitar daerah perbatasan. Fasilitas yang ada pada KILB ini adalah dibebaskanya pemilik KILB atas pajak barang ekspor maupun impor. Fasilitas yang diberikan kepada warga perbatasan itu diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat Indonesia disekitar daerah perbatasan.

"Kami melakukan pengawasan dan pelayanan kegiatan warga di Wini. Di sini juga terdapat kegiatan ekspor barang. Ada juga kendaraan transit dari Dili menuju

FEATURE

Oekusi Timor Leste ataupun sebaliknya yang melewati wilayah Indonesia," ujar Menase sembari sesekali mengenang para pejabat Bea Cukai yang dulunya pernah bertugas di Wini bersamanya. Wilayah Wini memiliki sebuah pelabuhan yang biasa digunakan untuk pengiriman barang lokal untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar seperti beras dan bahan makanan lain. Selain itu terkadang ada pula kapal yang sandar di pelabuhan Wini dengan tujuan Oekusi maupun Dili. Dalam momen ini dilakukan pengawasan berupa boatzoeking atau pemeriksaan fisik kapal oleh petugas Bea Cukai.

Ikatan Sejarah

Pulau Timor memiliki cerita yang panjang dalam sejarah dua negara. Sejak adanya jajak pendapat di tahun 1999 lalu, Timor-Timur kemudian berubah menjadi Republik Democratik Timor Leste. Di pulau ini dulunya banyak terdapat kayu cendana aromatik, madu, dan lilin. Potensi inilah yang menjadikan Pulau Timor sebagai bagian dari jaringan perdagangan Cina dan India di masa silam. Selain potensi sumber daya alam bernilai ekonomi, pulau ini juga memiliki keindahan alam yang memukau. Keelokan alamnya bahkan sudah kami saksikan dari kaca pesawat, sesaat sebelum mendarat di Bandara El Tari. Kupang.

Berbicara tentang Pulau Timor tentu tidak bisa lepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Potensi dan keindahan alam Pulau Timor sepertinya berbanding terbalik dengan kondisi masyarakatnya yang sebagian masih terbelakang, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil. Secara administratif ada tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Belu, dengan total garis perbatasan





mencapai 268,8 km.

Keterikatan sejarah masa lalu membuat masyarakat Timor masih sering berinteraksi dengan masyarakat Timor Leste, baik sekedar mengunjungi saudara ataupun berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dulu mereka leluasa saat menyeberang antar wilayah, sekarang harus melewati serangkaian pemeriksaan di pos perbatasan antar-negara dengan menunjukkan surat atau dokumen yang diperlukan untuk bisa melanjutkan perjalanan.

Selain hilir mudik manusia, kawasan perbatasan juga menjadi pintu keluar dan masuknya barang dari dan kedua negara ini. Ada beberapa jenis komoditas yang diekspor ke Timor Leste, seperti kebutuhan sehari-hari yang diproduksi di Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa yang diimpor dari Timor Leste seperti kopi, kemiri, kopra, dan kacang tanah. Pergerakan arus keluar masuk barang di kawasan perbatasan ini cukup sering terjadi, baik yang berada dibawah pengawasan pihak berwenang maupun yang dilakukan secara ilegal.

Teorinya, pergerakan barang yang terjadi di perbatasan akan memberikan manfaat berupa tambahan devisa bagi negara apabila dilakukan secara resmi. Tetapi bisa berpotensi memunculkan ancaman terhadap perekonomian bila dilakukan secara tidak resmi. Di sinilah pentingnya keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), serta fasilitas Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) sebagai filter arus orang dan barang di wilayah perbatasan.

Kondisi perbatasan baik melalui PPLB Mota'ain maupun Wini hampir sama. Ketika itu kedua perbatasan ini sedang berbenah membangun kantor. Bedanya, di Mota'ain suasananya lebih ramai. Sedangkan di Wini

cukup sunyi, tak ada yang melintas di siang itu. Jadilah pelayanan dan pemeriksaan pelintas batas oleh CIQS saat itu dilakukan di ruang darurat. Ruangan Pos Bea Cukai yang berukuran sekitar 3x3 meter dan terbuat dari bahan kayu itu tak bisa menampung semua para pelintas yang mulai berdatangan ketika portal mulai dibuka pada jam 08.00-1600 waktu setempat. Alhasil, antrean pun mulai mengular di depan pintu empat pos pelayanan di sana.

Rencananya, PLBN Mota'ain akan meliputi sejumlah bangunan dan pos berupa Gerbang Tasbara dan Pos Jaga, Karantina Tumbuhan dan Hewan, Pemeriksaan Imigrasi, Bea Cukai, dan Lambang Negara Indonesia, Wisma Indonesia, Mess Karyawan, dan fasilitas pendukung lainnya. Bagi kami, dengan memandang keindahan arsitekturnya saja sudah cukup menghibur dan menetralisir rasa lelah di tengah terik matahari.

Dalam menjalankan tugas dan perannya di perbatasan, para petugas Bea Cukai senantiasa menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu tentunya berbeda antar wilayah perbatasan, sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Sejatinya, Pulau Timor sendiri memiliki tiga batas matra, yaitu udara, laut, dan perlintasan di darat. Penyelundupan narkotika, senjata api, sampai hasil minyak bumi kerap terjadi di perbatasan

Tantangan lain adalah kondisi geografis yang lumayan berat. Batas negara sepanjang 149,9 km dari Mota'ain sampai Mota Masin, misalnya. Perbatasan ini hanya memiliki lima pos lintas batas resmi, satu kantor Bea Cukai di Atambua, dua kantor bantu Bea Cukai Mota'ain dan Motamauk, serta dua pos pengawasan Bea Cukai di Turiskain dan Haliwen. Kurangnya fasilitas penjagaan menjadikan pengawasan perbatasan di darat menjadi

longgar dan memunculkan banyak "jalur tikus" di sepanjang wilayah ini.

Faktanya, terdapat beberapa wilayah yang menjadikan sungai sebagai batas negara Indonesia-Timor Leste. Berbeda dengan sungai-sungai di wilayah lain, sungai di Pulau Timor cenderung kering dan dangkal, sehingga sangat mudah dilalui baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan bermotor. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh para pelintas batas ilegal untuk mengangkut barang yang akan diperjualbelikan. "Kalau pas tugas di pos pengawasan itu, kami sering tak bisa tidur mas, banyak nyamuk gede-gede," ujar Fajar.

Luasnya cakupan wilayah kerja sudah selayaknya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) Bea Cukai. Namun hal itu tentunya tidak menjadikan alasan untuk lengah. Terbukti, beberapa kali petugas Bea Cukai Atambua berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika, psikotropika, senjata rakitan, minuman beralkohol, dan BBM. Selain itu terdapat pula barang kebutuhan sehari-hari yang diselundupkan melalui "jalur tikus" di beberapa wilayah perbatasan.

Mungkin semua pegawai Bea Cukai sudah memahami dan menyadari bahwa bertugas di manapun tidaklah ringan. Selain pintar mejaga kondisi fisik, tak kalah penting adalah dapat bersinergi dengan semua instansi pemerintah di sana, seperti imigrasi, karantina, dan aparatur keamanan setempat. Fajar dan kawan-kawan adalah bukti pengabdian yang tinggi walau didera berbagai keterbatasan. Mereka adalah generasi muda pengabdi negara dan pecinta bangsa yang bertugas di wilayah yang jauh dari keluarga dengan medan tugas yang cukup berat, dan risiko pekerjaan yang tidak main-main.

(pomo)

Lahir

"A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on."

(John F. Kennedy)



Oleh: Darmawan Sigit-Pranoto, Kasubsi Pengelolaan Data Bea dan Cukai Jakarta Bandar Udara Halim Perdana Kusuma

roklamasi, pagi 17 Agustus 1945, menjadi waqaf dalam sejarah bangsa kita. Menjadi tanda berhenti sesaat. menahan, mengambil nafas. Waqaf bukan tanda untuk meninggalkan, tapi berhenti untuk melanjutkan perjalanan. Bahwa narasi kemerdekaan sudah lama ditulis dan dibaca oleh para pendahulu dari segala penjuru, dari waktu ke waktu.

Keumalahayati merenggut nyawa Cornelis de Houtman bukan tanpa alasan. Ada ide mempertahankan kemerdekaan. Cicit Sultan Salahuddin Syah itu tak ingin Belanda mengoyak kedaulatan Aceh.

Baabullah bisa saja dianggap mengobarkan Perang Jihad di Maluku karena dendam atas kematian ayahnya yang tragis. Sultan Khairun memenuhi sebuah undangan makan dari Portugis. Datang tanpa pengawal, dia dibunuh. Tapi ada ide yang lebih besar. Baabullah tak ingin Portugis menginjak-injak kemerdekaan Maluku demi rempah-rempah yang begitu mereka dambakan.

Dipanegara sedari awal bergerak atas ide: memerdekakan Jawa dari ketidaklempangan pranata keraton sekaligus menolak campur tangan Belanda. Inisiatifnya menghasilkan catatan kerugian perang terbesar di pihak Belanda, meski gagasan Sang Pangeran kandas.

Keumalahayati, Baabullah, Dipanegara—untuk menyebut semua pahlawan di generasi mereka, telah menuliskan narasi kemerdekaan dan

bangsa ini telah membacanya.

Ide merdeka tak hanya hadir dari medan laga. Multatuli menghembuskannya melalui Max Havelaar, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari mengaktualisasikannya lewat gerakan. Hatta, Soekarno, Tan Malaka menjadi moncong. Semua memiliki andil bagi tersemainya ide itu. Termasuk dari mereka yang kebetulan tidak memiliki nama besar atau mimbar.

Hingga Proklamasi menjadi puncak. Sebuah titik henti sementara bagi ide itu. Setelahnya perjalanan menjadi sangat berbeda. 16 Agustus 1945, tukang becak di Batavia tidak berani untuk sekadar berkata,"Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Tapi esoknya, tiba-tiba keberanian itu muncul. Membuka belenggu suara jutaan jiwa yang kemarin masih membisu.

17 Agustus menjadi penting, disakralkan, karena fungsinya yang sebagai tanda. Menjadi pembatas di tengah narasi yang panjang.

Hari pembatas itu dapatlah kita sebut sebagai hari lahir Indonesia. Namun proses kelahiran itu sudah bermula sejak lama. Di dalamnya terdapat ayunan pedang Keumalahayati hingga desakan Wikana cs ke Rengasdengklok. Semuanya adalah akumulasi. Kesatuan proses, tidak dapat dipisahpisahkan.

Lalu, adakah waqaf bagi beacukai?

Umumnya kita tahu kalau beacukai di negeri ini bermula saat Jan Pieterszoon Coen mengundangkan tarif pabean pertama kali, 1 Oktober 1620. Dinas duane Belanda kemudian memegang peranan penting. Di Ternate, kedudukannya sederet dengan pembesar kesultanan.

Imigrasi harus melapor ke Bea Cukai dalam sebuah prosedur keimigrasian. Bahkan pegawainya kaya secara resmi, 50% denda menjadi hak premi. Begitu kesohornya douane, seakan masa inilah yang layak menjadi titik awal sejarah bea-cukai.

Meyakini bahwa bea-cukai bermula sejak para meneer datang, memotong narasi panjang perjalanan zaman sebelumnya. Seperti terpisah, bukan satu. Seakan sistem bea cukai zaman Majapahit hingga era syahbandar di kesultanan-kesultanan bukan menjadi bagian dari narasi perjalanan bea-cukai Indonesia.

Lebih mudah bagi kita untuk tahu ke mana akan pergi, kalau kita tahu dari mana kita bermula.

Tidak memotong sejarah bea cukai sebelum VOC datang dengan periode setelahnya adalah kesadaran awal yang kita perlukan. Bahwa ide bea-cukai telah ada sejak dahulu. Pun, ketika narasi sudah tersambung, 1 Oktober 1620 bukanlah waqaf-nya. Dia bukan tanda pembatas.

Kesohornya eksistensi duane zaman Belanda, terhenti sejak Jepang datang. Drastis, karena melalui Osamu Seirei 13/1942, kepabeanan justru dibekukan. Maklum, Jepang sedang diblokade dagang oleh dunia. Juga karena perang. Hanya cukai yang dilaksanakan.

Meski hanya 3 tahun, dampak sejarahnya besar. Current conditions saat Proklamasi adalah sistem pemerintahan Jepang, Tatkala Departemen Keuangan dibentuk dalam sidang PPKI, 19 Agustus 1945, dan diatur strukturnya oleh A.A. Maramis sekitar satu bulan berikutnya, pilihan logisnya adalah meneruskan kondisi yang tengah berjalan. Diadopsilah struktur Zaimubu—Departemen Keuangan Jepang. Alhasil, pabean tergeletak lupa diajak.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, sang Menteri mengeluarkan maklumatnya yang pertama. Isinya mengenai masih berlakunya peraturan-peraturan di bidang keuangan yang sedang berlaku, selama belum diterbitkan peraturan yang baru. Berarti, Osamu Seirei 13/1942 termasuk di dalamnya. Pabean masih mati.

Baru pada tanggal 31 Oktober, sang Menteri membuat keputusan untuk memasukkan pabean yang disebutnya sebagai Urusan Bea ke dalam departemennya per tanggal 1 November. Oleh pemerintah puncak, dibuatlah Penetapan Pemerintah Nomor 1/S.D pada tanggal 7 November-nya. Sejak 1 November ini, pabean kembali ke pelukan cukai.

Apakah ini wagaf bagi sejarah bea-cukai?

Kembali bersandingnya bea dengan cukai dapat dilihat sebagai keinginan untuk membuktikan kesalahan Jepang dengan kembali ke sistem Belanda saja. Atau sekadar untuk menyesuaikan diri dengan keumuman di negara lain. Namun dapat juga dilihat sebagai titik batas yang membuat kita semestinya berhenti sejenak seperti Hari Proklamasi. Sejak tanggal itu, semua terasa berbeda.

Konon, mendengar kabar akan hidupnya kembali pabean ini, sekelompok pemuda segera melakukan tindakan revolusioner. Di hari Jumat yang suci, 9 November, mereka melakukan perebutan instalasi Jepang di Tanjung Priok. Pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut selama ini menjadi simbol aktivitas pabean. Laksana pendudukan Hotel Yamato di Surabaya, dengan menduduki Priok, sahlah sudah bendera bea-cukai Indonesia berkibar.

Atau seharusnya 9 November inilah waqaf-nya?

1946, Departemen Keuangan

punya tugas besar: menegakkan kedaulatan melalui peluncuran uang Republik. Dibentuklah Pejabatan Urusan Uang, Kredit, dan Bank yang sebelumnya menjadi bagian dari Pejabatan Keuangan. Kepala Pejabatan Pajak, Mr. Soetikno Slamet, dipercaya untuk memimpin.

Kursi yang ditinggalkan Slamet diisi oleh wakilnya, Mr. R.A. Kartadjoemena, Oleh Kartadjoemena, Pejabatan Pajak yang terdiri dari Urusan Perpajakan, Urusan Bea dan Cukai, serta Urusan Pajak Bumi dimekarkan. Masing-masing Urusan menjadi unit eselon I, dengan Urusan Perpajakan menjadi Pejabatan Pajak. Patut digarisbawahi, label "Pajak" pada nama Pejabatan Pajak sebelum pemekaran, tidaklah sebangun dengan pengertian "Direktorat Jenderal Pajak" sebagaimana sekarang. Sehingga, Bea dan Cukai tidak pernah berada di bawah "Ditjen Pajak" pada awal proklamasi, hanya ada di lembaga yang kebetulan menggunakan nama "Pajak".

Selanjutnya oleh Menteri Muda Keuangan, Kartadjoemena ditunjuk sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama pada tanggal 1 Oktober 1946.

Jika 1 Oktober ini adalah puncak, maka dia layaknya Proklamasi, tidak berdiri sendiri. Jika dia hari lahir, prosesnya satu kesatuan dengan bea-cukai Majapahit, Aceh, Pasai, Banten, duane Belanda, Zaimubu, pembentukan departemendepartemen dalam Sidang PPKI, maklumat pertama Menteri Keuangan, masuknya Bea per 1 November 1945, perebutan Tanjung Priok, dan sebagainya. Termasuk narasi sejarah bea-cukai akan terus berlanjut hingga kini dan esok nanti. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang sekarang dan masa depan. (*)

KOMIDI PUTAR DATABASE NILAI PABEAN

Telaah Peraturan tentang Database Nilai pabean

Oleh: **Teguh Iman S**, Kasi Nilai Pabean I Direktorat Teknis Kepabeanan

ipagi yang muram, ketika rinai gerimis turun bukan pada musimnya, seorang Kepala Seksi yang resah tiba-tiba memberikan instruksi kepada stafnya. "Kita kumpul sebentar, ada hal penting yang harus saya sampaikan" pintanya. Lalu, mengalirlah gelisah yang selama ini mengganggunya, yang mengusik nurani ketika sendiri, menggores luka kala tertawa. "Tugas kita memang berat, mengawal dan memastikan kepentingan stakeholder kita -para importir- supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang dalam penetapan nilai pabean. Juga memastikan guidelines WTO terakomodir dalam peraturan yang kita rancang sehingga selaras dengan international best practice. Tapi jangan pernah lupakan kepentingan stakeholder utama kita, rakvat Indonesia, yang menggantungkan nasibnya dipundak kita. Ditengah situasi target penerimaan sulit tercapai, kita harus mengoptimalkan potensi penerimaan Negara dengan cara memutakhirkan database nilai pabean sebaik yang kita mampu", tegasnya. Tapi sebenarnya bukan komitmen atau kinerja staf yang kurang yang menjadi sebab gundahnya, tapi lebih kepada aturan dan cara kerja pemutakhiran database nilai pabean yang menjadi akar masalahnya.

Komidi putar (merry go round, Inggris. Carrousel, Perancis. Draaimolen, Belanda) adalah salah satu jenis wahana permainan yang sangat digemari anakanak diberbagai belahan dunia. Menjanjikan sensasi berputarputar yang kadang mendebarkan, walaupun sebenarnya tidak kemana-mana, tempat turunnya sama persis dengan tempat naik.

"Mendebarkan tapi tidak kemanamana", barangkali frasa yang cocok juga untuk menggambarkan proses pemutakhiran database nilai pabean saat ini

Definisi

Database Nilai Pabean (DbNP) adalah kumpulan data nilai pabean barang impor dalam Cost, Insurance, dan Freight (CIF) dan/ atau nilai barang impor yang telah dilakukan penghitungan kembali, yang tersedia di dalam daerah pabean sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/ PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, dan secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2016 tentang Database Nilai Pabean

Database Nilai Pabean terdiri atas DbNP I dan DbNP II. Database Nilai Pabean I dimutakhirkan, dan didistribusikan oleh Direktur Teknis Kepabeanan untuk dan atas nama Direktur Jenderal. Database Nilai Pabean II disusun, dimutakhirkan, dan didistribusikan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk dan atas nama Direktur Jenderal.

Dalam rangka penelitian nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan Pengujian Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor. Pengujian Kewajaran dilakukan dengan cara membandingkan nilai barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor dengan nilai barang identik pada DbNP. Jadi, DBnP merupakan parameter yang digunakan untuk menilai apakah pemberitahun nilai

pabean masuk dalam katagori wajar atau terlalu rendah/tinggi. Dengan kata lain DbNP adalah alat deteksi dini untuk mengetahui kebenaran dan keakuratan pemberitahuan nilai pabean. Bisa dibayangkan dampaknya ketika parameter tersebut tidak akurat dan tidak lengkap serta memiliki "cacat bawaan"padahal parameter tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya nilai pabean yang ujungnya menentukan besaran bea masuk dan pajak yang harus dibayar importir.

Pemutakhiran DbNP adalah proses memperbaharui data DbNP menggunakan aplikasi CEISA dengan menu utama delete untuk menghapus data barang yang sudah lewat waktu, insert untuk memasukan data baru dan update untuk mengganti data lama dengan data baru. Saat ini pemutakhiran DbNP dikerjakan oleh Subdit Nilai Pabean Direktorat Teknis Kepabeanan.

Proses Berputar-putar

Sumber data yang dapat digunakan untuk penyusunan/ pemutakhiran DbNP I meliputi: DbNP II; Pemberitahuan pabean impor yang telah ditentukan nilai pabeannya berdasarkan nilai transaksi; Data laporan hasil audit (LHA) yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi; Data pada Surat Keputusan Keberatan yang nilai pabeannya ditentukan berdasarkan nilai transaksi; dan Katalog, brosur, atau informasi lainnya yang berasal dari dalam dan luar daerah pabean yang telah dilakukan penghitungan kembali.

Dari kelima sumber data tersebut, empat diantaranya merupakan data yang sumber awalnya adalah pemberitahuan pabean impor. Sumber data

LHA walaupun dalam menu aplikasi sudah tersedia namun sampai saat ini belum dapat direalisasikan. Disinilah proses "berputar-putar" terjadi, dimana nilai pabean dalam PIB dijadikan DbNP untuk kemudian dijadikan parameter untuk uji kewajaran PIB vang lain begitu seterusnya. Ungkapan garbage in, garbage out (GIGO) kiranya cukup relevan untuk dijadikan perhatian agar senantiasa waspada dalam proses pemutakhiran ini.

Ketika barang impor diimpor oleh lebih dari satu importir, dapat dilakukan komparasi dan analisa sehingga didapatkan nilai pabean yang mencerminkan atau paling tidak mendekati harga barang yang sesungguhnya. Namun apabila barang impor hanya diimpor oleh satu importir, maka data lain yang dapat digunakan sebagai pembanding adalah sumber data kelima vaitu menggunakan harga pasar. Penggunaan harga pasar sebagai sumber data DbNP ataupun sebagai pembanding harus dilakukan adjusment terlebih dahulu, dengan mengurangi biaya-biaya setelah importasi (post importation cost) sehingga didapatkan harga pada saat impornya (nilai pabean). Untuk menghitung besarnya biaya-biaya yang timbul pasca importasi, telah ditetapkan suatu rumus sebagaimana diatur dalam lampiran VIII PMK 160/ PMK.04/2010 yang disebut sebagai "Faktor Multiplikator".

Dari rumus Faktor Multiplikator sebagaiman dimaksud diatas, yang menjadi catatan (bisa juga disebut sebagai kelemahan) adalah penentuan besaran Komisi atau pengeluaraan umum dan keuntungan ditetapkan 20% yang berlaku untuk semua jenis komoditas barang impor, yang berarti binatang hidup, buah, sayur, daging, besi dan baja, keramik, mesin industri, elektronik, handphone, tekstil, garmen, mobil dan semua jenis barang impor lainnya dianggap

tingkat keuntungannya sama. Namun sebenarnya perancang aturan tersebut juga menyadari bahwa besaran tingkat keuntungan bersifat dinamis dan tidak dapat digunakan untuk semua jenis komoditi impor sehingga diberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menentukan besaran tersebut melalui frasa tingkat keuntungan sebesar 20% dari landed cost atau ditentukan lain dengan keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik.

Seiak PMK 160/PMK.04/2010 tersebut ditetapkan pada tanggal 1 September 2010 sampai dengan tulisan ini dibuat, belum ada ketetapan dari Direktur Jenderal menganai besaran Komisi atau pengeluaraan umum dan keuntungan yang digunakan dalam rumus Faktor Multiplikator, sehingga hal ini perlu dikaji dan perlu langkah konkret untuk menentukan besaran Komisi atau pengeluaraan umum dan keuntungan agar lebih akurat dan dibedakan per masing-masing jenis komoditi.

Untuk mengetahui validitas formula Faktor Multiplikator dapat dilakukan pengujian sebagai berikut. Untuk jenis buah fresh apple royal gala, misal harga dalam dokumen PIB yang dianggap cukup valid adalah 1,65 USD. Kemudian harga untuk jenis barang tersebut di pasar adalah sebesar 38 ribu rupiah, yang setelah dimasukan dalam rumus faktor multiplikator akan menghasilkan harga CIF 1,42 USD. Nilai yang dihasilkan lebih rendah 16% dari harga PIB. Dengan simulasi excel, untuk dapat menghasilkan nilai yang sama dengan harga dalam PIB maka diperlukan adjusment tingkat margin menjadi 3,74% dengan asumsi faktor-faktor lain tidak berubah (cateris paribus).

Pengujian untuk jenis barang yang lain adalah smartphone merk tertentu yang kredebilitas

mereknya sangat mumpuni sehingga level of trust terhadap kebenaran nilai pabeannya juga tinggi. Harga yang diberitahukan adalah 772 USD. Harga pasar barang tersebut di tabloid Pulsa adalah 11 juta rupiah. Apabila harga pasar tersebut dimasukan dalam rumus multiplikator maka akan muncul angka harga CIF sebesar 379 USD. Artinya, apabila menggunakan rumus multiplikator sebagai parameter uji kewajaran maka importir memperoleh fasilitas undervalue (yang legal) sebesar 104% lebih rendah dari harga impor yang sebenarnya. Dalam pengujian ini, apabila disimulasikan tingkat margin menjadi nol persen pun dengan kondisi cateris paribus maka angka yang dihasilkan tetap masih jauh lebih rendah dari harga PIB. Artinya bukan hanya besaran tingkat margin saja yang 'bermasalah' tapi faktor lain -antara lain tingkat perdagangandalam formula multiplikator yang harus dikaji ulang.

Penutup

Ketersediaan DbNP yang akurat dan lengkap sangat krusial dalam proses penelitian dan penetapan nilai pabean pada saat on clearance, apalagi jika dikaitkan dengan tugas pokok DJBC sebagai revenue collector. Penggunaan PIB sebagai sumber utama pemutakhiran DBnP harus diback-up dengan sumber data lain yang akurat sebagai data pembanding, mengacu pada prinsip multi method dan multi rater untuk dapat meyakini sebuah hasil assessment. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan formula faktor multiplikator, terutama harus dibedakan tingkat margin per jenis komoditi (one size doesn't fit all) untuk mendapatkan harga barang impor yang akurat dan kredibel. Apabila dimungkinkan, outsourcing pengembangan database harga yang mencakup semua komoditas yang diperdagangkan dunia dapat dijadikan opsi untuk memperkuat akurasi DbNP yang ada saat ini. (*)



Cooperation Between Customs and Investment Coordinating Board (BKPM) In Supporting Investment

In order to get closer and improve services to the public as well as shorten the service process in order to realize the quick, easy, inexpensive and transparent service, especially in the field of licensing process, the Investment Coordinating Board (BKPM) has assigned by the government to establish a One Stop Services (OSS) or in Indonesia is called PTSP, which includes 22 ministries and institutions representatives that can provide permits and non-permits services.

n order to get closer and improve services to the public as well as shorten the service process in order to realize the quick, easy, inexpensive and transparent service, especially in the field of licensing process, the Investment Coordinating Board (BKPM) has assigned by the government to establish a One Stop Services (OSS) or in Indonesia is called PTSP, which includes 22 ministries and institutions representatives that can provide permits and nonpermits services.

The main objective of the establishment of OSS/PTSP is to facilitate the licensing process in setting up a business. The establishement of this PTSP has set in October 2014, a day after President Jokowi had been inaugurated, he visited BKPM to dialogue with businesses, where businesses often complain towards the long process of permits in Indonesia. From that meeting, the President has commissioned BKPM to prepare OSS/PTSP within 3 months. Due to the quick and hard work, as well as the support from all parties, on January 26, 2015,

PTSP Center was officially announced in BKPM based on the Presidential Decree No. 97 of 2014.

According to Lestari Indah Deputy Head of BKPM, the Investment Services Division, the intent and purpose of the establishment of PTSP is to provide protection and legal certainty to the community, to shorten the service process, and to realize a fast, easy, inexpensive, transparent, and affordable service process and to approach and provide better service to the wider community.

From 22 representatives of ministries and institution that participate in providing service in OSS/ PTSP, one of which is the Ministry of Finance which involves the Directorate General of Taxation (DGT) and the Directorate General of Customs and Excise (DGCE). Both Directorates in the Ministry of Finance are responsible working to provide the best service support for the smooth of permit process that needed by the investors or stakeholders.

The concentration of the Ministry of Finance related to investments are facilities associated with the capital investment. In the field of taxation, for example, there are tax holiday or tax allowance for investments who come from abroad to Indonesia or domestic investments.

Hopefully, with OSS/PTSP, investors can more easily take care of any permits required in making an investment, as well as attracting the interest of other investors that want to invest in Indonesia. Since the more investors invest in Indonesia, so it would be able to promote national economic growth and create jobs itself.

So what are the duties and responsibilities as well as services provided by Customs? Director of Customs Facilities of DGCE Bapak Robi Toni explained the background of cooperation between BKPM and DGCE or with other Ministries and Institutions, is basically similar, namely how to attract and increase investment in Indonesia through the ease of information and investment

permit services for investors. In this case, the duty of Customs is to support so that investors can invest and run their business well. They can comply with the statutory provisions in force, particularly in the areas of customs, that are not constrained by the not necessary things.

In accordance with the mandate of Article 2 (a) Regulation of the Minister of Finance No. 258/PMK.011/2014 on the Implementation of PTSP in the field of finance at BKPM, that the services provided by Customs and Excise officers at PTSP BKPM Centre, mainly concerning on the reception service and research of the completeness of permit files of alienation of machinery and/or goods and materials imported by using the import duty exemption facility within the framework of capital investment, to forward the file to the Director of Customs Facilities of DGCE. Customs will also provide additional services such as customs consulting

For that, since early 2015, according to the Presidential Regulation No. 97, 2014, Customs has placed its officials in Central PTSP. Customs officers have duties not only to serve the permit process related to customs but also to give information to the investors and prospective investors related to the customs provisions in Indonesia and

facilities for customs, for example, what they can be utilized in support of the efforts being or will be developed.

Furthermore, Robi Toni explained that the concrete form of cooperation between DGCE and BKPM such as; to support the government's program to realize the supply of electricity of 35,000 Megawatts (MW) within a period of 5 years (2014-2019). The Duty Exemption for capital goods imports in the framework of the construction and development of power generation industry for the public interest that were previously handled by DGCE, since the issuance of PMK No. 66/ PMK.010/2015 dated March 27, 2015, it has assigned to the BKPM. Hopefully, since this facility is directly handled by BKPM, it can be promoted very well together with other BKPM investment promotion programs.

In relation to the exemption on imports of machinery and goods, as well as materials for construction or industrial development within the framework of investment, BKPM and has conducted the evaluations and agreed to make the mechanism that is more supportive towards investors who are realizing their investment project. It can be realized with 'the acceleration of green line.' The general rule is the new importer will accept the determination of the red line for the importation,



then when its track-record is good, then for next importation will get an enhancement that is yellow or green line determination. However, with this facility, if it meets certain requirements, the new importers who are new investors may obtain an acceleration, so the early importation can directly obtain a green line. "It supports them in order to realize the investment projects more quickly," said Robi Toni.

Related to the acceleration of green lane importation facility, according to Robi Toni, listed since it was launched in January 2016 ago, there were at least 66 companies that already used this facility with an investment of Rp. 179 trillion. And while there are four companies that have been recommended by BKPM which are in the process of research in DGCE.

Meanwhile, for the customs clearance time, Robi Toni explained that for the importation of red lines must go through the process of physical and document inspection, where the average time required for the clearance can reach 5-6 days. However, for investors who get this facility, their customs clearance are faster, because there is no physical inspection towards the imported goods and the release of goods can be done without waiting for the examination of documents so that the clearance time becomes much faster and even less than 0.5 day.

According to Fajar, a Customs and Excise officers who provide services in OSS/PTSP BKPM Center, according to the data from April until 31 August 2016, Customs has served at least as many as 525 service consisting of 503 consultancy services and 22 services permits of alienation to investors or visitors who come to the front office of Customs and Excise in the OSS/PTSP Center.

In order to make investors can obtain a green line facility from DGCE, firstly, BKPM has to select investors who qualify and give recommendations to DGCE. Lestari Indah said that BKPM could make recommendations after assessing the completeness of permit from



Lestari Indah Deputy Head of Investment Coordinating Board (BKPM), the Investment Services Division



Director of Customs Facilities of DGCE

investors, their reporting obligations have met and the track record of the company itself since they have given permission. Based on that assessment, it will be submitted to the DGCE, that the company is good, in accordance with a permit issued in order to get a recommendation.

"All this time, our cooperation with Customs has been close, because we're issuing the exemption from import duty of machinery and raw materials, with these innovations, actually the concept is Mr. President wants a simplification and acceleration, "he said.

Lestari Indah added that in the near future, there is one more stage of unrealized cooperation between DGCE and BKPM called PDKB (Company In

Bonded Zone), that is being finalized. "So if the companies want to be PDKB (Company In Bonded Zone), they must have a business license. In our regulation, a business license can be applied if it has been finished. In this case, there are differences from the definition of a business license between BKPM and Customs. However, it has been conveyed that BKPM will accommodate the business license conditioned by DGCE to PDKB. This is a form of cooperation to accelerate the company's status to become a Bonded Zone. I have not been deal with Director General of Customs and Excise, it is still in Director level, but we are ready to meet with the Director General for the finalization," she explained.

Further, Lestari Indah expects that there will be a better cooperation between BKPM and DGCE, "Thanks to Customs that has entered into a part of our program with its Customs Identification Number (NIK). Although we know that NIK is already online, but it is still entered here, and present at the TPSP to succeed BKPM program, "she said.

The Efforts of Investment Coordinating Board (BKPM) to encourage investment

As the main liaison between business and government, Investment Coordinating Board (BKPM) is mandated to encourage direct investment, both domestic and abroad, through the creation of a conducive investment climate. After BKPM has been restored the status became the ministry in 2009 and directly responsible to the President of the Republic of Indonesia, thus the targets of investment promotion agencies is not only to increase the number of investments from within and outside the country, but also to get an excellent investment that can improve social inequality and reduce unemployment. This institution does not merely act as a proactive advocate in the field of investment, but also as a facilitator between the government and investors.

Indonesian investment growth, either belong to domestic investment (PMDN) and foreign direct investment (FDI) are more increased. From the first result of investment realizations reports and Second Quarter of 2016, its value continues to increase, so BKPM is optimistic that the target of this year's investment realization can reach Rp. 594.8 trillion. From that realization, BKPM continues to work hard to get an excellent investment, and investment distribution is not only concentrated in urban areas and big industries, but also distributed throughout the entire archipelago.

One of Investment Coordinating Board (BKPM) efforts intended to facilitate and provide comfort to the investors to invest in Indonesia is to provide simplification of the permit. The simplification of investment services can be completed in just over 3 hours, known as the Investment Permit 3 Hours (I23J). "This program has become the program of the President when the President go everywhere, he would promote this program is always, and the users of this service have also been very much up to hundreds of companies," said Lestari Indah.

Furthermore, Lestari Indah explained that the program of BKPM is an investment program. Now Mr. Jokowi's program is accelerating and streamlining those principles in terms of a permit. For the acceleration, we start with PTSP which collaborate with 22 Ministries/Agencies that has already conducted from the beginning of January 2015, then we continue to make a new innovation, we make a breakthrough with the investment permit only 3 hours (I23J).

In investment permit only for 3 hours, investors will get 8 permit products, they are starting from the filing of permit investment, making and validating the deed of incorporation in the Ministry of Justice and Human Rights, TIN (Taxpayer Identification Number), TDP (Company Registration Number), RPTKA (The Plan for Utilization of Foreign Workers), IMTA (Issuance of Expatriate Employment),

API-P (Importer Identification Number), NIK (Customs Identification Number) associated with Customs and land availability information if needed.

"Those are we published in just over three hours. Why this could be finished, because the shape of a One Stop Services (PTSP), it has already existed in all offices. There are Investment Coordinating Board (BKPM), tax, the Ministry of Commerce, Ministry of Justice and Human Rights, Ministry of Manpower and Transmigration, and Directorate General of Customs and Excise. Now with our coordination, the service breakthrough with three hours, we can give 8 products "she explained.

Lestari Indah added that this three-hours service has launched in January 2016 by the Vice President Yusuf Kalla. In the beginning of January 2015, One Stop Services (PTSP) has brought 22 Ministries/Agencies. Then, in January 2016, we have launched the three-hour service investment permit with the realization that called the Direct Investment Construction Permit (I2LK).

The usefulness of the Construction Direct Investment Permit may be said that, after the investor has obtained the required permits within three hours, then he may come to the industrial area to buy the land and the next day, he can begin building the plant. Usually, investors firstly should manage the Building Permit (IMB), making the EIA (Environmental Impact Assessment) and others to build new factories. But with the construction direct investment permit, in parallel with the construction, and manage the other letters.

Then, after the plant completed, investors naturally begin to import goods like the machine. Normally, a policy from Customs, the new company must have hit the red line. The new company that has not imported, when it imports, it would enter the red line. With the cooperation between Investment Coordinating Board (BKPM) and Customs, it can be given recommendations to the

Customs that the company properly fulfilled its obligations like a full permit, so that Customs provides a service it enters the green line.

According to Lestari Indah, improving the investment climate in Indonesia in addition to the ease of innovation in services provided to attract investors, at least there are seven advantages of Indonesian compared with other countries, especially neighboring countries which could be offered to investors.

First, Indonesia is located in the center of the global market concentration. Indonesia lies in Asia where in demography, half of the world's population is in Asia. ASEAN itself is a part of Asia has a population about 618 million people and one of the countries with the largest population in ASEAN are Indonesia, which has amounted to 255 million. Indonesia's demographic has parameters that can attract investors to invest in Indonesia like the number of Indonesian middle economic class is 64 million people with the available labor force amounted to 124 million.

Second, Indonesia has abundant natural resources. As we have long heard that Indonesia has abundant natural resources either renewable or non-renewable or fossil. Some of the potential natural resources of Indonesia which is one of the world's largest potential included Indonesia crude palm oil which was ranked first in the world based on the amount of production that is as much as 27 million metric tons. Geothermal Indonesia also ranked the first world where reserves are 40% of total world reserves and many other natural resource wealth.

Third, Indonesia is a production base for reaching the global market. Indonesia is now the production base for several major companies in the world. To further attract companies in order to build their production base, it needs the necessary stimuli of which incentive characterized by the cooperation between Government to Government (G to G). It is between



Indonesia and several countries, for example Japan-Indonesia EPA, Australia-Indonesia CEPA, and much more.

Fourth, Indonesia is a global investment destination. Based on data owned by Investment Coordinating Board (BKPM), the total investment in Indonesia, either from the outside (Foreign Direct Investment) or domestic (Domestic Direct Investment), in the first quarter of 2016 has increased, compared to previous quarters as many as Rp. 145.4 billion. In year on year, the realization of investments grew by 17.6%. It is also reinforced by a survey conducted by The Economist in which Indonesia is ranked the third major investment destination in Asia following India and China.

Fifth, Indonesia has a rapidly growing digital economy. In today's digital era, the digital economy has a very important role and the great

influence for the economic growth of a country. Indonesia with a population has many active Internet users as much as 88.1 million users, up 15% from a year earlier to 79.1 million users. Online transaction in Indonesia in 2015 increased by 40% compared to the previous year amounted to 18 billion US dollars.

Sixth, Indonesia has a stable and strong Gross Domestic Product (GDP). Indonesia has a GDP of 896 billion dollars with a GDP of 3,416 dollars per capita which based on several sources such as the IMF, ADB and the World Bank. GDP growth in Indonesia still has a very prospective than some other Asian countries with an average of 5.1 %.

Seventh, Indonesia has a growing global perception. Some parameters of Indonesia's economic performance undertaken by international institutions prove that Indonesia has a good perception in the international community as an investment destination. Some examples of these performance parameters are the Price Waterhouse Cooper (PWC) that said Indonesia is the second-best investment destination in the APEC region after China, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) also makes Indonesia as the second most promising country for investment abroad, and many other parameters.

The direction strategy of investment promotion that conducted by BKPM in the near future is the focus in the short term to improve the efficiency of investment in Indonesia. This includes the optimization of natural resources as a catalyst to create the momentum needed to implement programs towards a greater economic development.

The canalization of investment is towards the needs of hard and soft infrastructure. The meaning of hard infrastructure includes highways, airports, ports and electricity generation capacity, while soft infrastructure includes health and education services.

To build the foundation for industrialization. Those require investments in continuous education to create a workforce that educated and highly skilled. The next demand is the removal of uncertainty in policy, including the implementation of One Stop Service (PTSP) and SPIPISE or NSWi (National Single Window for Investment) that designed to tackle these problems. The legal provision concerning on non-fiscal incentives and fiscal also needed to be considered to support the efforts of large-scale industrialization.

To support the establishment of a knowledge-based economy is with developing a more educated workforce that can compete globally. At this stage, Investment Coordinating Board (BKPM) will work to continue to strengthen its role as an advocate of investment policy and liaison between investors and the government, both for foreign and domestic capital.

(Piter)

nvestment realization in Indonesia is increasing every year. This brings with it a positive impact to the national economic development, both in terms of state revenue and availability of employment.

To discover what the government has done to attract investment and monitor the development of investment and its investment, WBC has interviewed the Deputy of Chairman at Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), Investment Service Department, Ir. Lestari Indah, MM at her office.

Could you explain the overall duty and function of BKPM, especially the **Investment Service Department?**

The Investment Service Department has the duty of developing and executing policies in investment service by coordinating the development and execution of investment service policies, studying and proposing investment service policies, determining operating norms, standards, and procedures of investment service, coordinating the planning and execution of integrated investment service, coordinating the assignment of the relevant representative/ official in the integrated investment service, providing licensing and facilities on investment, as well as executing duties assigned by the Chairman of BKPM.

How is the current condition of investment in Indonesia?

The condition or development of domestic investment (PMDN) and foreign investment (PMA) in Indonesia since 2011 to 2016 is generally increasing in terms of realization. Investment realization in 2011 was 251.3 trillion rupiah, 313.2 trillion rupiah in 2012, 398.6 trillion rupiah in 2013, 463.1 trillion rupiah in 2014 and 545.4 trillion rupiah in 2015.

What about BKPM target for this vear? Is it attainable?

The investment target for 2016

INVESTMENT IN INDONESIA IS CONTINUOUSLY **INCREASING**

Lestari Indah, Deputy of Chairman at Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), Investment Service Department



is 594.8 trillion rupiah. We are optimistic that we will achieve the target considering that the realization up to the first quarter has reached 146.5 trillion rupiah, increasing 17.1% from the same period in 2015. The first quarter also records 1.747 new projects that have begun to contribute to the realization. The second quarter records a realization of 151.6 trillion rupiah, a 12.3% increase from the same period last year. In total, up to June 2016, the realization is 298.1 trillion rupiah or 50.1% of the target.

Has there been any obstacle in achieving the target?

There are some actual issues that we are trying to solve, such as the procedure simplification for licenses, for example in starting a business, registering a new property, getting electricity, establishing premises, etc. We are also trying to increase the skills of labors to improve their competitiveness with those of other countries.

Compared to other countries, especially the neighboring countries, what advantages can Indonesia offer to potential investors?

We have advantages, such as the fact that Indonesia is located at the center of the global market, possessing abundant natural resources, having the status of production base for the global market and the global investment destination, having a rapid digital economic development and a stable and strong gross domestic products, as well as an increasing global perception.

Any specific requirement that potential investors must fulfill?

Investment in indonesia is broadly regulated in Law Number 25 of 2007, with consideration to the Presidential Regulation Number 44 of 2016 concerning Investment Negative List (DNI). Specific requirements are subject to each sector where the investment is to be made.

What sector do investors, especially foreign investors, generally prefer as the investment destination?

Data of 2015 shows that infrastructure is the sector with the biggest realization, 151.4 trillion rupiah, followed by labor-intensive industry with 55.4 trillion rupiah, and tourism and special zone with the total realization of 49 trillion rupiah.

Sectors with the largest increase are maritime industry (115%), downstream mineral industry (83%), and tourism and special zone (49%).

What is the benefit for the national economy if more investors are investing in Indonesia?

The economic growth of a country can be assessed from its GDP growth. Some components that influence the GDP are consumption, government expenditure, export nett, and investment. The more investor invests in Indonesia, the greater the economic development in indonesia. Investment could also create employment, transform Indonesia's economy from being consumptionbased country into a productionbased country, increase state revenue from taxes, and promote equal economic development.

What programs does BKPM have to attract investors?

BKPM continuously innovates and simplifies the licensing for investors to establish a new business in Indonesia. We have the Integrated Service Center (PTSP Pusat), in which there are representatives from 22 ministries and agencies, and 167 licenses whose authority have been transferred to BKPM. Other innovations, such as:

- 1. 3-hour Investment License (I23I)
- 2. Direct Investment for Construction License (I2LK)
- 3. Green channeling, in cooperation with the Directorate general of customs and Excise.

What is the background or history behind the establishment of the Integrated Service (PTSP)?

PTSP is established to facilitate the licensing of establishing a new business by simplifying the licensing process to create a fast, easy, inexpensive, transparent, certain, and accessible service.

In October 2014, a day after the President Jokowi inauguration, he visited BKPM and had a dialogue with businessmen, who at that time complained about the long time it took to obtain a license in Indonesia. The president then ordered BKPM to establish PTSP in 3 months. On 26 january 2015, PTSP Pusat was officially launched with the legal basis of the Presidential Regulation Number 97 of 2014.

What kind of service is provided to investors?

As regulated by the Regulation of BKPM Chairman Number 14, 15, and 16 of 2015, and based on the delegation of authority from 22 relevant ministries/ agencies, BKPM provides a total of 167 licensing services, such as:

- a. Licensing Services:
 - i. Principle License;
 - ii. Business license for various businesses:
 - iii. Business expansion license for various businesses;
 - iv. Investment company merger license for various businesses;
 - v. Amendment business license for various businesses;
 - vi. Representative Office license: and
 - VII. Operational license for various businesses.
 - B. Non-licensing Services:
 - i. Foreign Worker Employment;
 - ii. Importer Identification Number:
 - iii. Technical Recommendation for various businesses;
 - iv. Import duty exemption for machineries and raw materials:
 - v. Tax Allowance recommendation:
 - vi. Tax Holiday



recommendation; viii. Green channel recommendation.

What ministry/ agency provides services at PTSP?

- 1. Ministry of Finance:
 - a. Directorate General of Taxes
 - b. Directorate General of Customs and Excise
- 2. Ministry of Industry
- 3. Ministry of Trade
- 4. Ministry of Energy and Mineral Resources:
 - a. Directorate General of Oil and Gas
 - b. Directorate General of Mineral and Coal
 - c. Directorate General of Electricity
 - d. Directorate general of Renewable Energy and Energy Conservation
- 5. Ministry of Public Works and Housing
- 6. Ministry of Transport
- 7. Ministry of Communication and Information
- 8. Ministry of Agriculture
- 9. Ministry of Health
- 10. Ministry of Tourism
- 11. Ministry of Environment and Forestry

- 12. Ministry of law and Human Rights
 - a. Directorate General of immigration
- 13. Ministry of Education and Culture
- 14. Ministry of Marine and Fisheries
- 15. Ministry of Manpower
- 16. Ministry of Agraria and Spatial Planning/ Head of National land
- 17. Ministry of Defence
- 18. National Police of Indonesia
- 19. Indonesian National Food and Drug Agency
- 20. National Standardization Agency
- 21. National Electriticity Company
- 22. National Crypto Agency

What kind of cooperation does **BKPM** have with DGCE?

We are working with DGCE in determining green channel for customs clearance in order to expedite investment realization by facilitating investors in importing goods. We also exchange data electronically and automatically in providing import duty exemption, which includes data on the approval of duty exemption for industry development or expansion for investment and data of import realization of machineries and/ or goods and materials subject to

import duty exemption for industry development or expansion for investment.

How many companies have utilized the service jointly provided by BKPM and DGCE, and how much has the investment been?

There are in total 66 companies with the investment value of 179 trillion rupiah, most of which, 19 companies, are located in West Java. Most of the companies, 15, are from the industry of base metal, macinery, and electronics.

What kind of evaluation and improvement that have been done to further improve the service provided by PTSP?

We continuously add the number of consultation counters to decrease the waiting time for investors who want to consult with BKPM. We also monitor the counters and ensure that an LO is available at the assigned time. We provide the room and facilities for LO from other ministries/ agencies, and we keep coordinating with relevant ministries and agencies to simplify the licensing/ non-licensing SOP at those ministries/ agencies.

(Piter)



Customs and Excise Service Office Type C of Pangkal Pinang

Serving the Industries in Bangka Island

Bangka Island as part of Bangka Belitung Province has reach tin content and other natural resources. Almost all of world's high quality tin demands are supplied from here so that this commodity becomes the mainstay of national revenue. Besides tin, it also has other top commodities such as fish, pepper, and CPO.

he industry in Bangka Island needs government's support and one of the institutions that provide service and control is Directorate General of Customs and Excise c.q Customs and Excise Service Office Type C of Pangkal Pinang (Customs Office of Pangkal Pinang).

Previously, before 1972, there were four offices that provided service as well as control in there. There were Inspection Office Type C of Pangkalbalam, Inspection Office Type D of Muntok, Inspection Office Type D of Toboali, and Inspection Office Type D Belinyu.

Customs Office of Pangkal Pinang





supervises all area of Bangka Island. Based on the Head of Customs Office, Nasrul Fatah, the stakeholders in Pangkal Pinang really comply with the customs procedures. This is because the stakeholders and their commodities are not very much changing. The challenge that faced is the distance between one control spot to the other control spot. For example, to hold service and control in Muntok, it takes 3 hours road trip for 126 km, while to reach Belinyu, it takes 2 hours road trip for 90 km. all of them must be handled promptly, precisely and sprightly.

This condition must be supported by adequate human resources and facilities. Currently, Customs Office of Pangkal Pinang only has 40 employees and one patrol boat. It cannot be the reason to provide poor service and control. By optimizing them, Customs Office of Pangkal Pinang still can provide excellence service and control. The relationship with the stakeholders and regional intelligence community, Police and

National Narcotics Bureau are wellmaintained to support its roles.

Customs Office of Pangkal Pinang always protects the community from illegal/smuggled products that enter or exit the Bangka Island. As the guidance in implementing its roles, Customs Office of Pangkal Pinang holds onto motto "AOKLAH" which in Bangka language means "yes". AOKLAH itself stands for Amanah (Trustworthy), Objektif (Objective), Kompeten (Competent), Lugas (Straightforward), and Handal (Reliable).

The conducive situation in Bangka Island may be the attraction of domestic and/or foreign investors to make it as industrial base, either in mining industry (tin) or in tourism. However, the massive mining exploitations sometimes neglect the surrounding environment. Therefore, in some places, we can find damaged

Regarding the tin mining activities, according to the Marketing of PT.TIMAH, its mining activities

have been conducted based on **Environmental Impact Assessment** so that all activities carried out by PT. Timah in land nor sea are always considering the sustainability of environment. PT. Timah also expressed their appreciation and gratefulness toward Customs Office of Pangkal Pinag for their service. The exportation of tin can be conducted easily and smoothly.

Nasrul Fatah expressed his wish on the establishment of Bonded Logistic Center in Pangkal Pinang so that PT. Timah does not necesarily store its tin in Singapore for efficiency, to press the logistic costs and to introduce that the high quality tin is not actually coming from Singapore but from Indonesia. Customs Office of Pangkal Pinang also inovates by implementing IT-based technology in accordance with the development of trade world, including SIBOS application in order to improve the service for stakeholders, especially with regard to postal goods consignment. (*)

The Whirligig of Customs Valuation A Study of the Regulation on Customs **Valuation Database**

Oleh: Teguh Iman S, Head of Customs Valuation I Section, Directorate of Customs

n a gloomy morning, when a shower of drizzle came down in the erroneous season, an anxious Head of Section gave a sudden instruction to his staff. "There was something important that I need to tell you." He said. A moment later, his long unspoken worries blurted out, "Our duty is heavy, to oversee and ensure the interest of our stakeholder -the importers- so it won't be treated arbitrarily in determining the customs valuation. Then to ensure WTO guidelines accommodated in the regulations that we have designed in order to comply with international best practice. However, we shall never forget our true stakeholder, the people of Indonesia, who rely on us. Amidst the difficult situation to achieve revenue targets, we need to optimize the potential state revenue by updating customs valuation database as best as we can ", he said. Yet it was not the commitment or performance of the staff that made him restless, but rather the rules than how to update database itself was the root of the problem.

The whirligig (merry-go-round. Carrousel in France. Draaimolen, in Dutch) is a popular game adored by children around the world. Giving a whirling sensation that often thrilling, yet kept you locked in a circle. It's thrilling but unmoving, perhaps it as a suitable phrase to describe the process of updating the customs valuation database.

Definition

The Customs Valuation Database (CVB) is a collection of customs valuation of imported goods in form of Cost, Insurance and Freight (CIF) and/or value of imported goods that have been carried out a recount, which is available in the customs territory as provided by Article 24 of the Regulation of the Minister of Finance No. 160/PMK.04/2010 on Customs Valuation for Calculation of the Import Duty, as amended by the Finance Minister Regulation No. 34/ PMK.04 /2016, and in more detail in the Regulation of Director General of Customs and Excise No. PER-19/ BC/2016 on Customs Valuation Database.

Customs Valuation Database consists of CVB I and CVB II. Director of Customs, for and on behalf of the Director General, update and distribute the Customs Valuation Database I. On the other hand, the Head of Regional Offices and the Head of Prime Customs Offices prepare, update, and distribute the Customs Valuation Database II.

In term of customs valuation research, Officials of Directorate General of Customs and Excise (DGCE) conduct a Fit and Proper Test on the customs valuation declaration that listed on the import declaration.

A Fit and Proper Test works by comparing the value of goods notified on the import declaration with a value of identical goods in CVB. Thus being said, CVB is a parameter used to assess whether the declaration of value listed on the import declaration was too high or too low. In other words, CVB is an early detection tool to find out the truth and accuracy of the declaration of the customs valuation. You can imagine the impact when the parameter is inaccurate and incomplete and has a "congenital defect" while these parameters will determine the acceptance or rejection of the customs value. Therefore, it will affect a number of customs duties and taxes.

Using CEISA, DGCE officers can update CVB by clicking "Delete" menu to delete the data of items that are overdue, "Insert" to enter new data and "Updates" to replace the old data with the new one. Currently, CVB updates are a responsibility of the Sub-directorate of Valuation, Directorate of Customs.

The Loop in the Process

The source of data used for the preparation/updating CVB I includes: CVB II; import declaration that customs valuation has determined based on transaction value; Audit report which customs valuation determined based on the value of transaction; Data on the Decree on Objection which customs valuation

determined based on the value of transaction; and a catalog, brochure, or other information that come from within and outside of customs territory that has been recounted.

From five sources of data, four of which are the source of data is initially import declaration. Audit Report data, even though a menu of applications already available, but has yet to be realized. This is where the "looping" occurs, CVB consists of customs valuation listed on the Import Declaration. Then the CVB acted as a parameter to another Import Declaration's Fit and Proper Test and so on. The phrase "garbage in, garbage out" (GIGO) should express the caution in the updating of CVB.

When the imported goods are imported by more than one importer, it could be conducted a comparison and analysis to obtain the customs valuation which reflects or at least closes enough to the actual price of the goods. However, if the imported goods only imported by one importer, the only other data that can be used for comparison is the fifth data source, market prices. The use of market prices as a data source or as a comparison, an adjustment must be made in advance to reduce costs that incur after importation (postimportation cost) to obtain the price of imports (customs valuation). To calculate the amount of the costs incurred after importation, a formula has been set out in annex VIII PMK 160/PMK.04/2010 is referred to as "Multiplications Factor".

From the formula of "Multiplicators Factors" as mentioned above, there is one thing (that is also as a drawback) needed to be done thoroughly that is the determination of the amount of commission, expenditure to the public and gain, set at 20% which is applicable to all types of commodities imported goods that means live animals, fruits,

vegetables, meat, iron and steel, ceramics, industrial machinery, electronics, mobile phones, textiles, garments, cars and all kinds of other imported goods are considered the same profit level. However, the designer of these rules are also aware that the amount of the rate of profit is dynamic and can not be used for all kinds of commodities imported to be given the authority to the Director General to determine these quantities through phrases "profit rate of 20% of the landed cost or as otherwise determined by the decision or legislation other invitation by the Director General at any time or periodically".

In fact, since the Finance Minister Regulation number 160/PMK.04/2010 is set on September 1, 2010, up to this writing created, there is no provision of the Director General regarding the amount of commission, general expenditure and gain factor used in the formula of multiplications factor. It needs to be studied and an actual step is necessary to determine the amount of commission, general expenditure and to gain more accurate and distinguished per each type of commodity.

To find out the validity of the formula of the multiplication factor, it can be tested as follows; for Royal gala fresh apple, for example, the price listed in the declaration is considered to be quite valid at \$ 1.65. The price in the market reached 38 thousand rupiahs, which once included in the formula of factors multiplications will generate CIF price \$ 1.42. The resulting value is lower than 16% of the import declaration. By simulating in excel, in order to produce the same value as the price listed in import declaration, it required adjustment margin rate to 3.74%, assuming other factors unchanged (ceteris paribus).

The test for another type of goods is a smartphone with a certain

brand that is highly qualified and has genuine brand credibility which also affects the higher level of trust on customs valuation. The notified price is 772 USD. The market price of such goods in the tabloid "Pulsa" is 11 million Rupiah. If the market prices are included in the formula of "Multiplication formula" it will display a CIF price of 379 USD. It means that when using the formula as a Fit and Proper Test parameters, so the importers obtained an undervalue facility (legal) amounting to 104% lower than the actual import price. In this test, the simulated margin rate is zero percent, even with the ceteris paribus condition. The resulting figure is still far lower than the price of Import Declaration. This means not only the amount of the margin level that is 'problematic' but other factors like trade shall be re-examined.

Closing

The Availability of accurate and complete CVB is crucial in the research process and the determination of customs valuation on clearance, especially if related to the main task of DGCE as a revenue collector. The use of Import Declaration as the main source for updating CVB should be backed up with other reliable and accurate data sources as the comparison data, referring to the principle of the multi-method and multi-rater to be able to rely on an outcome assessment. This requires enhanced formula of "multiplications factors", especially the margin rate should be distinguished by the type of commodity (one size does not fit all) to get the more accurate and credible price of imported goods. If possible, the outsourcing the development of price database that includes all commodities traded in the world can be used as an option to strengthen CVB accuracy available today. (*)

Port Of Panarukan

ort of Panarukan is probably much less famous than other ports, such as Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, and Tanjung Perak. Panarukan is a district in the Situbondo regency. If you go through the north coast route from Surabaya, you will pass through a majestic building of steam-powered electric generator of Paiton before entering Situbondo regency, Besuki region, which has a white sand beach along the road.

In the 18th to the 19th century, during the Dutch East Indies' colonization, Panarukan used to be a famous town to which traders travel because it has a strategic port located at the northern coast of East Java near a crowded trade route. Kilensari port used to be the economic pillar of Dutch East Indies and famous as the business route in Asia and Europe. Panarukan used to be a regency until the end of the 20th century when Situbondo, which used to be Panarukan capital district, was promoted as the regency replacing Panarukan. Panarukan is now a district with 8 villages, Kilensari, Wringin Anom, Paowan, Sumber Kolak, Peleyan, Duwet, Alas malang, and Gelung.

Panarukan was famous at that time also because of the project of the Governor General of Dutch East Indies, Willem Daendels in mid-1809. Daendels, the 36th Governor General, finalized his larget project at time, a 1000 km road which was known as "Anyer-Panarukan Road" or "Daendels Road" or "Post Road".

As the icon of the city, we can now find the 1000 km Anyer-Panarukan Monument to commemorate the building of the road that stretches from the westernmost of Java in Banten to the easternmost in Panarukan. While the building of the road was infamous for being a sweatshop that had many casualties,



the road has proven to very beneficial for the flow of traffic and economic development, and it is also constantly crowded.

Infrastructure was not the only thing that made Panarukan famous. Its economy was developing rapidly at the end of the 19th century, when in 1886 it was turned into the 'gold reserve' for the Dutch East Indies.

The establishment of Panarukan port was initiated by a Dutch trader, George Bernie, the owner of NV. LMOD (Landbouw Matschappij Oud Djember), who was also the owner of the largest plantation in Jember. Panarukan grew fast because it exported plantation products, such as tobacco, coffee, tea, and cane.

To complement the port, a train station was built by the Netherlands in the 1890s. The route of the train was Jember-Bondowoso-Panarukan which spanned more than 75 km. It used to serve a tram heading straight to the port to transport the plantation products to be transferred to the ship or stored in the warehouse. While no longer functional and worn out, the building remains. The building is Dutch-style and consists of the office of head of station, general

warehouse, and waiting room for passengers. The station used to serve two railways, which means that it used to be a crowded and busy station when operational. The railways were important to transport tobacco from jember and Bondowoso. Panarukan used to also have 12 sugar factories. Only a few remain.

At the port of Panarukan, you can find old buildings used to be utilized as the warehouse to store plantation commodities. They are mostly worn out, some are even barely standing. The port began to decline once the functions of the ports began to be switched to Probolinggo and Banyuwangi. It is now only used by fishermen and traditional boats.

There is an interesting development concerning the port of Panarukan situation recently. Three years ago, Sea Transport Office built a new dock spanning 3 km seaward. The local government, however, is unable to attract any investor to utilize the new dock. The local government is said to be working hard to reinvigorate the port, including by planning to restore the long abandoned railway to the port from the station.

(Piter)



KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI











Selamat Hari SUMPAH PEMUDA